Kata Pengantar:
Zuhairi Misrawi





Menjadi Kader PMII

Ahmad Hifni

Ahmad Hifni

Menjadi Kader PMII

Moderate Muslim Society

Komentar dan Apresiasi

"Saya bisa mengenal PMII lebih jauh melalui buku ini. Hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi di bawah naungan NU memberi hasil yang yang tidak sia-sia. Hal ini terbukti dari sejak awal berdirinya, 17 April 1960 sampai saat ini, 17 April 2016 PMII mampu berdiri kokoh di tengah dinamika perjalannya. Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran mahasiswa NU yang akan menjadi bagian dari khazanah literatur tentang ke PMII-an. Semoga para pemuda-pemudi Nahdliyin bisa terus berkontribusi untuk bangsa dan negara."

Syarifaeni Fahdiah., *Ketua Umum Korps HMI-Wati Cabang Ciputat*

"Buku yang sangat menarik untuk ditelaah para kader Muda PMII dan dimuraja'ah para senior PMII. Buku ini menggambarkan posisi strategis PMII saat ini dan di masa depan. Dengan bahasa yang membuat penasaran pembaca, penulis muda yang merupakan kader muda potensial PMII ini telah menawarkan gagasannya yang sangat brilian."

Dr. Akhmad Saehudin, M.A., *Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

“Buku karya sahabat saya ini memperkuat keyakinan saya bahwa PMII tidak akan pernah putus berkontribusi terhadap bangsa dan negara di manapun dan kapanpun. Para aktivis PMII wajib percaya diri dan katakan “saya generasi bangsa !”.

Ahmad Ridwan Hutagalung., *Ketua Majelis Pembina Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora.*

Buku karya sahabat Ahmad Hifni ini menerangkan sejarah panjang PMII. Ia juga menyalurkan pikiran dan gagasannya terkait bagaimana menjadi kader PMII dalam berdinamika di kampus dan merespon isu-isu kontemporer. Buku ini wajib dibaca khususnya bagi kader-kader PMII agar tidak buta sejarah, berintegritas, unggul dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Muhammad Huda Prayoga., *Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat*

“Membaca buku ***Menjadi Kader PMII,*** seperti menghadirkan lagi memori kolektif masa lalu yang menjadi ‘ruang’ diaspora setiap orang yang terkait dengannya. Bergelut dalam diaspora keilmuan dan budaya untuk memasuki ‘arena kontestasi’ yang sebenarnya, bukan untuk mencari yang menang dan kalah, tetapi meneguhkan kembali *identitas* sekaligus untuk selalu menjadi *‘anfa’uhum linnas’*.”

Siti Amsariah HM, M.Ag., *Alumni Aktivis Perempuan PMII dan Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

“Bagi saya buku ini merupakan oase di tengah keringnya inisiatif pemuda, terutama aktivis untuk menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Sahabat Ahmad Hifni telah menggugah dan mengisi kekeringan ini dengan bentuk sebuah buku. Buku ini akan mengokohkan nama PMII dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sekaligus bukti bahwa aktivis PMII masih siap dengan pergulatan pena. Selamat Harlah ke-56 PMII.”

Junaidi Denay., *Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Merangin Jabodetabek*

“Banyak alumni PMII yang menjadi intelektual muslim. Mereka mengabdi di pemerintahan, wiraswasta dan tenaga pendidik. Tapi kader muda yang menulis masih bisa dihitung jari. Sahabat Ahmad Hifni adalah kader terbaik PMII yang lahir dari PMII Komfaka yaitu komisariat tertua di Ciputat. Membaca buku ini mengingatkan saya pada sosok Mahbub muda.”

Muhammad Nur Azami., *Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora*

“Buku ini penting sebagai tambahan bagi tafsir-tafsir ideologi dan gerakan PMII. Dengan membacanya kita mendapat dua hal sekaligus. *Pertama* interpretasi ideologi-gerakan PMII. *Kedua* inspirasi agar aktifis harus menulis.”

Rafsanjani., *Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat*

If you are not part of the solution, you are part of problem

“Menjadi Kader PMII adalah menjadi problem solver, bisa melepaskan dari masalah dan beban yang memasung, membelenggu fisik dan pikiran negara bangsa, sebagaimana misi mulia para Nabi sepanjang sejarah peradaban. Buku karya Sahabat Ahmad Hifni ini menjadi solusi, putera bangsa yang hebat berikhtiar dan beramal ilmiah. Ilmu dan baktinya diberikan, khidmatnya untuk rakyat dan ilahi. Buku ini layak menjadi pegangan seluruh kader PMII se-Indonesia, sebuah negeri yang dijarah gangster dan kapitalis hingga detik ini. Dalam pergerakan, akan engkau temukan berkah. Selamat Sahabat.”

Dinno Munfaizin Imamah., *Intelektual Muda NU & Penulis Buku Siasat NU Era Penjajahan Jepang*

Menjadi Kader PMII

Penulis :
Ahmad Hifni

ISBN : 978 -979-19944-1-5

Editor
Ikhwan Nur Rahman

Desain Cover dan Tata letak
Damas & Yahya Baidlowi

Penerbit :
Moderate Muslim Society (MMS)

Redaksi
Komplek Harapan Permai Indonesia (HARPERINDO)
Blok A2 No.3 kampung Utan Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang
15412 Telp/Fax 021-7495970 Email: mms@moderatemuslim.net

Cetakan pertama: April 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Oleh: Zuhairi Misrawi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mempunyai sumbangsih yang besar di negeri ini. Organisasi kemahasiswaan ini telah berhasil melahirkan pemimpin dan pemikir yang turut mewarnai perjalanan negeri ini.

Tidak bisa dimungkiri, bahwa jasa terbesar PMII kepada negeri ini, yaitu memperkokoh wawasan dan solidaritas kebangsaan, serta memperkuat moderasi Islam. Setiap kader PMII, sejak awal dikenalkan dengan paradigma *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sebagai modal dasar untuk mengukuhkan pandangan Islam moderat.

Saya secara pribadi merasa beruntung menjadi bagian dari keluarga besar PMII. Sebagai salah satu kader PMII, saya tidak mengalami bipolaritas antara keindonesiaan dan keislaman. Kedua identitas tersebut bisa melebur dan saling menyempurnakan.

Menjadi warga Negara Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, karena saya lahir di negeri ini. Sementara menjadi Muslim merupakan sebuah pergulatan relijius yang sangat kental dengan entitas kultural, khususnya di lingkungan pesantren. Karena saya lahir di Sumenep, Madura, maka orang-orang sudah hampir pasti mengenal saya sebagai kader Nahdlatul Ulama.

Nah, kader-kader PMII pada umumnya adalah mereka yang mempunyai latar belakang dari kalangan pesantren, khususnya Nahdlatul Ulama. Mereka tumbuh sebagai aktivis yang menginternalisasikan antara keindonesiaan dan keislaman dalam

nafas pergerakan yang biasanya identik dengan membela hak-hak kaum tertindas.

Buku saudara Ahmad Hifni, Menjadi Kader PMII, menjadi salah satu buku yang sangat menarik dan penting untuk dibaca oleh seluruh kader PMII agar setiap kader mempunyai pijakan pemikiran dan ideologi yang kuat. Saya berpandangan PMII masih sangat relevan kehadirannya dalam konteks keindonesiaan, bahkan global.

PMII memberikan sumbangsih yang sangat besar agar kaum muda menjadi nasionalis yang relijius. Buku ini akan mengingatkan para kader perihal tanggungjawab moral dan intelektual yang harus dipegang kuat oleh setiap kader PMII.

Saya mengucapkan selamat kepada Ahmad Hifni, terus berkarya dan menulis untuk memberikan pencerahan publik. Buku ini sangat penting dibaca oleh kader-kader PMII. Kepada kader-kader PMII, saya berpesan agar tidak pernah lelah untuk mengasah intelektualitas dan pengalaman transformasi sosial. Dialektika antara dunia intelektualisme dan aktivisme adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi dalam perjalanan sejarah, PMII dikenal melahirkan intelektual yang aktivis atau aktivis yang intelektual.

Zuhairi Misrawi
Intelektual Muda NU;
Penggagas Lingkar Muda Indonesia

PENGANTAR PENULIS

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sebagaian besar anggotanya merupakan pemuda Nahdliyin sudah memiliki usia yang tak lagi muda. Sejak pertama kali berdirinya 17 April 1960, PMII ikut berperan dalam sejarah kehidupan politik, sosial, budaya dan pendidikan di Indonesia. Sebagai komunitas mahasiswa, PMII menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan mahasiswa yang mampu memberikan andil baik pemikiran maupun gerakan dalam pembangunan nasional.

Di awal terbentuknya, PMII berhasil memainkan peran yang sangat penting di kalangan mahasiswa. PMII mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Hal ini terbukti di usianya yang baru beranjak satu tahun, PMII sudah menjadi anggota forum pemuda sedunia di Moskow (*Contituente Metting for the Youth Forum*). Pada tahun-tahun selanjutnya PMII memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), berpartisipasi dalam pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), bergabung dengan kelompok Cipayung serta berbagai gerakan-gerakan berpengaruh lainnya.

Pada wilayah pengembangan intelektual, PMII sebagai ormas mahasiswa yang berbasis kultural pesantren mampu membangun dan mewujudkan perangkat basis intelektual yang kuat. Para warga PMII mencurahkan perhatian keilmuannya pada tema-tema pokok sekitar liberasi, civil society, pluralisme dan literatur-literatur epistemologi filasafat modern. Baik teori wacana open societynya

Karl Popper, sosialismenya Karl Marx, masyarakat komunikatifnya Habermas dan pemikiran filosof lainnya dijadikan sebagai acuan diskusi di dalam forum-forum PMII.

Di bidang keislaman, PMII tidak menjadikan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Rida, Yusuf al-Qordlowi sebagai landasan studi keagamaan, apalagi kitab-kitab salafi yang dijadikan tradisi keilmuan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Akan tetapi, PMII menjadikan pemikiran-pemikiran liberasi penuh pembebasan seperti Muhammad Arkoun, al-Jabiri, Muhammad Thoha, dan Samir Amin sebagai acuan disukusi keislaman dengan tidak meninggalkan tradisi keilmuan pesantren yang menekankan aspek fikih dan tasawwuf.

Begitu juga dalam kebangsaan. PMII senantiasa berkomitmen untuk menjadi komunitas yang nasionalis. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, PMII menjadi elemen penting dalam mengemban tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Kecintaannya terhadap negara Indonesia membuat PMII tak ragu untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, dan bukan Islam. Sehingga PMII tidak pernah memaksakan panji dan simbol keislaman pada wilayah kebangsaan dan struktur kekuasaan negara.

Pada selanjutnya, PMII akan tetap setia mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia, baik dalam sektor politik, budaya, agama maupun pendidikan. PMII akan tetap menjadi gerakan pemuda Nahdliyin yang mengemban misi intelektual dan berkewajiban serta bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan

keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Buku ini hadir di tengah-tengah pembaca sebagai sebuah ikhtiar saya untuk mendokumentasikan berbagai refleksi, gagasan dan pemikiran tentang ke-PMII-an. Fokus buku ini diarahkan pada perkembangan kondisi zaman mutakhir yang pada gilirannya diejawantahkan ke dalam sikap dan langkah yang harus diambil kader PMII untuk menjawab dan merespon isu-isu kontemporer, baik dalam ranah keagamaan, politik kebangsaan, dan sosial masyarakat. Di samping itu, buku ini juga membicarakan aspek historis dinamika perjalanan PMII semenjak kelahirannya sampai eksistensi keberadaannya di era ini.

Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama membahas PMII dalam dinamika sosio-historis, baik dalam ranah gerakan, intelektual dan kedinamisan organisasi. Bab kedua membahas perihal keislaman, terutama mengenai *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai landasan teologis dan manhaj al-fikr PMII. Bab ini juga membahas bagaimana PMII menyikapi persoalan Sunni dan Syiah, terorisme, radikalisme, fundamentalisme serta isu-isu keagamaan yang berkembang mutakhir.

Bab ketiga membahas tentang komitmen kebangsaan PMII yang tercermin pada pilihannya untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Bab ini akan menjelaskan jiwa nasionalisme PMII terutama pada rumusan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah

bangsa. Bab keempat membahas tentang PMII dan keilmuan serta bagaimana seharusnya warga PMII sebagai intelektual yang pernah mengenyam pendidikan pesantren dalam mengejewantahkan keilmuannya pada ruang akademis kampus.

Bab kelima membahas tentang filosofi gerakan PMII dalam membaca dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembang mutakhir. Bab ini akan membicarakan peran PMII di kalangan mahasiswa Indonesia, rumusan baru paradigma PMII, komitmen untuk menjadi organisasi yang tetap independen, liberasi pengkaderan, strategi pengembangan PMII di kampus, gerakan di media sosial serta merefleksikan kepemimpinan para kader PMII.

Buku ini ditulis kurang lebih selama dua bulan lamanya, tepatnya sejak 17 Februari 2016 sampai pertengah April 2016. Inisiatif untuk menulis buku ini berawal dari diskusi-diskusi kecil bersama teman-teman aktifis Ciputat baik di kedai-kedai kopi, kampus maupun di forum-forum kajian akademis. Mereka banyak memberi inspirasi bagi saya dengan berbagai gagasan, refleksi dan masukan. Tekad dan komitmen mereka terhadap keilmuan memberi saya semangat untuk menulis buku ini.

Pada 17 April 2016 ini, PMII memasuki usianya yang ke 56. Dalam usianya yang tidak lagi muda ini, saya persembahkan buku ini khususnya untuk PMII, dan umumnya untuk khalayak umum yang ingin mengetahui dan memahami tentang PMII. Hal ini saya rasa penting, mengingat masih minim buku-buku tentang ke-PMII-an yang mewarnai literatur khazanah keilmuan Indonesia. Padahal PMII

sebagai salah satu kekuatan gerakan mahasiswa Indonesia, apalagi sebagian besar anggotanya merupakan warga Nahdliyin yang sejak dulu menjadi komunitas masyarakat muslim yang terbuka, toleran dan ramah terhadap perbedaan, sejatinya harus dikenal dan dijadikan inspirasi bagi mahasiswa dan khalayak umum.

PMII hadir sebagai gerakan mahasiswa idealis yang tidak didirikan hanya untuk bertahan selama sepuluh atau dua puluh tahun semata, tetapi PMII didirikan untuk melakukan perubahan tata struktur dan sistem yang buruk, mempertahankan tradisi lokal budaya masyarakat Indonesia yang baik dan mengambil langkah yang lebih baik dari berbagai kemajuan di berbagai sektor yang berkembang mutakhir. Oleh karena itu, diusianya yang ke-56 ini PMII tetap hadir untuk menjadi tembok dari berbagai ancaman yang mengancam bangsa Indonesia menjadi lemah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagaimanapun juga buku ini hadir berkat dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya haturkan terima kasih kepada mas Zuhairi Misrawi yang selalu mendorong dan memotivasi saya untuk selalu menulis. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman aktivis Madrasah Qohwah (Ciputat Cultural Studies), Cak Syahrul Munir, Bang Hasyim Asy'ari, Junaidi Denay, Muzanni, Ridwan Hutagalung, Azwin Ramdhani, Fahmi Safuddin, dan lain-lain yang tak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu setia berdiskusi rutin tiap minggu tentang banyak hal, terutama dalam bidang budaya.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman aktivis Moderate Muslim Society (MMS), Ulil Absor, Ari Rahman, Septa Nuril Fahmi, Hilda, Ulfah, Wahid, Khusnul, Rahmi dan teman-teman yang lain, yang tak kenal lelah dan sangat gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang ramah, terbuka, toleran sehingga menjadi rahmat untuk semesta alam. Begitu juga kepada mas Dinno Brasco saya ucapkan terima kasih atas segala motivasi dan inspirasinya dalam hal keteladanan di dunia akademis.

Ucapan terima kasih saya haturkan juga kepada para aktivis PMII Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora (Komfaka), baik kepada para senior, para dosen maupun adik-adik yang sedang asyik berorganisasi dan mengembangkan intelektualitasnya dalam organisasi ini, sebuah organisasi di mana saya juga pernah mengolah diri, mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan jiwa intelektual saya melalui pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

Tak lupa ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada teman-teman aktivis PB PMII, PMII Ciputat, HMI Ciputat, IMM Ciputat, serta organisasi primordial lainnya maupun kelompok-kelompok diskusi akademis di Ciputat yang berkenan untuk berdiskusi dan memberi masukan yang berharga kepada saya. Khususnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Syarifaeni Fahdiah selaku Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Ciputat yang senantiasa berkenan meluangkan banyak waktunya untuk berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai problematika sosial di kalangan mahasiswa yang berkembang mutakhir.

Di atas segalanya saya sadar, bahwa buku yang berjudul "Menjadi Kader PMII" ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sebagai sebuah buku yang sederhana, kesalahan maupun kekhilafan susunan bahasa, kalimat, konten, data dan analisis mungkin ditemukan, karena itu kritik, saran dan masukan yang membangun sangat saya harapkan dari para pembaca.

Semoga buku ini bisa melengkapi wacana dan literatur tentang ke-PMII-an serta bisa menjadi spirit bagi mahasiswa untuk menjadi kader PMII di masa kini dan yang akan datang.

Selamat Harlah PMII yang ke-56
Tangan Terkepal dan Maju Kemuka

Ciputat, 17 April 2016
Ahmad Hifni

Bab 1

Latar Historis PMII

PERJALANAN PMII
DALAM DINAMIKA SOSIO-HISTORIS

(Gerakan, Basis Intelektual dan Kedinamisan Organisasi)

PENGANTAR

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang mayoritas anggotanya merupakan muslim berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* atau selaras dengan pemahaman keagamaan NU, mengalami perjalanan yang panjang dalam pembentukannya. Lahirnya PMII tidak berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapinya. Keinginan mendirikan organisasi mahasiswa NU dari berbagai mahasiswa NU di Indonesia sangat kuat, akan tetapi PBNU tidak cepat-cepat memberikan lampu hijau.

Argumentasi dari PBNU adalah belum perlu adanya organisasi mahasiswa NU sebagai wadah dan aspirasi mahasiswa NU di berbagai perguruan tinggi, karena NU sudah memiliki organisasi bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). IPNU dirasa mampu untuk menjadi wadah bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk mahasiswa NU secara umum.

Akan tetapi, kemauan keras dan semangat yang tak mudah redup untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU terus bergelora, bahkan para mahasiswa NU semakin masif mensosialisasikannya ke berbagai kampus di Indonesia. Berkat kegigihan dan semangat yang kuat dari mahasiswa NU ini kemudian PBNU tidak bisa tidak memberikan lampu hijau untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU. Organisasi inilah yang kemudian memiliki nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Mari kita lihat secara komprehensif bagaimana latar sosio-historis perjalanan PMII.

SOSIO-HISTORIS KELAHIRAN PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari 'rahim' Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960 M. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Dari geneologi kelahiran PMII ini saya menyebut PMII sebagai 'cucu' dari NU, karna cikal bakal lahirnya PMII adalah dari IPNU itu sendiri, yang mana IPNU merupakan 'anak kandung' atau organisasi yang lahir dari 'rahim' NU.

Ide lahirnya PMII ini berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di Perguruan Tinggi Islam maupun umum. Hal ini wajar, mengingat realitas politik pada dasawarsa 50-an banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah *underbouw* partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan. Misalkan SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), IMM (dengan Muhammadiyah), dan HMI (dekat dengan Masyumi)[1]. Akan tetapi, karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU, melainkan juga menjadi wadah bagi mahasiswa NU.

Meskipun pada tahun 1955 mahasiswa NU di Jakarta sempat mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU) dan di Surakarta berdiri Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), namun organisasi ini tak berdiri lama, karna PBNU tidak cepat-cepat memberikan restu. Bisa dipahami, saat itu IPNU baru saja lahir pada tahun 1954, sementara pengurus IPNU juga banyak yang berstatus mahasiswa. Bisa dibayangkan Jika mendirikan organisasi mahasiswa NU baru akan susah untuk mengelola dan mengurus kedua organisasi yang berada di bawah naungan NU, maka dari ini dikhawatirkan IPNU tidak ada yang mengurusi.

[1] Modul Mapaba PMII Ciputat, Maret (2012), Ciputat: PMII Cabang Ciputat, Hlm.5

Semangat untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah mahasiswa NU terus berlanjut di muktamar II IPNU pada 1957 di Pekalongan. Namun, lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang serius, dengan dalih bahwa IPNU yang pada saat itu masih baru terbentuk memerlukan pembenahan dan konsolidasi yang matang. Dalam perjalannya, berkat kegigihan dan perjuangan mahasiswa NU ini memperoleh solusi pada muktamar III IPNU pada 27-31 Desember 1958 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi[2]. Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang akhirnya menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU.

Sayangnya, Departemen Perguruan Tinggi IPNU ternyata tidak bisa meredam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri, karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Hal ini karena beberapa alasan, *pertama,* kondisi obyektif menunjukkan bahwa keinginan, dinamika dan gerakan mahasiswa berbeda dengan keinginan para pelajar. *Kedua,* dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU, mahasiswa NU tidak bisa masuk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebab PPMI hanya bisa menampung ormas mahasiswa[3].

Ketiga, kondisi sosial-politik bangsa Indonesia mendesak agar NU mempunyai organisasi mahasiswa sebagai wadah

---

[2]Sejarah Singkat IPNU-IPPNU, *Buku kenang-kenangan Makesta IPNU-IPPNU Kodya Surakarta,* (1970), hlm.11

[3]Lihat: Sejarah Singkat IPNU-IPPNU, *Buku kenang-kenangan Makesta IPNU-IPPNU Kodya Surakarta,* (1970), hlm.2 organisasi yang menghimpun kepemudaan ketika itu bukan hanya Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), ada juga Kongres Nasional Indonesia Muda (KNIM), dan Front Nasional Pemuda (FNP). Di dalam organisasi tersebut menghimpun organisasi-organisasi mahasiswa seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan lain-lain.

pengkaderan intelektual maupun kepemimpinan NU. Hal ini tak lain karena NU pada konteks itu adalah sebagai pemenang ketiga dalam pemilu 1955, pada saat sama, satu-satunya wadah mahasiswa Islam hanyalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI sendiri terlalu dekat dengan masyumi yang secara politik sudah berseberangan dengan NU. Ditambah lagi Masyumi yang bermasalah dan terlibat dalam pemberontakan PRRI[4].

Perjuangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa di bawah naungan NU mencapai puncaknya ketika IPNU mengadakan Konferensi Besar (Konbes) pada 14-17 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta. Isma'il Makky (Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU) dan Moh. Hartono, BA (Mantan wakil pemimpin usaha harian Pelita Jakarta) menjadi wakil mahasiswa yang berbicara di depan peserta Konbes, yang kemudian mereka pertegas keinginan mahasiswa untuk mendirikan organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa NU. Kesimpulan dari konbes tersebut menghasilkan keputusan perlunya mendirikan suatu organisasi mahasiswa NU.

Langkah selanjutnya adalah membentuk panitia sponsor pendiri organisasi yang beranggotakan 13 orang. Tugas dari tim 13 ini adalah melakukan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia yang akan bertempat di Surabaya dengan limit satu bulan setelah keputusan Kaliurang. Ketiga belas orang tim tersebut adalah Cholid Mawardi (Jakarta), Said Budairy (Jakarta), M. Sobich Ubaid (Jakarta),

---

[4] PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di tengah-tengah pergolakan politik, ketidakstabilan pemerintahan, masalah korupsi, perdebatan-perdebatan dalam konstituante, serta pertentangan dalam masyarakat mengenai konsepsi Presiden.

M. Makmun Syukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismai'il Makky (Yogyakarta), Munsif Nahrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidy HA (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Abd. Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Cholid Narbuko (Malang) dan Ahmad Husain (Makasar).

Sebelum musyawarah dilaksanakan, tim panitia yang diwakili oleh tiga orang, yakni Hisbullah Huda, M. Said Budairy dan Makmun Sukri BA menghadap kepada Ketua Umum PBNU, KH. Dr. Idham Khalid untuk meminta do'a restu dan persetujuan ihwal pembentukan organisasi mahasiswa NU tersebut. Dalam nasehatnya, KH. Idham Khalid menyarankan agar organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dengan argumen ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa harus diamalkan bagi kepentingan rakyat. Bukan ilmu untuk ilmu. Setelah memberi nasehat, Ketua Umum PBNU merestui dilaksanakannya musyawarah mahasiswa tersebut[5].

Selanjutnya, pada 14-16 April 1960 diselenggarakan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia bertempat di sekolah Mu'alimat NU Wonokromo Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan konbes IPNU di Kaliurang sebulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk. Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusukan oleh peserta musyawarah antara lain :

---

[5] Muh. Hanif Dakhiri dan Zaini Rachman, *Post Tradisionalisme Islam: Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII*, (2000) Jakarta: ISISINDO MEDIATAMA, hlm. 17

1. Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU), diusulkan oleh delegasi dari Jakarta
2. Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi dari Yogyakarta
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya dan Surakarta.

Dari ketiga usulan tersebut akhirnya yang disetujui adalah nama PMII. Dalam hal ini peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi kader partai NU, akan tetapi semua menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat agar organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia" dengan rumusan pemikiran sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada saat itu situasi politik nasional diliputi oleh semangat revolusi.
2. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengakulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan mana yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif.

3. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, oleh karena itu nama Indonesia harus tetap tercantum[6].

Dari hasil keputusan perihal penamaan PMII ini, setidaknya ada empat hal yang menarik untuk dibahas. *Pertama,* istilah "Pergerakan", pada mulanya huruf "P" dalam PMII mempunyai tiga alternatif kepanjangan, yaitu pergerakan, perhimpunan, dan persatuan. Akhirnya yang dipilih adalah pergerakan *(Movement/al-harakah)* dengan argumentasi sifat mahasiswa yang selalu dinamis dan aktif, perubahan, mempunyai sifat bergerak secara aktif.

Kedua, mahasiswa. PMII mengartikan mahasiswa sebagai generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun kader bangsa dan negara. Mahasiswa diangankan memuat kandungan-kandungan, nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen dan konsistensi.

Ketiga, Islam. Islam yang dipahami PMII merupakan Islam ala *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai corak basis keagamaan yang ditempuh selama menimba ilmu-ilmu agama di pesantren. Di samping itu, corak keberislaman ini selaras dengan apa yang

---

[6] Otong Abdurrahman, *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam perspektif sejarah bangsa (1960-1985)*, skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm.26

dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap pemikiran dan sikapnya. Sebuah pemahaman Islam yang mengakulturasi budaya masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran keislaman.

Keempat, nasionalisme dan nama Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan nama Indonesia sebagaimana terdapat dalam prinsip pemikiran poin ketiga, menunjukkan bahwa sejak awal kelahirannya, PMII sudah memberi komitmen yang kuat bagi rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan Indonesia ini juga sebagai sikap terhadap organisasi mahasiswa Islam yang lebih dulu ada yakni HMI yang tidak menegaskan nama Indonesia di dalamnya.

Musyawarah mahasiswa NU itu juga memutuskan tiga orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Mereka antara lain adalah Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, A. Chalid Mawardi sebagai ketua satu dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Di samping itu forum berhasil menetapkan peraturan dasar PMII yang berlaku mulai 17 April 1960. Selanjutnya tanggal inilah yang dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII secara resmi.

Dari sini sudah jelas bahwa ide dasar pendirian PMII murni berawal dari inisiatif pemuda NU. Pilihan untuk bernaung di bawah panji NU bukanlah sekedar pertimbangan praktis, bukan pula karena kondisi saat itu dependen atau menjadi organisasi *underbouw* merupakan kemutlakan, tetapi jauh dari itu keterikatan PMII-NU telah terbentuk dan sengaja dibangun atas dasar kesamaan nilai, kultur, akidah, pola pikir, bertindak, berperilaku dan cita-cita yang

sama. Meskipun pada selanjutnya PMII harus memilih independen sebagai sebuah prinsip kedewasaan dan kedinamisan organisasi, akan tetapi tidak serta merta bisa dipisahkan dengan NU, hal ini karena kesamaan visi dan cita-cita sebagaimana disebut. Adapun perihal independensi PMII ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

BERPENGARUH DI "USIA MUDA"

Organisasi mahasiswa yang baru terbentuk ini mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Dalam usianya yang tergolong muda, PMII telah aktif terlibat dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan baik di kancah nasional maupun internasioanal. Hal ini bisa dibuktikan dengan masifnya gerakan-gerakan PMII, seperti Said Budairi selaku Sekretaris Umum (PMII) pada September 1960 mewakili PMII dalam konferensi pembentukan panitia internasional forum pemuda sedunia di Moskow (*Contituente Metting for the Youth Forum*). Sepulang dari Moskow, ia singgah di Mesir untuk konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri.

Begitu juga dengan Chalid Mawardi selaku Ketua I PB PMII yang pada Juni 1961 berangkat ke Moskow mengahadiri forum pemuda sedunia. Hal ini membuktikan bahwa PMII bukanlah organisasi sempalan dari organisasi mahasiswa yang terlebih dahulu ada, tetapi merupakan proses lanjut dari gerakan mahasiswa Nahdliyin yang mana sebelumnya tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU.

Tidak hanya itu, gerakan PMII pada sekitar tahun 1966 sangat berpengaruh. Gerakan ini dimainkan oleh PMII yang memimpin gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia. Ketika itu Zamroni sebagai ketua PB PMII dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Sjarief Thajeb. Organisasi yang tergabung dalam KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas.

Zamroni sebagai kader PMII sangat lincah dan sigap memimpin KAMI. Terutama dalam memimpin demonstrasi mahasiswa. Pengorbanan Zamroni sampai pada konsekuensi nyata bahwa sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, harus merelakan jemari tangannya terpotong hingga tersisa dua buah. Ini sekaligus menjadi bukti begitu besarnya pengorbanan Zamroni yang jugaa kader PMII dalam membela dan menggerakkan idealisme mahasiswa.

Tak hanya itu, inspirasi KAMI terhadap gerakan mahasiswa mampu memberi motivasi pada komunitas gerakan mahasiswa baru sebagai lambang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Maka muncullah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Gerakan ini menjadi kebanggaan dan rasa solidaritas yang tinggi dari kalangan organisasi mahasiswa lain. PMII juga telah membuktikan bahwa mampu mengambil andil yang besar dalam menginisiasi sikap mahasiswa. Meminjam Mahbub Junaidi, bahwa

tangan PMII lah yang mengayunkan garis-garis besar dan pokok-pokok statemen pembubaran PKI, apa yang terjadi setelah itu kita semua sudah tahu, likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh masa rakyat yang cinta kepada Pancasila.

Kebijakan serta garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII ketika itu, agar kader PMII harus memimpin KAMI sangat tepat. Bahwa PMII harus ikut dan memimpin KAMI mulai pusat sampai daerah. Kebijakan ini telah dibuktikan dengan cepat dan luas oleh PMII. Zamroni telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik pada KAMI. Itu berarti juga kepemimpinan oleh PMII.

Gerakan lain dari PMII adalah ketika sahabat Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda, sehingga lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), kemudian KNPI berhasil masuk ke dalam GBHN pada sidang umum MPR 1978. Dan sampai hari ini KNPI menjadi organisasi pemuda paling berpengaruh di Indonesia.

Begitu juga pada tahun 1974 PMII bergabung ke dalam kelompok Cipayung. Kelompok yang berkomitmen untuk terus mempertahankan idealisme sebagai organisasi mahasiswa. Di situlah tempat sejumlah organisasi ekstra-universitas dengan berbagai latar sosial, ideologi dan agama mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

Kelompok Cipayung ini terdiri dari berbagai kelompok organisasi mahasiswa, antara lain PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Kehadiran kelompok Cipayung ini sangat berharga bagi

kalangan aktivis mahasiswa. Karna pada saat itu gerakan mahasiswa terus dibatasi ruang geraknya oleh kebijakan pemerintah yang otoriter. Bahkan sampai hari ini, para alumnus kelompok Cipayung bisa kita temukan di sektor-sektor pemerintahan, dosen, LSM, dan pengabdian masyarakat.

Gerakan lain PMII adalah solidaritas. Hal itu tercermin pada pembelaan PMII terhadap HMI yang terancam dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ketika HMI yang dianggap berafiliasi dengan Masyumi mendapatkan cobaan dan terancam dibubarkan, PMII menggerakkan dan memimpin kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa Islam untuk melakukan solidaritas dan pembelaan.

Pembelaan PMII bersama GP Ansor pada 19-26 Desember 1964, menyelenggarakan musyawarah di kalangan pelajar dan mahasiswa Islam. Musyawarah ini menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam. Kemudian melahirkan organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang dikenal dengan nama GEMUIS (Generasi Muda Islam).[7]

Salah satu hasil musyawarah itu adalah usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI yang sedang mengalami

[7] inisiatif PMII untuk menyelamatkan HMI agar tidak dibubarkan tidak hanya berhenti pada sikapnya menyelenggarakan musyawarah pelajar muda Islam, tetapi juga melalui KH. Saifuddin Zuhri (Tokoh NU) yang ketika itu sebagai Menteri Agama mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya jika Bung Karno tetap membubarkan HMI. Berikut perdebatan sengit Bung Karno dan KH. Saifuddin Zuhri : *"kalau bapak (Bung Karno) tetap hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan gawetan Bapak, maka tugas saya sebagai pembantu Bapak hanya sampai di sini"* lalu bung karno menanggapi *"Baiklah, HMI tidak saya bubarkan. Tetapi saya minta jaminan HMI akan menjadi organisasi yang progresif."* Lihat: Sulastomo (2008),*Hari-hari yang panjang transisi Orde lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar,* Jakarta: Buku Kompas, Hlm.68

cobaan berat. Dari sinilah GEMUIS menghasilkan dua keputusan penting tentang usaha pembelaan terhadap HMI dengan pernyataan; *pertama*, HMI bukanlah *underbow* dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai atau organisasi manapun. *Kedua*, masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.

INDEPENDENSI PMII

Perjalanan PMII berikutnya menuntut pada kondisi sosial yang sangat dinamis. Kepekaan dan kepandaian membaca konteks sosial politik Orde Baru, membuat PMII sibuk untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam membangun gerakannya. PMII sangat peka pasca Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai Presiden RI sekaligus penguasa Orde Baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang sangat signifikan. Pemerintahan Orde Baru berhasrat untuk mengurangi kekuatan partai-partai yang berbau ideologi dengan cara mendirikan partai tersendiri sebagai kekuatan penopang bagi kekuasaannya, yakni Golongan Karya (Golkar).

Rezim Orde Baru juga melakukan penyederhanaan Partai. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokan *(regrouping)* dari sepuluh kontestan pemilu menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari (PKI, PNI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik). Kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang diwakili oleh Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang diwakili oleh Partai Golkar (Golkar). Dari ketiga partai tersebut, Golkar identik dengan partai penguasa, lewat Golkarlah upaya politik Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Sementara partai-partai lain hanyalah figuran demokrasi yang juga dikendalikan oleh Soeharto.

Kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut membuat sebuah kekuasaan yang tidak bisa dijamah apalagi dikritisi oleh masyarakat. Bentuk hegemoni pemerintah ini mengakibatkan masyarakat umum dan mahasiswa memiliki ruang gerak yang sempit untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah. Keadaan ini tidak membuat sikap kritis warga PMII berkurang. Terhadap hal ini PMII mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan mahasiswa beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis dan analitis dalam menghadapi persolalan masyarakat dan secara tajam memiliki kepekaan dalam melihat dimensi di belakang munculnya realitas di masyarakat seperti nilai, kepentingan dan kekuasaan.
2. Mahasiswa perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya, yakni kesadaran tentang siapakah yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan Orde Baru.
3. Kekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh para aktivis yang mana dulu memimpikan hasil yang sukses dan konkret di dalam memperjuangkan TRITURA, tapi kenyataannya

hasil perjuangan itu semakin lama semakin menipis di bawah kekuasaan Orde Baru.

Keadaan tersebut mengharuskan PMII untuk peka dan pandai membaca realita politik yang mengerdilkan setiap komponen masyarakat termasuk partai politik selain Golkar. Dari hasil pembacaan itu, PMII berpandangan bahwa jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Atas dasar pertimbangan ini diadakanlah Musyawarah Besar (Mubes) pada 14 Juli 1972 di Munarjati, Malang. Dari Mubes tersebut, PMII memutuskan untuk independen yang tertuang dalam Deklarasi Munarjati[8]. Independensi berarti sikap kemandirian, mandiri dalam gerak pemikiran maupun dalam gerak operasional organisasi. Dengan independensi ini berarti PMII sudah tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila. Berikut ini isi Deklarasi Munarjati :

DEKLARASI MUNARJATI

Bismillahirrahmanirrahim

"*Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar*".

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera sekaligus penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia

[8] Lihat Deklarasi Munarjati, Pengurus Besar PMII (1980), *Dokumen Historis PMII*, Jakarta: PB PMII, Hlm.40

dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa Deklarasi Tawangmangu menurut perkembangannya merupakan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai Organisasi "Independen" yang tidak terkait tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila.

Tim Perumus Deklarasi Munarjati

1. Umar Basalim (Jakarta)
2. Madjidi Syah (Bandung)
3. Slamet Efendi Yusuf (Yogyakarta)
4. Man Muhammad Iskandar (Bandung)
5. Choirunnisa Yafzham (Medan)
6. Tatik Farichah (Surabaya)
7. Rahman Idrus
8. Muis Kabri (Malang)

Musyawarah Besar PMII Ke-2 Munarjati Malang Jawa Timur tanggal 14 Juli 1972

Banyak asumsi-asumsi dari berbagai kalangan ihwal independensi PMII ini, dimulai dari aspek politis, idealis dan filosofis. Intinya ada tiga poin asumsi perihal motivasi PMII mengambil sikap independen yang bisa dirumuskan ke dalam beberapa argumentasi berikut. *Pertama*, adalah kedewasaan. Melihat realita politik saat itu, PMII dituntut untuk dewasa, mempertahankan idealisme dan moral mahasiswa agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Jika

tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Kedua, suatu sikap dari manifestasi rasa kejengkelan PMII terhadap NU karna kader-kader PMII yang berkualifikasi bagus tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk di legislatif maupun eksekutif. Padahal, NU yang ketika itu sebagai partai politik seharusnya memperhatikan keluhan PMII. Singkatnya, independensi hanya persolan pembagian kursi.

Ketiga, adalah sebuah taktik. Kondisi politik pasca Orde lama sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Sudah banyak bukti penyokong Orde Baru dibalik menjadi 'buronan politik', maka independensi merupakan jalan satu-satunya untuk mencari selamat. Jika benar NU dibubarkan berbarengan dengan sistem penyederhanaan partai, PMII masih tetap hidup. Sebab, bukan lagi bagian dari NU. Singkatnya ini berarti independensi bermotif politik.

Dari ketiga asumsi tersebut, motivasi pada poin kedua dan ketiga itu jelas kurang pas jika dihadapkan pada hakekat PMII sebagai organisasi mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme mahasiswa. Karena itu, motif pertama sebagai proses pendewasaan yang kemudian membawa PMII dan NU pada persamaan ideologi, kultur, tradisi, akidah, dan nilai-nilai yang kemudian Chalid Mawardi menyebutnya dengan istilah Interdependensi adalah alasan yang paling rasional. Berikut ini manifestasi independensi PMII :

MANIFEST INDEPENDEN PMII

Bismillahirrahmanirrahim

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera, selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bahwa Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu ke sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa. Bahwa pada hakekatnya "independensi" sebagaimana telah dideklarasikan di MUNARJATI adalah merupakan manifestasi keadaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Bahwa "independensi" Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam mendinamiskan dan mengembangkan potensi kultural yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam untuk terbentuknya pribadi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggungjawab dalam perjuangan nasional berdasarkan Pancasila. Bahwa dengan "independensi" Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam dan berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah.*

Kongres V PMII
Ciloto Jawa Barat Tanggal 28 Desember 1973

Keputusan independen PMII ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan, terutama dari kalangan kader NU sendiri. Respon para Kyai, dan tokoh NU bermacam-macam dengan berbagai argumentasi masing-masing. Ada yang pro ada yang kontra. Yang pro misalkan

seperti Said Budairy yang beranggapan bahwa independensi PMII harus dimaklumi, sebab dengan keadaan politik saat itu PMII ingin tetap eksis dan berkiprah di dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, karena lepas dari organisasi induknya. Yang kontra misalkan, Chalid Mawardi melihat NU dalam perspektif sebagai kekuatan politik. Dengan memisahnya PMII dari NU berarti pengkaderan dalam tubuh NU akan terputus. Padahal NU membutuhkan kader-kader politik di masa depan. Reaksi lain juga muncul dari para Kyai, bahwa dengan memisahnya PMII dan NU, maka NU tidak lagi bisa mengontrol PMII. Sehingga nantinya dikhawatirkan di PMII akan berkumpul antara putra dan putri, padahal tradisi pesantren selalu memisahkan antara putra dan putri.

INTERDEPENDENSI PMII-NU

Kurang lebih 12 tahun lamanya PMII menjadi *underbouw* NU, berkhidmat dalam politik praktis hingga sampai pada akhirnya menyatakan independen. Akan tetapi, antara PMII dan NU memiliki persamaan-persamaan dalam paham keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan serta ikatan historis. Di samping itu antara PMII dan NU juga memiliki keterkaitan atas dasar kesamaan nilai, cita-cita, kultur, tradisi, ideologi maupun akidah. Poinnya, bahwa sikap PMII untuk independen ternyata tidak sepenuhnya memisahkan ormas mahasiswa ini dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Independensi ditafsirkan sebagai interdependensi sebagaimana istilah yang ditawarkan Chalid Mawardi[9].

[9] Pengurus Besar PMII (1980), *Dokumen Historis PMII*, Jakarta: PB PMII, Hlm.XIII

Interdependensi PMII-NU merupakan suatu sikap yang tidak saling mengintervensi secara struktural dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Suatu sikap ini menjadi unik bagi PMII, karna bisa jadi merupakan satu-satunya ormas mahasiswa yang mempunyai istilah Interdependen.

Oleh karena itu, untuk melahirkan keraguan dan saling curiga maka hubungan itu harus dijalin kembali. Bukan hubungan hierarki struktural, melainkan hubungan kesamaan tujuan dan cita-cita dengan mengedepankan kedaulatan organisasi penuh. Deklarasi interdependensi PMII-NU kemudian dicetuskan dalam Kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.[10] Berikut ini Deklarasi Interdependensi PMII-NU :

DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui Deklarasi Munarjati tahun 1972.
2. Kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dibungkus pemahaman Islam ala *Ahlussunah wal Jama'ah*.
3. PMII insaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong menolong "*ta'awanu 'ala-l-birri wattaqwa*", ukhuwah Islamiyah (*Izzul Islam wal muslimin*) serta harus mencerminkan "*mabadi khoiru ummah*" (prinsip-prinsip umat yang baik), karena itulah PMII siap melakukan kerjasama.
4. PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangannya adalah sangat banyak dan bervariasi sesuai dengan nuansa usia, zaman, dan bidang garapannya.

---

[10] Dokumen Historis PMII-Keputusan Kongres X PMII di Jakarta. Lihat : Fauzan Alfas, *PMII Dalam Simpul-Simpul An-Nahdliyah.* (Surabaya: Kalista, 2007)

Karena antara PMII dan NU mempunyai persamaan-persamaan di dalam persepsi keagamaan dari perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan keragu-raguan, ketidakmenentuan serta rasa saling curiga, dan sebaliknya untuk menjalin kerja sama program secara kualitatif dan fungsional, baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip kedaulatan organisasi penuh, INTERDEPENDENSI, dan tidak ada intervensi secara struktural-kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Indonesia.

Kongres X PB PMII
Pondok Gede Jakarta, Tanggal 27 Oktober 1991

Untuk mempertegas Deklarasi Interdependensi PMII-NU ini, maka PMII melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan, Jawa Barat, merumuskan implementasi interdependensi PMII-NU. Pemikiran tersebut atas dasar sebagai berikut. *Pertama*, bahwa dalam pandangan PMII ulama sebagai pewaris para Nabi merupakan panutan karena kedalaman ilmu keagamaannya. Interdependensi ditempatkan pada konteks keteladanan ulama dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, adanya ikatan historis yang mempertemukan PMII dan NU. Fakta sejarah menyatakan bahwa cikal bakal kelahiran PMII dan perkembangannya tidak lepas dari peran NU, demikian juga latar belakang sebagian besar warga PMII merupakan warga NU, sehingga memengaruhi cara pikir dan bertindak warga PMII. Adapun pilihan independen PMII tidak dipahami sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus makna kesejarahan PMII-NU.

Ketiga, adanya persamaan paham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu paham wawasan keislaman *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Implementasi paham Aswaja tersebut tampak juga antar keduanya pada persamaan sikap sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip *tawasut, i'tidal, tasamuh dan tawazun*. Demikian juga pola pikir dan sikap selektif, akomodatif, integratif sesuai prinsip *Al-Muhafadzatu ala-l-Qadimi-l-shalih wa-l-Ahdu bi-l-Jadidi-l-Ashlah.*

Keempat, adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap orang muslim Indonesia. Atas dasar tersebut, maka merupakan keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan baik secara individu maupun kelompok.

Kelima, adanya kesamaan kelompok sasaran. PMII dan NU memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Di samping itu, berangkat dari kalangan pedesaan dan basis pendidikan pesantren. Kesamaan lahan perjuangan ini kemudian melahirkan format perjuangan yang relatif sama.

BASIS INTELEKTUAL

PMII sebagai ormas mahasiswa yang berbasis kultural pesantren ternyata tidak hanya mengembangkan pemikirannya pada basis keagamaan semata, akan tetapi PMII mampu membangun dan mewujudkan perangkat basis intelektual di kalangan mahasiswa.

Para aktivis PMII berupaya terus menempa diri dan mengasah kepekaan intelektualitasnya.

PMII mencurahkan perhatiannya pada diskursus-diskursus penting sekitar liberasi, toleransi, demokrasi, pluralisme, civil society, dan membongkar terhadap ideologi dan doktrin teologi yang membuat masyarakat bisu untuk meminta hak hidup dan berfikir. Maka tak heran jika dalam kajian-kajian ilmiah PMII seringkali ditemukan term-term perihal pemikian wacana Open Society-nya Karl Popper, sosialismenya Karl Marx, masyarakat komunikatifnya Habermas dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini sering dijadikan sebagai acuan diskusi di forum-forum PMII.

Di bidang keislaman, PMII sangat gelisah dengan kelompok Islam yang memakasakan panji dan simbol keislaman pada wilayah kebangsaan dan kekuasaan negara. Mereka kalangan Islamis yang menjadikan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Yusuf al-Qordlowi sebagai landasan utama keagamaan, diimbangi dengan pemikiran-pemikiran liberasi penuh pembebasan Muhammad Arkoun, al-Jabiri, Muhammad Thoha, dan Samir Amin.

Dengan landasan intelektual itu, maka tak heran jika pada tahun 1990-an PMII mampu melahirkan Lembaga Kajian Islam dan Intelektual (LKiS). Pada awalnya kelompok ini secara intensif menjadikan dirinya sebagai tempat menempa diri dan mengasah kepekaan sosial dan intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya LKiS mampu menjadi arus utama gerakan intelektual generasi muda

NU melalui program-program kajian, penelitian, penerbitan serta pendidikan.

Dari semua proses intelektualitas PMII itu, maka dapat dijelaskan itulah mengapa mereka banyak berkiprah di dunia pendidikan, pesantren, universitas, LSM, pers, penerbitan, advokasi, gerakan sosial dan keagamaan. PMII membuktikan bahwa ia adalah sentral dan simpul jaringan intelektual di internal kalangan intelektual muda Islam Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa PMII sangat sadar bahwa setiap gerakan organisasi harus dilandasi dengan modal intelektual yang kemudian akan melahirkan pengembangan dan pengabdian masyarakat yang konkrit.

KESIMPULAN

Perjalan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia bernama PMII telah mencapai pada konsekuensi logis yakni kedinamisan. Untuk menjawab kedinamisan ruang gerak dan pemikiranya, PMII harus melihat sejarah perjalannya. Tanpa melihat realita ruang gerak PMII di masa lalu, rasanya sangat sulit untuk membangun sebuah cara pandang yang baru untuk menjawab tantangan zaman. Maka oleh karena itu, menjadi tantangan bagi kader-kader PMII di masa sekarang untuk membaca dan mengolah gerakan baru yang relevan dengan konteks sosial masyarakat yang berkembang. Dengan begitu, PMII akan tetap mampu untuk menempa diri dengan pemikiran-pemikiran dan gerakan yang lebih mempunyai etos transformatif dan profesionalisme dalam berbagai sektor, serta mematangkan dirinya lewat gerakan-gerakan LSM,

media, politik, pendidikan dan sektor-sektor lainnya bersama kelompok-kelompok mahasiswa lain.

Bab 2

PMII dan Keislaman

ASWAJA SEBAGAI LANDASAN TEOLOGIS DAN MANHAJ AL-FIKR PMII

PMII merupakan komunitas atau organisasi mahasiswa yang berbasis keagamaan di mana sebagaian besar kadernya merupakan mahasiswa Islam. Sebagai organisasi yang mempunyai hubungan terhadap keislaman, maka diperlukan sebuah landasan teologis berupa nilai-nilai, cita-cita, tradisi, ideologi dan akidah islam. Hal itu sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai pondasi dan pijakan utama dalam setiap pemikiran dan tindakannya.

Corak pemikiran dan gerakan PMII tidak bisa dilepas dari sejarah kelahirannya, di mana NU sebagai cikal-bakal lahirnya PMII

merupakan suatu faktor penting dalam menentukan landasan teologis organisasi ini. Oleh karena itu, landasan teologis PMII bisa dikatakan memiliki kesamaan yang cukup besar dengan tradisi NU, baik pemikiraan, nilai-nilai, norma, ideologi, akidah serta tindakannya. PMII dan NU ibarat dua sisi mata uang, di mana satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan.

Sedangkan NU sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan masyarakat sudah lama mengamalkan pemahaman keagamaan dengan corak *Ahlussunnah wal Jamaah*. Ditambah kultur pengajaran dan pendidikan pesantren yang menekankan pada penguasaan khazanah keilmuan baik dalam pendekatan fikih maupun tasawuf. Tentu bagi warga PMII diperlukan pemahaman yang matang ihwal *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dalam segala perspektifnya. Baik dalam terminologis, latar historis, ideologi, pemikiran dan konsep-konsep yang dibangun untuk memahami Islam.

Memahami Aswaja

Secara bahasa, "*Al-Sunnah*" berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku, baik yang terpuji ataupun yang tercela.[11] Dalam terminologi syari'ah "*As-Sunnah*" berarti segala sesuatu dari Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan baik sebelum ataupun sesudah menjadi Rosul.[12] Selain itu "*Al-Sunnah*" menjadi lawan kata dari bid'ah. Konteksnya adalah ketika timbul perpecahan di kalangan umat Islam, tersebar berbagai

[11] Modul Mapaba PMII Ciputat, Maret (2012), Ciputat: PMII Cabang Ciputat, Hlm.27

[12] Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir(2000), *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.11-15

bid'ah, di sinilah *Ahlus-Sunnah* digunakan sebagai pembeda dengan Ahlul Bid'ah.

Adapun kata al-Jama'ah berasal dari kata "*al-Ijtima'*" yang berarti berkumpul atau bersatu. Al-Jama'ah berlawanan dengan kata al-Firqoh yang berarti berpecah belah. Jika kedua kata ini digabung "*Ahlussunnah wal Jamaah*", maka yang dimaksud adalah para pendahulu umat Islam. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in yang bersatu mengikuti kebenaran yang jelas dari Kitabullah dan Sunnah Rosulullah. Apa yang dilakukan Rosul, Sahabat, Tabi'in, dan setiap orang yang datang sesudah mereka dengan menempuh jalan serta mengikuti jejak mereka, maka termasuk ke dalam kelompok *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Di dalam aspek historis, lahirnya Aswaja (sebutan familiar bagi kelompok *Ahlussunnah wal Jama'ah*) tak lepas dari munculnya berbagai aliran dan golongan di dalam Islam. Dimulai sejak terjadi perang Shiffin yang melibatkan Ali dengan Muawiyah, bersamaan dengan kekalahan Ali setelah dikelabuhi melalui taktik arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyaah, mulailah umat Islam terpecah ke dalam berbagai golongan.

Ada yang mendukung Ali (Syiah), menuduh Ali dan Muawiyah sama-sama kafir (Khawarij) karna arbitrase tersebut dianggap keluar dari hukum Islam, dan ada juga yang menyerahkan persoalan kafir atau mukmin tersebut kepada Allah (Murjiah). Setelah itu timbulah berbagai golongan seperti Jabariyah, Qodariyah, Muktazilah dan sebagainya. Dari situlah pertentangan tentang

pemahaman teologis keislaman muncul bahkan saling bertentangan antar golongan. *Ahlusunnah wal Jamaaah* (Sunni) lahir sebagai respon terhadap berbagai aliran tersebut.

Ahlussunnah wal Jamaah merupakan salah satu aliran di dalam teologi pemikiran Islam yang berlandaskan konses-konsep al-Asy'ari dan al-Maturidi[13]. Pemikiran kedua tokoh inilah yang dianggap paling berjasa dalam menghempaskan teori-teori Muktazilah serta berbagai macam golongan yang timbul ketika itu untuk membangun kembali ajaran ortodoks (berpegang teguh pada ajaran Rosul) dan sejak saat itu menjadi warisan pemikiran Sunni[14]. Tidak hanya itu, pemikiran teologi skolastik yang fondasinya dibangun oleh kedua imam ini menjadi corak pemikiran Islam yang paling banyak digunakan muslim dunia hingga saat ini.

Dalam aspek historis, sesungguhnya paham Aswaja dalam bidang akidah telah ada sejak zaman sahabat Nabi. Misalnya pemikiran akidah Ali bin Abi Thalib yang menentang pendapat Khawarij tentang *al-Wa'd wa al-Wa'id* dan pendapat Qodariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Begitu juga pada zaman Tabi'in, pemikiran Aswaja sudah ada, seperti Umar bin Abdul Aziz yang menulis paham-paham Aswaja dalam karyanya "*Risalah Balighah fi Raddi 'ala al-Qodariyah*".

Para mujtahid fikih juga menulis beberapa karya tentang paham Aswaja seperti Abu Hanifah yang menulis kitabnya "*Al-Fiqh al-*

---

[13] Lihat: Abdul Razak, Rosihon Anwar(2006), *Ilmu kalam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm.120

[14] Philip K Hitti (2004), *History Of The Arabs*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm.543

Akbar", Imam Syafi'i dengan kitabnya "*Fi Tashih al-Nubuwwah wa al-Radd 'ala al-Barahimah*". Baru kemudian generasi imam dalam teologi Aswaja sesudah itu diwakili dan dirumuskan secara sistematis oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidi.

Ada beberapa Hadis yang dapat dijadikan dalil tentang paham Aswaja sebagai paham yang bisa menyelamatkan umat dari dari kesesatan, di antaranya adalah *"Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan dan umat Nasrani menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berkata para sahabat "Siapakah mereka ya Rosul?" Rosul menjawab: Mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku."* HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah.

Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr

Di dalam diskursus-diskursus wacana keislaman, terdapat dua pendapat dalam memahami Ahlussunah wal Jamaah. *Pertama*, Aswaja dipahami sebagai sebuah mazhab yang sudah baku dan transenden. Sikap ini sudah lama sekali berkembang di dalam pemikiran keagamaan Islam di Indonesia, terutama di kalangan pesantren.

Hal ini tercermin pada pengimplementasian ajaran Islam sebagaimana disebut Imam Ibnu Hajar al-Haytami bahwa paham Aswaja ketika bertauhid (*teologi*) didasarkan pada pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, dalam berfikih (*Syar'i*) didasarkan pada konsep-konsep imam empat mazhab yakni Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki, dan dalam hal Akhlaq (*tasawwuf*)

didasarkan pada etika akhlak sebagaimana dirumuskan Imam al-Ghazali dan Imam Abul Qosim al-Junaidi serta ulama-ulama lain yang sepaham.

Kedua, Aswaja dipahami sebagai metodologi (*manhaj*) berfikir. Konsep Aswaja sebagai *manhaj al-Fikr* lebih adaptif dan mengakui pemikiran yang filosofis dan sosiologis. Pandangan ini lebih dipopulerkan oleh para kyai muda seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siraj, dan tokoh-tokoh muda NU lainnya.

Dalam perspektif ini Aswaja dijadikan sebagai metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan dasar moderasi, keseimbangan dan toleran. Aswaja dianggap tidak hanya sebagai sebuah mazhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berfikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial kemasyarakatan. *Manhaj al-Fikr* tersebut berpegang pada prinsip-prinsip *tawasut* (moderat), *tawazun* (netral), *ta'adul* (keseimbangan) dan *tasamuh* (toleran).

Pada konteks saat ini, Aswaja tidak hanya dimaknai sebagai ajaran teologis semata, karena problem yang dihadapi oleh umat mutakhir ini tidak semudah periode Islam terdahulu. Sehingga Aswaja dapat ditransformasikan ke dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Pemaknaan seperti ini berangkat dari kesadaran akan kompleksitas masalah saat ini yang tidak hanya membutuhkan solusi bersifat konkret, akan tetapi lebih pada solusi yang sifatnya metodologis, sehingga inilah latar belakang munculnta term Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr* (metode berpikir).

Ada 4 prinsip Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr*. *Pertama*, moderat. Prinsip ini menekankan pentingnya berada pada posisi tengah, tidak condong ke kanan, juga tidak condong ke kiri, sehingga corak pemahamannya selalu tampil pada jalur tengah dalam menjawab tantangan umat. *Kedua*, tawazun, yakni sebuah prinsip istiqomah dalam membawa nilai-nilai Aswaja tanpa intervensi kekuatan manapun. Sebuah pola pikir yang selalu berusaha untuk menuju ke titik pusat ideal (keseimbangan).

Ketiga, toleransi, yakni sebuah prinsip keterbukaan dalam menerima perbedaan. Sikap toleransi ini adalah membebaskan dan melepaskan diri atau golongan dari sifat egoistik dan sentimen pribadi maupun kelompok. *Keempat*, al-I'tidal, yakni kesetaraan atau keadilan. Sebuah konsep adanya proporsionalitas dalam mengejewantahkan pemikiran maupun tindakan. Dengan demikian segala bentuk sikap selalu mengedepankan kemaslahatan dengan visi keadilan bersama.

Empat prinsip Aswaja sebagai kerangka berpikir ini merupakan solusi konkrit untuk menjawab berbagai persoalan zaman yang sangat kompleks. Dengan kerangka berpikir seperti ini maka problem-problem yang berkembang masa kini sangat mungkin menemukan solusi. Empat prinsip tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, dan justru merupakan prinsip-prinsip dasar universalitas ajaran Islam sebagai agama rahmat di alam ini (*Rahmatan lil 'Alamin*).

Implementasi Teologi dan Manhaj al-Fikr Aswaja

Dari apa yang telah diterangkan di atas, kalangan PMII telah mengimplementasikan landasan teologis dan Manhaj al-Fikr Aswaja ke dalam pemikiran dan gerakannya. Dalam konteks keislaman, PMII selalu menghindari simbol dan formal keislaman ke dalam kehidupan nyata maupun struktur kekuasaan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok Islam Puritan.[15] Kelompok puritan yang dimaksud adalah golongan yang menggunakan simbol-simbol keislaman sebagai kekuatan untuk melawan Barat dan kelompok di luar Islam lainnya. Dalam hal ini adalah gerakan-gerakan seperti ISIS, Hizbut Tahrir, ANNAS, dan kalangan Islam takfiri lainnya.

PMII juga hampir tidak pernah memakai jargon Ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan Hadis.[16] Sebagaimana sering disampaikan ustad-ustad industri media televisi atau kalangan pemurnian keagamaan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Rida dan sebagainya. Begitu juga kalangan PMII tetap mempunyai ikatan dengan tradisi yang sudah terus menerus dilestarikan oleh NU. Akan tetapi pada saat yang sama, pemahaman keagamaan yang berkembang di dalam PMII justru melampaui batas-batas pemahaman pesantren. Hal ini karena basis warga PMII adalah mahasiswa, yang mana studi-studi di kampus dituntut untuk lebih dinamis berkembang sesuai konteks situasi kondisi masyarakat yang berkembang.

---

[15]Kaum Puritan merupakan kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan "kemurnian" doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga kesalehan perseorangan dan jemaat.

[16] Muh. Hanif Dakhiri dan Zaini Rachman, *Post Tradisionalisme Islam: Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII*, (2000) Jakarta: ISISINDO MEDIATAMA, hlm. 36

Kedinamisan pemikiran PMII tersebut, sampailah pada corak pemahaman liberal serta semakin tumbuh subur kajian-kajian tentang pemikiran Muhammad Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri, Mahmud Muhammad Thoha, Abdullah Ahmed an-Na'im dan Nashr Hamid Abu Zayd. Semua pemikiran tokoh-tokoh di atas menjadi landasan keislaman sekaligus menjadi model pendekatan yang tak lazim digunakan oleh para Ulama NU.

Sementara dalam konteks Islam dan Negara, PMII mengambil sikap sebagaimana pemikiran Gus Dur. Pemikiran Gus Dur sangat memengaruhi corak pikir dan tindakan PMII terhadap pemahaman tentang Islam dan negara. Pemikiran tersebut ialah berupa pandangan bahwa Islam harus diletakkan sebagai bagian dan menyatu dengan wawasan kebangsaan. Dalam hal ini Islam merupakan komplemen bagi kepentingan yang lebih besar yang bernama bangsa.

Pandangan ini bukan berarti mengecilkan Islam dan membuatnya tunduk kepada kepentingan bangsa yang sekuler, melainkan memberikan corak lokal bagi pemahaman keislaman dengan karakter keindonesiaan. Dari itulah jargon Islam Nusantara selalu diamini oleh kalangan PMII karena menggambarkan identitas dan karakter Islam lokal yakni pemahaman keagamaan Islam yang terdapat di Nusantara.

Dengan demikian, Islam tidak perlu dilihat sebagai institusi yang dipaksakan masuk sebagai konstitusi negara. Kalangan PMII tidak pernah ikut-ikutan melakukan gerakan perjuangan agar Islam

menjadi konstitusi negara. PMII selalu berpegang teguh pada isu-isu pluralisme, toleransi, Hak Asasi Manusia dan demokrasi sebagai prasyarat bagi respon penerimanya terhadap logika negara-negara modern.

Dalam konteks gerakan sosial politik, PMII lebih pada gerakan kultural melalui program penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi dan terbentuknya masyarakat sipil. PMII tidak pernah mengatasnamakan Islam untuk membangun kekuatan dalam perebutan wilayah-wilayah kekuasaan. Sebagai tindakan itu hanya akan menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan. Komitmen seperti ini diperkuat dengan sikap ketidaksetujuan dan perlawanan PMII terhadap model gerakan yang dilakukan oleh ICMI yang membawa simbol-simbol keislaman pada ranah kekuasaan negara.

Dari itu semua bisa dijelaskan bahwa komunitas PMII berupaya menjadikan dirinya sentral dan sumpul jaringan intelektual dan internal kalangan muda NU. PMII mengemban amanat besar bagi transformasi intelektual dan sosial yang diharapkan terjadi secara simultan tetapi gradual dan berkelanjutan.

Desiminasi wacana terus dilakukan melalui pembentukan simpul-simpul intelektual di daerah-daerah cabang PMII seluruh Indonesia, termasuk di pesantren asal kader PMII menimpa ilmu keagamaan dan pendidikan. Maka tidak heran jika dulunya pesantren diindentikkan dengan sikap tertutup terhadap informasi, budaya dan pemikiran dari luar, justra saat ini pesantren yang paling nyaring

berbicara tentang demokrasi, *Civil Society* dan hak asasi manusia. Pesantrenlah yang menjadi pijakan utama pendidikan keagamaan Indonesia yang bebas dari pemikiran-pemikiran puritarianisme maupun fundamentalisme a

BELAJAR DARI PESANTREN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia didirikan atas prinsip anti-kolonialisme. Pesantren telah membuktikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia sebuah sumbangan yang sangat besar terhadap revolusi nasional. Pesantren juga menjadi mercusuar pendidikan keislaman Indonesia yang memikul tugas *national building* dan *character building.* Warga PMII yang sebagian besar anggotanya merupakan alumni pesantren (baca: santri) memiliki tugas yang cukup besar untuk mempertahankan tradisi pendidikan dan keilmuan pesantren sebagai tonggak utama pembangunan kader-kader bangsa.

Dalam kaitannya dengan pesantren, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden secara resmi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Banyak pertanyaan dari berbagai khalayak ihwal penetapan Hari Santri Nasional ini, terutama dari masyarakat umum yang secara pendidikan tidak pernah mengenyam pembelajaran di pesantren. Hal ini tak lain karna sudah jamak diketahui, bahwa penetapan hari nasional merupakan peristiwa sejarah yang mempunyai andil besar terhadap suatu negara dan bangsa. Pertanyaannya sejauh mana kalangan santri sudah memberi sumbangsih terhadap Indonesia ?

Peran Santri

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepas dari peran santri (Kuntowijoyo, 2008). KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan sebutan "Resolusi Jihad". Sebuah kebulatan tekad yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk mengangkat senjata melawan penjajah dan segala bentuk imperialisme yang mengancam kemerdekaan Republik Indonesia.

Resolusi Jihad ini menjadi resolusi umat Islam yang dikumandangkan hampir seluruh tanah Jawa. Resolusi Jihad ini juga menginspirasi ribuan pemuda pejuang tanah air yang tergabung di dalam laskar-laskar pemuda yang aktif melawan penjajah seperti pertempuran 10 November Surabaya, Palagan Ambara, pertempuran di Semarang, Bandung lautan api dan pertempuran-pertempuran lain yang tak terjamah dalam sejarah.

Fakta historis tak kalah menarik dari persepektif Sartono Kartodirdjo (seorang sejarawan) di dalam buku Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai, Konstruksi sosial berbasi agama* (2007). Sartono mengatakan bahwa peristiwa pertentangan sosial politik terhadap penguasa kolonial, menurut laporan pemerintah Belanda sendiri dipelopori oleh para kyai sebagai pemuka agama dan santri sebagai sebuah gerakan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Komunitas santri pedesaan dengan semangat kesadaran akan tanggung jawab terhadap Islam dan tanah air menyatu menjadi basis kekuatan yang mampu menjadi bagian dari aktor kemerdekaan Indonesia.

Berkat motivasi dan upaya transformasi besar-besaran serta beralihnya gerakan yang spontanitas dari produk ulama dan sugesti pensakralan terhadap peperangan melawan penjajah terbukti mampu mengusir penjajah dari tanah air ini. Hal itu juga karena sifat Kharismatik *(Spiritual Leader)* dan paternalistik Kyai yang merupakan ciri kepemimpinananya melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dengan itu, perjuangan para santri yang dikomandoi oleh para Kyai mampu mengantarkan perjuangan menuju pintu kemerdekaan Indonesia.

Dari sini kita ketahui bahwa penetapan hari santri nasional ini tak lain adalah suatu sikap pemerintah untuk menghargai jasa para santri atas kecintaannya kepada tanah air serta perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Rasa nasionalisme santri itu tercermin dari peristiwa empirik yang memang dalam literatur historis tidak banyak diketahui masyarakat

umum. Sejarah yang selama ini kita terima tidak pernah memberi kejujuran tentang peran laskar santri yang terhimpun dalam *Hizbullah* dan laskar para Kyai yang tergabung dalam *Sabilillah*. Peristiwa 10 Oktober 1945, yang dikenal dengan Resolusi Jihad untuk melawan penjajah juga tidak banyak terekam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Sungguh suatu ketidaksempurnaan jika setiap pemaparan sejarah nasional Indonesia tidak disertai dengan peranan umat Islam dalam hal ini santri sebagai pejuang melawan penjajah. Begitu dalamnya torehan sejarah yang dimainkan perannannya oleh para santri di bawah komando para Kyai dan Ulama. Semua itu telah memberi warna yang terang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, warga PMII sebagai santri dan kader intelektual pesantren yang mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi harus mampu menjawab dan mengungkap fakta empirik torehan perjuangan santri dalam kemerdekaan nasional. Hal ini penting, mengingat pelajaran-pelajaran sejarah di lembaga-lembaga pendidikan formal indonesia, tidak banyak yang mengungkap peran santri dalam revolusi nasional Indonesia.

Belajar dari santri

Dalam kaitannya dengan Resolusi Jihad, pesantren mendasari empat semangat di dalam jiwa sanubari santri, pertama, *ruh al-tadayun* (semangat beragama yang dipahami, didalami dan diamalkan), kedua, *ruh al-wathoniyah* (semangat cinta tanah air), ketiga, *ruh al-ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan), dan

keempat, *ruh al-Insaniyah* (semangat kemanusiaan). Keempat semangat itu selalu melekat dalam jiwa sanubari santri karna pesantren senantiasai menjadikan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan dan pembelajarannya.

Dari keempat pilar itu sejatinya menjadi pembelajaran bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Warga PMII harus siap dan mampu mengamalkan empat pilar pesantren di dalam diskursus-diskursus dan dialektika Perguruan Tinggi sebagai modal untuk membawa bergaining wacana keilmuan yang didapat dari pesantren tempat menimba ilmu sebelumnya. Siapapun, baik santri maupun yang bukan, semestinya belajar dari keempat pilar tersebut. Sudah terbukti, dengan mengamalkannya bisa menjadi tiang kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Buktinya, keterlibatan santri dalam sejarah perlawanan Indonesia dengan semangat kebangsaan dan keagamaan terus bergelora dalam dimensi tempat dan waktu.

Apalagi di tengah krisisnya moralitas kepemimpinan yang melanda negeri ini. Jika korupsi, kezaliman, hedonisme dan ketimpangan hukum sedang melanda negeri ini, justru santri menjadi teladan kejujuran, kesederhanaan, kemandirian dan kepemimpinan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini tak lain karna di pesantren tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam penanaman dan pembentukan nilai-nilai dan norma, nasionalisme, serta akhlak mulia berdasarkan ajaran-ajaran luhur keagamaan.

Dari itu semua, perjuangan untuk menjadikan peristiwa resolusi jihad sebagai hari santri nasional telah tercapai dengan diresmikannya Hari Santri Nasional. Ini semua juga digerakkan oleh para kader-kader PMII sebagai kader pesantren yang tak kenal lelah menggelorakan semangat kesantriannya. Baik yang telah mengenyam pendidikan ilmu-ilmu umum maupun agama di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia maupun berbagai penjuru dunia. Mereka menyebar di berbagai penjuru dunia sebagai kader pesantren untuk memperjuangan keberislaman dan keberbangsaan yang benar.

Poinnya, PMII harus tetap mempertahankan jiwa kesantriannya di mana perjuangan para Kyai berikut para santri bisa dijadikan inspirasi dan keteladanan oleh generasi muda selanjutnya. Oleh karena pesantren merupakan mercusuar pendidikan keislaman di Indonesia, maka pendidikan pesantren harus tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk memikul tugas revolusi mental masyarakat Indonesia baik dalam usaha *national building* dan *character building*.

MENEMUKAN TITIK TEMU PERSOALAN SUNNI-SYIAH

Sunni dan Syiah merupakan dua mazhab yang paling penting di dalam Islam dengan sebagian besar pengadilan agama Islam di dunia menggunakan keduanya sebagai pijakan utama. al-Azhar, Perguruan Tinggi tertua di dunia yang bermazhab Sunni yang juga menjadi kebanggan umat Islam menggunakan mazhab keduanya sebagai pijakan hukum, empat mazhab Sunni (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) serta dua mazhab Syiah (Ja'fari dan Zaidi). Al-Azhar merupakan simbol persatuan Sunni dan Syiah dan telah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya menggunakan mazhab dari kalangan Syiah. Berikut fatwa al-Azhar :

1. Islam tidak mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk mengikuti mazhab tertentu. Bahkan kami menyatakan bahwa setiap muslim mempunyai hak untuk mengikuti setiap mazhab yang otoritatif dan fatwa-fatwanya yang telah dicetak dalam bentuk buku. Dan barang siapa mengikuti setiap mazhab dan berpindah kepada mazhab yang lain, maka tidak masalah baginya untuk melakukan hal tersebut.
2. Mazhab Ja'fari yang dikenal dengan mazhab Syiah Imamiyah Duabelas merupakan mazhab yang dipergunakan untuk digunakan sebagai sumber hukum, sebagaimana mazhab-mazhab Sunni lainnya.

Persoalannya, sebagian besar umat Islam Indonesia yang notabene berpaham Islam Sunni, masih sering mempersoalkan paham Syiah sebagai aliran sesat, keluar dari Islam, kafir dan berbagai tuduhan-tuduhan lain. Kalau kita membuka google dengan kata kunci "Syiah", maka sangat banyak bermunculan tuduhan-tuduhan sesat terhadap Syiah. Alih-alih ingin memahami lebih dalam tentang Syiah, justru yang ada adalah diskriminasi dan penyesatan pengetahuan. Akibatnya, masyarakat sangat mudah terprovokasi dan termakan fitnah besar di berbagai media sosial. Maka tak heran jika sering terjadi diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok Syiah, sebagaimana terjadi di Sampang (2012) dan lain sebagainya.

Kampanye massif yang negatif tentang syiah terutama di berbagai media online ini sangat jauh dari kebenaran. Beberapa kelompok ekstremis sering menggunakan nalar argumentasi benturan Sunni-Syiah untuk memporak-porandakan Islam sendiri.

Misalkan Jaringan al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) kerap menggunakan isu ini sebagai bungkus narasi politiknya. Dampaknya, jutaan umat manusia dikorbankan hanya karena perbedaan mazhab. Peradaban Islam semakin hancur, persaudaraan atas nama kemanusiaan tidak lagi menjadi hal yang penting, dan tentu mudoratnya sangat lebih besar dari manfaatnya.

Oleh karena itu, mengingat isu keagamaan ini sangat sensitif, maka setiap tokoh-tokoh agama dan setiap muslim secara umum perlu pemahaman yang objektif tentang Syiah, apalagi warga PMII sebagai kader intelektual umat Islam Indonesia mutlak harus memahami secara komprehensif agar tidak ada kesalahpahaman dalam memandang pemahaman keagamaan dari kelompok lain. Mari kita pahami sejarah dua kelompok mazhab besar Islam ini.

SEJARAH HARMONIS SUNNI-SYIAH

Dalam perspektif historis, sesungguhnya para imam Syiah dan ulama Sunni di masa lampau tidak mempertentangkan antara perbedaan ijtihad mereka. Setiap orang saling menghargai dan tidak ada yang saling melecehkan ijtihad masing-masing. Mereka memahami bahwa mereka bagian dari keluarga umat Islam. Faktanya, mereka hidup berbaur dan tidak sedikitpun menyala api perpecahan.

Hubungan harmonis tersebut tercermin dari hubungan para pemuka mazhab, seperti Zayd bin Ali (imam Syiah Zaidiyah) yang belajar fikih dan dasar akidah dari Abu Hanifah (salah satu imam Sunni). Sementara Abu Hanifah belajar hadis dan ilmu-ilmu lainnya

dari imam Ja'far Shadiq (imam Syiah). Mereka tidak berbeda pendapat perihal fundamen agama, perbedaan terjadi hanya dalam hal memahami hukum-hukum yang bersifat patikular *(al-ahkam al-far'iyyah)*. Oleh karena itu, perbedaan mereka dalam hal-hal yang parsial sejatinya merupakan rahmat, berkah, potensi, dan keluasan.

Kondisi tersebut terus bertahan hingga pertengahan abad ke-IV Hijriah dan mulai melemah pada masa dinasti Abbasiah. Mereka kemudian terpetakan dalam polarisasi akibat faksionalisasi politik. Konsekuensinya lahirlah fanatisme mazhab sebagai cikal bakal munculnya permusuhan antara Sunni-Syiah. Ulama dari kedua mazhab tersebut mempersempit kajiannya pada apa yang dipelajari dari imam dan syeikhnya (Baca: ulama besar), lalu fanatik dan menyerang dengan keras pandangan yang tidak sejalan dengan dirinya.

Sektarianisme Sunni-Syiah ini kemudian terus berkembang akibat pengaruh politik kolonialisme kapitalistik kekuatan negara-negara *superpower* dengan menggunakan kekuatan militer dan segala tipu daya lainnya yang kemudian memecah belah Islam. Sungguh yang lebih memprihatinkan, pengaruh politik friksionis ini sangat aktif, masif dan dinamis di sejumlah dunia Islam hingga saat ini. Mereka memperjualbelikan konflik dengan mengatasnamakan agama.

TITIK TEMU

Padahal, konflik yang terjadi di kalangan Sunni dan Syiah merupakan konflik politik dan bukan konflik keagamaan. Konflik

politik akan mengakibatkan luka yang sangat mendalam, sementara konflik keagamaan menjadi rahmat. Sebagaimana disampaikan Rosul *"Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah sebuah rahmat".*

Perbedaan mendasar dari kedua konflik tersebut adalah *pertama*, konflik sektarian dan bernuansa politik. konflik ini menanam kebencian di dalam hati sanubari manusia, sehingga memporak-porandakan sebuah persatuan. Maka meluruskan konflik yang bernuansa sektarian dan politis ini merupakan sebuah keniscayaan dan mutlak harus segera diselesaikan, karena konflik itu dapat menumbuhkan nalar dan sikap diskriminatif dan kekerasan.

Kedua, konflik bernuansa keagamaan, khususnya fikih dan mazhab. Konflik pada ranah ini bukanlah persoalan, karena membuktikan dinamika dan revitalisasi pemikiran ijtihad ulama. Konflik tersebut dibangun atas dasar perdebatan dengan menggunakan berbagai perspektif, analisis, dan tradisi keagamaan. Sejauh perdebatan menggunakan sumber yang sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mengingkari dasar-dasar koridor pengambilan hukum Islam.

Sehingga bisa dipastikan tidak ada perbedaan perihal fundamen agama antara Sunni dan Syiah. Sebagaimana para imam mazhab Sunni yang sangat populer, yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal, dan imam Syafi'i adalah para ulama yang mempunyai tempat terhormat di mata para ulama fikih Syiah. Sebaliknya, para ulama fikih Sunni tidak mengabaikan keberadaan ulama fikih Ahlul Bait. Bahkan ulama Sunni menganggap imam Ja'far

Shadiq sebagai ulama fikih yang paling cemerlang di zamannya. Ini dibuktikan dengan perkataan Abu Hanifah : *"aku tidak pernah melihat ulama fikih yang lebih cemerlang dari Ja'far Shodiq bin Muhammad".*

Adapun ulama-ulama Sunni menerima lebih seratus orang perawi hadis dari kalangan Syiah. Sebaliknya, kalangan Syiah juga menerima hadis dari kalangan sunni seperti dikatakan syeikh Muhammad Hasan Shadar dalam kitabnya *Al-Syiah, "Syiah selalu menerima hadis dari kalangan Sunni, apabila diketahui perawinya jujur dan kuat hafalannya".* Bahkan Imam Syafii sangat mencintai Ahlul Bait. Ia berkata: "*seandainya kecintaanku kepada Ahlul Bait dianggap sebagai syiah, maka akupun rela disebut syiah"*. Di sinilah dapat kita temui fakta historis keharmonisan Sunni dan Syiah dan tidak ada pertentangan yang prinsipil antar keduanya.

Harus kita sadari, ketika konflik Sunni-Syiah terus terjadi akibat friksionis politik, justru di seantero dunia umat manusia membangun aliansi-aliansi dalam komunitas. Mereka berbondong-bondong membangun kesepakatan bisnis, ekonomi, politik, pendidikan dan kemajuan saintifik, meskipun berbeda keyakinan, prinsip, ideologi, dan pandangan. Pertanyaannya, mengapa umat Islam baik Sunni maupun Syiah tidak membangun kekuatan besar? Sampai kapan persoalan kafir, sesat, melenceng, diskriminasi, bunuh membunuh akan terus dilakukan? Bukankah Tuhan Sunni dan Syiah sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, dan kiblat ibadahnya juga sama? Bagi kalangan Sunni, seakan-akan Syiah lebih kejam dari golongan non-Islam, begitu juga kalangan Syiah, seakan-akan Sunni menjadi musuh terus menerus.

Tidak dimungkiri lagi, faktor utama yang menyebabkan jatuhnya peradaban dunia Islam ini karena keterbelahan dalam berbagai golongan, aliran, dan partai. Hal ini selaras dengan firman Allah: *"setiap golongan selalu bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka"* (al-Rum: 30:32). Padahal Islam merupakan agama yang mempunyai tujuan mulia untuk melanjutkan tonggak pilar kemanusiaan sebagai landasan bagi tegaknya kebenaran, keadilan, dan kesetaraan, khususnya dalam rangka membangun masyarakat yang humanis, aman, tentram, dan sejahtera.

Menurut Musthafa Rafi'i di dalam bukunya *Islamuna: fi al-tawfiq bayn al-Sunnah wa al-Syi'ah,* ada tiga hal penting yang dijunjung Islam. *Pertama*, kesatuan pijakan. Islam menegaskan, seluruh manusia adalah setara dalam kefitrahannya. Yaitu setiap manusia tercipta dari tanah yang tidak diperkenalkan bagi setiap orang yang berakal untuk bertindak angkuh terhadap manusia yang lain.

Kedua, kesatuan nilai. Islam menyatakan, manusia pada hakikatnya setara laksana sisi sisir. Adapun yang membedakan mereka adalah tingkat takwa. *Ketiga*, kesatuan tujuan. Islam adalah agama yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan setiap pengikutnya agar mewujudkan konsep keadilan dan persamaan di antara semua makhluk Tuhan. Apabila ketiga hal tersebut mampu kita aplikasikan, niscaya Islam menjadi payung teduh sebagai agama *rahmatan lil 'amin*.

Kenyataannya, sangat ironis, penganut mazhab Sunni dan Syiah mudah terjerumus dalam konspirasi picik politik friksionis kolonialisme dan gerbong-gerbong gerakan kapitalisme ekonomi politik. Sikap kita selama ini seolah-olah memberikan angin segar bagi misi yang dilancarkan mereka untuk memecah belah Islam.

Padahal persatuan yang dikehendaki Islam bagi setiap umatnya yaitu persatuan yang didasari atas prinsip-prinsip persamaan. Persatuan yang dibangun atas persaudaraan, cinta, menghapus egoisme, keakuan, dan individu melebur dalam komunitas. Persatuan yang memberikan ruang bagi setiap manusia untuk unggul atas dasar kebajikan, pengetahuan, dan cahaya, bukan atas dasar diskriminasi, kebodohan, dan kegelapan.

SYIAH DI INDONESIA

Jika membaca sejarah masuknya Islam di Nusantara, maka salah satu teori mengatakan Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia yang notabene merupakan basis golongan muslim yang bermazhab Syiah. Umar Amir Husen dan P.A. Hussein Jayadiningrat menemukan data dugaan kesamaan budaya antar Islam di Indonesia dengan tradisi keagamaan kalangan Syiah. Hal ini bisa dibuktikan dengan peringatan 10 Muharram, wafatnya Hasan dan Husein.

Faktanya, di daerah Bengkulu, Palembang, beberapa daerah di Sumatera Barat terdapat tradisi keagamaan bernama "Tabot", sebuah ritual keagamaan yang diselenggarakan pada setiap 10 Muharram untuk memperingati hari wafatnya Sayyidina Husein. Ada juga tradisi bernama "Maulid Cikoang" di Sulawesi Selatan, sebuah

tradisi yang sangat Syiah, bahkan Tafsir Tabataba'i, yang dikarang oleh al-'allamah Tabataba'i termasuk ulama yang bermazhab Syiah, tetapi kitab ini justru menjadi rujukan utama hampir di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia.

Tanda-tanda Islam Indonesia memiliki kemiripan dengan tradisi keagamaan Syiah juga banyak tercermin dalam tradisi keagamaan lainnya. Banyak Muslim Indonesia, khususnya NU dan sebagian besar kaum 'tradisionalis' di Indonesia memiliki kecenderungan 'tasyayyu' (kesyi'ah-syi'ahan) seperti penghormatan kepada Ahlul Bait, khususnya Sayyidina 'Ali ibn Abu Talib, Fatimah Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Husein. Bahkan bukan hanya itu, tradisi keagamaan seperti ziarah kubur, wirid, zikir, dan tarekat mirip dengan tradisi keagamaan golongan Syiah. Tradisi ini sangat berbeda dan bertentangan dengan tradisi Arab Saudi yang menghukum kafir dan musyrik bagi penziarah kuburan, tahlil, barzanji dan sebagainya.

Unsur Syiah sendiri dalam kebudayaan keislaman Nusantara sudah ada sejak abad ke-13. Dalam bidang kesusasteraan di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan Jawa, hampir 80 persen diambil dari bahasa Persia (Iran). Mulai abad ke 13-19 hingga abad-20 yang selalu dibahas adalah karya Imam Al Ghozali kemudian Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim, Nuruddin Ar Raniri dan lain-lain. Begitu juga dalam pembelajaran al-Quran di Indonesia tidak seperti di Arab, semisal dommah, sukun, tapi memakai cara yang sama dengan persia (Iran) yang notabene mayoritas penduduknya berpaham Syiah, seperti jabar, jeber, bahkan

istilahnya masih sama sampai sekarang seperti alif jeber a, alif jeber i, dan bukan memakai dommah, sukun dan fathah.

Sayangnya, yang terjadi di Indonesia adalah betapa besarnya kebohongan yang dilakukan banyak penulis dan para pemuka agama mengenai Syiah. Mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Syiah, misalnya Quran beda, menuhankan Ali, gemar melaknat khalifah, dan istri Nabi, dan tuduhan-tuduhan lain; yang secara empirik tidak pernah tuduhan-tuduhan itu terbukti. Faktanya, Quran mereka sama, Tuhannya tetap Allah, tidak ada pelaknatan para sahabat besar dan istri Nabi. Bahkan pemimpin Syiah, Ayatullah Ali Khameini pernah mengeluarkan fatwa haram atas perbuatan seperti itu. Memang sepertinya segelintir orang dan beberapa kelompok sengaja ingin mendiskreditkan Syiah karna faktor politik ekonomi semata, atau kelemahan pengetahuan mereka terhadap Syiah sendiri.

BAGAIMANA PMII MERESPON ?

Dari ulasan di atas, PMII sebagai ormas mahasiswa yang sangat ramah terhadap keragaman, termasuk terhadap Syiah, perlu menggagas dan membuat inisiatif kesepahaman di antara masyarakat. Yang dibutuhkan bukan hanya sikap menerima dan toleran terhadap Syiah, tetapi juga perjuangan untuk menjadi jembatan dari suatu dikotomi antar Sunni-Syiah. Bagaimana implementasinya?

Pertama, PMII diharapkan bisa menjadi jembatan dan penggagas titik-temu Sunni-Syiah. PMII bisa menjadi inisiator untuk menjadikan Sunni-Syiah bisa melebur menjadi satu dan saling

mendorong satu sama lain. Artinya mendorong sifat saling terbuka dan keterbukaan antara satu sama lain, menghilangkan kecurigaan, berburuk sangka, dan perbedaan harus diakui. PMII diharapkan menjadi ormas yang selalu menitikberatkan persamaan, bukan golongan yang mempertentangkan Sunni dan Syiah, apalagi ikut terprovokasi tuduhan kafir dan sesat. Bahwa perbedaan itu adalah salah satu keragaman Islam yang harus dipelihara bukan malah bermusuhan dan menjadi konflik. Di situlah sifat menghargai perbedaan untuk menemukan titik-temu (*Common Platform)*.

Kedua, memahami bahwa di dalam setiap golongan terdapat sekte yang mayoritas dan minoritas. Di dalam mazhab Sunni terdapat berbagai sekte-sekte yang agak melenceng dari koridor *Ahlussunnah Wal Jamaah*. Misalkan kelompok-kelompok aliran sesat menurut Majelis Ulama tidak bisa dikatakan sebagai representasi umat Islam yang bermazhab Sunni. Begitu juga di kalangan Syiah, apa yang digambarkan terhadap potret negatifnya Syiah Ghulat, tidak mewakili masyarakat Syiah secara umumnya. Bahkan di dalam pembahasan teologi Islam (ilmu Kalam), aliran-aliran teologi Islam juga selalu ada sekte-sekte yang minoritas. Sehingga menjadi wajar jika terdapat aliran mainstream dan ada pula aliran yang minoritas. Kalau ditarik pada spektrum yang lebih universal, bahwa setiap agama mempunyai kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Ketiga, mendorong Indonesia untuk menjadi laboratorium peradaban keilmuan Islam baru. Saat ini negara-negara Timur Tengah, baik itu Saudi Arabia, Mesir, Yaman dan lain-lain sedang dilanda konflik sektarianisme yang sangat hebat. Sehingga untuk

menjadi tempat pendidikan dan pembelajaran keilmuan sudah tidak menjadi tempat yang bagus dan baik dalam studi agama maupun saintifik. Lebih parahnya, konflik tersebut dibungkus sedemikian rupa menjadi konflik agama, seperti ISIS, al-Qaeda dan sebagainya. Oleh karena itu PMII memiliki tantangan besar untuk turut mendorong Indonesia sebagai kiblat keilmuan Islam dunia. Berbekal sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan tradisi moderasi dan toleransi yang kuat, bukan mustahil Indonesia menjadi pusat peradaban Islam baru.

Merespon persoalan Sunni-Syiah dengan ketiga argumen ini merupakan bukti konkrit PMII sebagai organisasi yang terbuka dan toleran terhadap berbagai persoalan keagamaan yang berkembang yang tidak menemukan titik temu selama berabad-abad lamanya. Sebagai dua mazhab yang besar di dalam Islam, Sunni dan Syiah harus mencapai *common platform*. Biarkanlah keduanya fokus pada glorifikasi dan mistifikasinya masing-masing, tetapi keduanya harus mencapai pada titik temu kerjasama budaya, politik, pendidikan, dan komitmen untuk membangun saintifik di kalangan umat Islam.

RESPON PMII TERHADAP TERORISME

Sejak serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center (WTC) New York, terorisme menjadi awal babak baru isu global. Setelah itu, rentetan serangan teroris terus bermunculan di berbagai negara belahan dunia. Beberapa serangan itu misalkan pada krisis sandera di Moskow (2002), serangan bom Madrid (2004), serangan membabi buta di Paris (2015), dan mutakhir ini serangan bom di Belgia (2016) serta masih banyak fenomena terorisme lainnya. Sementara serangkaian serangan teroris di Indonesia diawali teror bom di Legian Bali (2002), bom kedutaan besar Australia (2004),

bom Hotel J.W. Marriot dan Ritz Charlton (2009), hingga ledakan bom Thamrin (2016) mutakhir ini.

Berbagai aksi terorisme ini telah menimbulkan ketidaktentraman, instabiltas negara, keresahan dan ketakutan masyarakat dunia. Terorisme menjadi isu global yang memengaruhi kebijakan politik negara-negara dunia. Berbagai serangan bom teroris menunjukkan bahwa terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, negara serta masyarakat internasional. Terorisme bukanlah kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kemanusiaan.

Para teroris mengklaim tindakannya atas dasar ajaran-ajaran Islam. Mereka menggunakan label jihad di jalan Allah untuk menebar ketakutan dunia. Faktanya, serangkaian serangan teroris di berbagai negara diklaim oleh kelompok mengatasnamakan Islam. Sebutlah semisal al-Qaeda, Taliban, ISIS dan sebagainya. Akibat dari klaim sepihak kelompok teroris ini Islam terlampau diidentikkan dengan makna negatif. Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan intoleransi, kekerasan, dan terorisme.

Bahkan isu ekstremisme, kekerasan, dan tumpahan darah akibat serangan teroris ini menjadi menu utama media internasional. Hampir seluruh pemimpin dunia mengecam tindakan teroris ini. Berbagai aliansi dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk menghancurkan terorisme. Hal ini semakin menciptakan salah persepsi tentang Islam khususnya di Barat. Wajah Islam seakan

diwakili oleh kelompok teroris. Tidak sedikit misalnya muncul kecenderungan untuk menganggap Islam sebagai biang keladi atas absennya kebebasan. Donald Trump, calon Presiden Amerika dari Partai Republik, bahkan secara terang-terangan memproklamasikan Islam sebagai "agama represif dan kemunduran" (*a religion of repression and backwardness*). Sehingga Islam tertuduh sebagai perusak peradaban.

Dampak dari itu semua, Istilah "Islam ekstremis" semakin dikenal dan menjadi kata yang ditakuti masyarakat dunia, "Islamphobia" namanya. Inilah yang oleh Khaled Abou Fadl dalam karyanya, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Ekstrimist,* (2005), disebut sebagai pencurian besar dan mungkin yang terbesar terhadap agama Islam. Dalam situasi seperti ini diperlukan respon dan sikap yang konkrit dilakukan oleh para kader PMII. Sebagai organisasi pemuda besar yang memiliki pemahaman Islam yang moderat, PMII harus bertindak menentukan sikapnya. Bagaimana PMII merespon ?

Respon PMII

Pertama, PMII harus mampu membersihkan Islam dari infiltrasi dan pengaruh pemikiran-pemikiran yang puritan. Di tengah maraknya gerakan Islam fundamental di berbagai kampus, kader PMII mesti mempunyai gelora perjuangan yang tidak kalah kuat dari mereka. Sudah sepatutnya PMII tidak hanya berteriak perihal dunia politik dan sosial semata, tetapi juga tentang perjuangan Islam Indonesia. Suara-suara gema pembebasan yang minoritas jangan

dianggap angin kecil yang hanya lewat sepintas. Pemikiran-pemikiran keislaman pemuda Islam Indonesia perlu diselamatkan.

Mereka yang tidak pernah mengeyam pendidikan pesantren atau ajaran-ajaran dasar keislaman yang kuat menjadi korban empuk sasaran arus kekuatan Islam Impor yang terus menerus merongrong keislaman di Indonesia. PMII harus menyelamatkan mereka dari serangan pemikiran fundamental atau radikal yang berkembang mutakhir ini. PMII harus menjadi contoh pemuda muslim panutan yang memiliki prinsip-prinsip toleransi, perdamaian dan keadaban.

Kedua, PMII harus memberi bukti konkrit bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Keduanya bisa saling berjalan dan saling menguatkan. Kampanye ini bisa digelorakan kepada seluruh dunia, mengingat PMII menjadi kader muda Islam Indonesia yang telah terbukti dapat men-sintesiskan antara Islam dan demokrasi. Para kader-kader PMII harus mampu memberi jawaban terhadap tesis Bernard Lewis '*the clash between Islam and modernity*', yang menunjuk masalah absennya demokrasi di dunia Islam karena bertumpu pada benturan antara Islam dan modernitas.

Proses global dialektika filsafati antara tesis demokrasi liberal di Barat dan universalisme Islam yang moderat di Indonesia akan melahirkan sintesis baru untuk mencapai kedamaian di dunia. Prinsip-prinsip keberislaman secara moderat yang juga dicontohkan PMII dapat menyediakan kekayaan referensi yang luar biasa untuk merepons secara konstruktif isu-isu yang berkembang seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, keadilan, toleransi, pluralisme,

kesetaraan jender dan hubungan antar umat beragama. Kita ingat, Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah sangat demokratis, yang oleh sosiolog terkemuka Amerika Robert N. Bellah dinilai sebagai suatu pencapaian yang luar biasa modern, sebab menjunjung tinggi prinsip toleransi dan egalitarianisme antar masyarakat. Kader PMII harus bisa mengadopsi sistem negara Madinah yang ramah, toleran pada negara Indonesia Modern.

Ketiga, PMII harus menggelorakan prinsip moderatisme *(tawasut)* secara masif, baik di media sosial, maupun dalam tindakan aksi perdamaian. Gaung suara PMII jangan hanya disuarakan di internal kampus saja, tetapi diperlukan tindakan yang nyata untuk mengkampanyekan sikap moderat kepada dunia. Kampanye moderatisme ini juga sebagai suatu sikap yang harus dijalankan warga PMII dalam rangka implementasi nilai-nilai ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Di tengah banyaknya klaim publik untuk menganggap Islam sebagai biang keladi atas kekerasan dan terorisme, PMII harus hadir menjadi contoh pemuda muslim yang moderat (*Tawasut*). PMII menjadi representasi dari pemuda muslim Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam dan terbesar di dunia yang memiliki sifat moderat. Sehingga PMII juga mengamini apa yang dikatakan Khaled Abou El-Fadl bahwa Islam yang benar adalah Islam yang moderat "*The true Islam is Islam moderation*".

Dari itu semua, PMII mengemban amanah yang cukup besar untuk membersihkan nama Islam dari berbagai tuduhan dunia.

Berbagai tragedi serangan teroris di penjuru dunia adalah juga menjadi tantangan dan problem besar PMII. Kader-kader PMII harus bergotong royong untuk membersihkan nama Islam dari label "teroris", jangan biarkan perilaku teroris ini menodai wajah Islam Indonesia yang mencerminkan rahmat semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

MENANGKAL RADIKALISME KAUM INTELEKTUAL

Pada Kamis, 18 Februari 2016, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyelenggarakan diskusi dengan tema "Membedah Pola Gerakan Radikal di Indonesia". Inti dari diskusi tersebut adalah membedah hasil penelitian LIPI tentang paham radikalisme yang kini tidak hanya menyasar kalangan bawah, tetapi juga meluas ke kalangan intelektual, termasuk di kalangan kampus.

Peneliti bidang hukum LIPI, Anas Saldi juga menemukan penyemaian paham radikal yang menguasai kampus-kampus besar di

Indonesia. Malalui penelitiannya yang berjudul "*Mahasiswa Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*" ia menemukan benih-benih paham radikal di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Tekhnologi Sepuluh November (ITS), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penelitian tentang paham radikal juga dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, yang mengambil sampel penelitian terhadap 500 guru dan siswa di wilayah Jabodetabek, bedanya penelitian ini dilakukan terhadap pelajar kalangan sekolah menengah. Hasilnya adalah terdapat 76,2 persen guru dan 84 persen siswa menginginkan syariat Islam. Sebanyak 52,3 persen siswa mendukung kekerasan untuk solidaritas agama dan 14 persen siswa membenarkan aksi pengeboman. 25 persen guru dan 21 persen siswa mengatakan Pancasila sudah tidak relevan lagi.

Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan, pendidikan sekolah dan Perguruan Tinggi yang sejatinya bisa mencetak generasi intelektual, pengembangan keilmuan serta pembangunan bangsa, kini justru terjangkit pengembangan radikalisme yang membahayakan keutuhan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang akar masalahnya. Banyak faktor penyebab yang bisa dianalisis, tetapi penulis lebih tertarik pada empat faktor utama.

Pertama, latar belakang paham keagamaan yang dangkal. Kalangan intelektual yang berasal dari sekolah umum atau kampus sekuler (non-keagamaan) mudah terperangkap oleh paham-paham

eksklusivisme dan fundamentalisme agama. Hal ini karena mereka tidak memiliki basis pemahaman keagamaan yang kuat, semisal tidak pernah belajar di pesantren atau sejenisnya. Mereka memahami ajaran keagamaan yang dasar dan sepotong-potong, sehingga pemahaman terhadap pengajaran keagamaan tidak komprehensif.

Faktor ini sesuai dengan laporan-laporan penelitian ilmiah bahwa target perekrutan jaringan radikal banyak berasal dari kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi umum. Bahkan juga terjadi di Perguruan Tinggi Islam seperti UIN/IAIN/STAIN terutama di fakultas-fakultas umum. Mereka menjadi target yang empuk dan efisien untuk menanamkan dan menginfiltrasi mereka dengan doktrin-doktrin paham radikalisme keagamaan, seperti Pancasila tidak sesuai syariat, Indonesia negara *Thogut* (zalim) yang mesti diperangi dan sebagainya.

Kedua, ketidaktegasan kampus. Selama ini Perguruan Tinggi Umum maupun Islam tidak begitu tegas untuk menangkal kelompok-kelompok radikal yang bertebaran di kampus. Pihak kampus sangat terbuka dengan organisasi-organisasi dakwah kampus yang eksklusif. Misalnya organisasi-organisasi intra kampus yang melakukuan mentoring pemahaman Islam secara tertutup dan penguasaan mesjid-mesjid secara sepihak. Sebaliknya, kampus sangat sensitif terhadap organisasi-organisasi ekstra yang cenderung moderat dan terbuka seperti PMII, HMI, IMM, GMNI, PMKRI. Sikap lunak dari Perguruan Tinggi ini yang kemudian membuat mereka leluasa dan tanpa tekanan untuk menebarkan paham-paham radikal di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang belajar di fakultas-fakultas umum.

Ketiga, pemerintah kurang campur tangan dalam penangan radikalisme intelektual. Pemerintah selama ini tidak memiliki Blue Print pengawasan persoalan kurikulum SD sampai Universitas ihwal pencegahan paham-paham radikalisme. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, bahkan bisa melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seharusnya bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk membuat program keseragaman pemahaman kebangsaan. Hal ini bisa dilakukan ketika pengenalan orientasi akademik dengan sosialisasi pemahaman ihwal toleransi, moderasi, inklusivisme, multikulturalisme dan bahaya radikalisme. Sehingga sebelum para siswa ataupun mahasiswa menggeluti dinamika di sekolah dan kampus, upaya preventif telah dilakukan.

Keempat, faktor ketimpangan dalam sektor sosial, ekonomi dan politik. Harus diakui, ketidakadilan dalam ketiga sektor tersebut membuat konflik horizontal antar masyarakat semakin kompleks. Masyarakat semakin terjepit dan tertekan dalam persoalan kehidupannya. Dampaknya, orang atau kelompok yang tidak berdaya ini sangat mudah untuk didoktrin dengan paham-paham radikal dan tindakan anarkis sehingga mengesampingkan aturan-aturan hukum. Tak terkecuali adalah kalangan intelektual. Masalah ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada ketimpangan dari ketiga sektor tersebut.

Upaya PMII

Kompleksitas persoalan radikalisme di kalangan intelektual ini menuntut sikap konkrit yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa yang terbuka dan moderat, termasuk di antaranya adalah PMII. Sebagai organisasi mahasiswa yang besar yang sangat ramah dan serius terhadap kepentingan bangsa (*national interest*), PMII harus menangkal fenomena radikalisme intelektual ini. Bagaimana menangkalnya?

Pertama, meningkatkan pengkaderan. PMII harus meredefinisi makna pengkaderan. Pelaksanaan pengkaderan jangan hanya sebagai rutinitas organisasi yang berlangsung secara formal dengan berjalan sesuai program kerjanya, tetapi pengkaderan harus dimaknai sebagai sebuah ijtihad dan upaya serius untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa agar tidak terjangkit virus infiltrasi kalangan paham fundamental dan radikal. Hal ini penting, mengingat banyak kalangan mahasiswa yang berbasis keagamaan dangkal, sebagaimana terdapat pada Perguruan Tinggi umum. PMII sangat kewalahan melakukan kaderisasi mahasiswa di kampus-kampus umum. Faktanya, saat ini basis masa dan kader PMII sebagian besar terdapat di Perguruan Tinggi yang berbasis Islam. Oleh karena, itu PMII harus serius untuk menyasar mahasiswa yang terdapat di Perguruan Tinggi umum atau di fakultas-fakultas umum.

Kedua, bergabung dan bekerjasama dengan organisasi ekstra dan intra kampus. Sudah saatnya PMII mempererat hubungan dan kerjasama antar organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra

kampus. Persaingan-persaingan yang bersiftat wajar, misalkan perebutan jabatan lembaga-lembaga kemahasiswaan kampus, kaderisasi formal dan sebagainya harus ditempatkan secara proporsional. Tuntutan gelora gerakan bersama-sama terhadap hal-hal yang prinsipil, seperti persoalan radikalisme intelektual merupakan masalah bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama pula. Di luar, PMII bisa menginisiasi untuk mempererat barisan bersama organisasi-organisasi ektra kampus moderat seperti HMI, IMM, GMNI, PMKRI dan organisasi primordial. Di dalam, PMII bisa bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga kampus seperti HMJ, DEMA, SEMA dan UKM untuk mengontrol gerakan-gerakan radikal di kalangan mahasiswa internal kampus.

Ketiga, revitalisasi gerakan. Fenomena radikalisme intektual ini sejatinya menjadi refleksi bagi PMII atas gerakan yang selama ini dilakukan. Gerakan-gerakan PMII yang kurang baik dan memberi asumsi negatif di kalangan masiswa lain harus segera ditinggalkan. Sudah saatnnya PMII meraih simpati dari kalangan mahasiswa. Banyak cara yang bisa dilakukan misalnya dengan merebut Indeks Prestasi (IP) tinggi, berprestasi dalam kemampuan non akademik, berperilaku dan berakhlak yang baik dan sebagainya. Dari sikap itulah PMII akan memiliki nilai tawar bagi para mahasiswa. Jika PMII bisa melakukan dengan baik, maka lembaga-lembaga dakwah akan minim peminat, karena apa yang mahasiswa butuhkan akan dipenuhi oleh organisasi moderat, toleran, inklusif dan terbuka bernama PMII.

Semoga PMII bisa menjawab tantangan radikalisme intelektual ini.

Bab 3

PMII dan Kebangsaan

ASAS PANCASILA SEBAGAI KOMITMEN KEBANGSAAN PMII

Pada 22 Juli 1984 di Ciloto, PMII turut serta dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), saat itu PMII menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Sebuah pernyataan monumental yang menempatkan aspek kebangsaan di atas solidaritas primodial lainnya, termasuk Islam. Pilihan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi ini menjadi komitmen PMII untuk memperteguh cara pandang kebangsaannya, sekaligus sebagai keseriusan PMII pada pematangan konsep negara

yang lepas dari simbol-simbol Islam dalam struktur-struktur kekuasaan negara.

Pada kongres PMII ke-8, asas Pancasila dipertegas sebagai satu-satunya asas organisasi PMII dan tercantum dalam bab II pasal 2 Anggaran Dasar PMII. Sedangkan ideologi *Ahlussunnah wal Jamaah* yang awalnya merupakan asas PMII, diputuskan menjadi sebuah tujuan dan usaha. Keputusan ini tidak berarti PMII mengesampingkan Islam, tetapi menjadikan Islam sebagai aqidah. Asas Pancasila tidak sedikitpun menggesar teologis keagamaan PMII terhadap Islam.

Argumen penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi PMII ini mencakup dua hal sekaligus. *Pertama*, argumen kebangsaan. Sikap ini mempertegas bahwa cara pandang PMII terhadap kebangsaan senantiasa dijalankan secara konsisten. PMII menolak terhadap wacana Negara Islam (*islamic state*), penerapan hukum-hukum syariat Islam pada konsep negara, penerapan Piagam Jakarta dan wacana lain yang membawa Islam pada struktur kekuasaan. Poinnya, PMII menolak terhadap keberadaan simbol-simbol Islam ke dalam struktur kekuasaaan negara.

Kedua, argumen teologis. PMII menjadikan Islam sebagai Akidah yang dipegang dalam landasan teologis, baik dalam tradisi keagamaan maupun dalam ruang gerakannya. PMII tidak membawa simbol atau gerakan atas nama Islam dalam menempatkan para kadernya pada lembaga-lembaga kekuasaan negara. Dengan

demikian, asas Pancasila tidak sedikitpun menggeser akidah *Ahlussunah wal Jamaah* PMII.

Pilihan asas organisasi ini merupakan komitmen PMII bahwa sejak awal berdirinya, PMII menempatkan komitmen kebangsaan di atas komitmen-komitmen yang lain, baik komitmen primordial ataupun komitmen keagamaan. Sehingga dalam perjalannya, PMII selalu mengedepankan isu-isu demokrasi, pluralisme, toleransi, moderasi, Hak Asasi Manusia (HAM), serta menolak wacana negara Islam.

Sebagai mahasiswa yang mempunyai latar belakang NU dan pesantren, PMII memiliki corak pemahaman yang terbuka bagi masuknya perspektif di luar Islam. Sehingga pemahaman keagamaan PMII menjadi inklusif, dan tidak ekslusif sebagaimana kalangan fundamentalis dan konservatif keagamaan seperti Hizbut Tahrir, Lembaga Dakwah Kampus dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan komitmen PMII yang memilih wacana keislaman tidak dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan negara. PMII memandang negara harus netral dari agama. Dalam pemahamannya terhadap kepentingan bangsa (*national interest*) PMII memiliki perumusan substansial dari ke lima sila yang terdapat di dalam Pancasila tersebut.

Rumusan Sila Ketuhanan

Pertama, tentang ketuhanan. PMII memiliki pandangan bahwa Negara Indonesia dengan pengamalan sila ketuhanan tidak berarti menjadi negara yang bersifat '*a religious*'. Akan tetapi, dengan sila ketuhanan ini maka akan tercipta budi pekerti kemanusiaan yang

luhur yang mencakup kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang memeluk agama-agama berbeda. Dasar moral yang luhur ini juga dianjurkan oleh Islam.

Pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘Negara Islam’ (*islamic state*) berarti tidak akan menjadikan negara persatuan. Jika menjadikan Indonesia sebagai ‘Negara Islam’ maka akan timbul soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen, golongan agama Budha dan agama-agama lain. Golongan-golongan agama kecil tersebut tentu tidak akan bisa mempersatukan kelompoknya dengan negara.

Oleh karena itu, negara tidak boleh berpihak pada satu golongan atau satu agama saja. Gus Dur menegaskan pentingnya kesamaan perlakuan oleh negara terhadap agama. Di dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi* (2006) ia mengatakan bahwa di mata Undang-undang (bukan sisi akhiratnya), semua agama itu diperlakukan sama menurut negara. Agama-agama dan kepercayaan harus diperlakuakn sama di muka Undang-undang. Adapun nanti di akhirat adalah urusan Gusti Allah yang sudah mengatakan *Innaddina ‘indallah al-Islam*.

Selaras dengan apa yang dikatakan Gus Dur, PMII memiliki pandangan bahwa perlakuan Negara Indonesia terhadap warganya harus sama karena mereka merupakan warga negara Indonesia. Tidak boleh ada warga kelas satu, kelas dua dan seterusnya hanya karena berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda

paham pemikiran dan perbedaan yang lainnya. Semua di mata Undang-undang harus sama.

Gus Dur juga selalu mengajak kepada umat Islam untuk berlaku adil pada siapapun, termasuk non-Muslim dan kaum minoritas. Sikap seperti ini selaras dengan firman Allah di dalam surah al-Ma'dah ayat 15, *"Jangan sampai ketidaksukaanmu tehadap suatu kaum membuat kamu bertindak tidak adil".* Oleh karena itu PMII selalu mendorong landasan konstitusional yang memberikan jaminan perlindungan dan persamaan hak bagi setiap pemeluk agama agar terus diperkuat oleh kebijakan pemimpin negara.

Tokoh emansipasi perempuan R.A. Kartini menyatakan bahwa saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah prinsip dasar semua agama. Semangat ketuhanan yang penuh welas asih juga ditekankan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada 1936. Hadratussyaikh mengatakan manusia harus bersatu agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan dan terhindar dari kehancuran dan bahaya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa welas asih harus ditingkatkan dengan menembus batas keyakinan, ideologi, ras, etnis bahkan agama. Apalah artinya ritual keagamaan teratur dilakukan jika tidak ada welas asih, akhlak buruk, tetap rakus, kikir, tidak mau memperhatikan yang miskin dan susah. Apalah artinya taat berpuasa jika tetap membicarakan keburukan orang lain, berdusta, menipu dan sombong. Oleh karena itu welas asih merupakan kunci dari hidup dalam keberagaman.

Peningkatan jumlah rumah ibadah dan penyelenggaraan berbagai ritual keagamaan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesalehan sosial, toleransi keagamaan, dan bersih dari perilaku korupsi. Agama seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (*khalifah*) di muka bumi ini, bukan melahirkan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan dan intoleransi.

Pada akhirnya, warga PMII percaya bahwa semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan akan menghasilkan ketulusan pertolongan bagi mereka yang dirundung kesusahan, kemelaratan dan penderitaan, melampaui batas suku, bahasa, etnis, aliran dan keagamaan.

Rumusan Sila Kemanusiaan

Kedua, tentang kemanusiaan. PMII memiliki komitmen untuk menjaga prinsip dasar persaudaraan universal yang menjadi landasan untuk membangun negara-bangsa yang humanis. Dengan prinsip kesamaan kemanusiaan yang adil dan beradab, komitmen kemanusiaan dan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia harus menembus batasan-batasan lokal, nasional ataupun regional; menjangkau persaudaraan antar manusia dan antar bangsa secara global.

Gus Dur mengatakan bahwa ”*yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan*”. Lebih lanjut Mahatma Gandhi juga sering menegaskan perkataannya yang familiar “*My Nationalism is Humanity*”. Begitu juga Bung Hatta menyebut “*Persaudaraan manusia*

dan bangsa-bangsa di atas dunia ini sebagai cita-cita tertinggi". Artinya, kemanusiaan yang saling menghargai dan bersaudara serta memandang semua manusia sama merupakan cita-cita besar yang harus terwujud. Pernyataan dan sikap selaras juga ditegaskan oleh Syahrir bahwa ia tidak membenci Belanda, ia hanya membenci kolonialisme dan imperialisme, bukan terhadap orang Belanda sebagai manusia.

Undang-undang 1945 juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Pada alenia pertama pembukaan UUD 1945 langsung dibuka oleh pernyataan yang lantang akan pentingnya kemerdekaan bagi semua bangsa sebagai basis perwujudan hak dasar dalam kerangka pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*" Alinea pertama ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi segala bangsa dan warganya tanpa kecuali.

Pada alinea kedua juga ditekankan perihal perjuangan nasional meraih kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) serta idealisasi kemanusiaan di dalam kemerdekaan. Alinea ketiga mengembalikan derajat manusia pada fitrah kesetaraannya dalam berkat penciptaan Tuhan yang menghendaki suasana kehidupan kebangsaan yang bebas; dan dengan itu Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya (*declaration of independence*).

Alinea keempat mengandung dua hal penting. *Pertama,* membawa isu-isu kemanusiaan kepada tujuan negara dalam kerangka pemenuhan kebahagaiaan dan hak kolektif maupun perseorangan dalam kehidupan nasional maupun internasional. *Kedua,* menjangkarkan isu-isu kemerdekaan pada Dasar Negara, khususnya dasar kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Dari sinilah kita tahu bahwa Pancasila, Undang-undang dan Konstitusi Proklamasi memiliki semangat yang kuat untuk memuliakan HAM, namun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kemunusiaan yang adil dan beradab masih jauh dari cita-cita tersebut. Berlalunya kolonialisme tidak otomatis melenyapkan praktik-praktik penindasan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbagai bentuk pelanggaran jutru kerap terjadi baik dilakukan oleh aktor negara maupun luar negara.

Dalam konteks mutakhir ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemelaratan, dirundung ketakutan, konflik sosoial, penindasan penguasa akibat proyek kapitalisme ekonomi global, ketimpangan hukum, diskriminasi terhadap kelompok kecil, agama, ras, keyakinan dan persoalan kemanusiaan lain yang sangat kompleks. Di tengah-tengah kekacauan situasi demikian, PMII harus hadir untuk membangun prinsip kemanusiaan yang menyatukan masyarakat berdasarkan cinta sesama, suatu tatanan sosial di mana masyarakat saling mengerti dengan welas asih sehingga tercipta perdamaian.

PMII harus tetap berkarya dan mengabdi di tengah beratnya tantangan hidup masyarakat. PMII mempunyai komitmen penanaman spirit kemanusiaan guna mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan hanya sekedar panggilan jiwa, namun juga harus diyakini sebagai pribadi yang memiliki landasan teologi vertikal-horisontal, serta ajaran-ajaran Islam sebagai agama kasih sayang di bumi ini. Manusialah sebagai khalifah dalam menegakkan keadilan untuk menjaga martabat kemanusiaan.

PMII harus selalu menjadi kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar memenuhi tiga kewajiban dasar keadilan negara terhadap masyarakatnya, yakni kewajiban untuk menghormati (*respect*) kebebasan individu; untuk memenuhi hak tersebut baik melalui fasilitas (*facilitation*) atau melalui penyediaan akses (*providing*) dan pemenuhan kesejahteraan yang mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Poinnya, pengejewantahan sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar untuk menjalin persaudaraan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Tindakan-tindakan seperti kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan hidup merupakan kenyataan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, oleh karena itu tindakan-tindakan tersebut harus dihapus dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan Sila Persatuan

Ketiga, tentang persatuan. Semangat PMII dalam menjunjung persatuan terpatri dalam keyakinannya bahwa Indonesia tidak didirikan untuk satu orang atau satu golongan saja. Bukan untuk orang kaya, bukan pula untuk bangsawan. Bukan untuk Islam, Kristen, Budha dan agama-agama lainnya. Bukan negara Jawa, bukan negara Sumatera, Bali, Sulawesi dan etnis-etnis lainnya. Tetapi bangsa Indonesia didirakan untuk menjadi persatuan dari berbagai suku, etnis, bahasa, agama semuanya melebur menjadi satu "Indonesia".

Di dalam jiwa sanubari PMII selalu tertanam kecintaan dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Bagi PMII, dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa, dan negara tidak boleh kurang dari kecintaan orang lain terhadap Indonesia. Bahkan PMII bertekad menjadi teladan dan inspirasi bagi mahasiswa dan kelompok lain sebagai suri tauladan yang mencintai tanah air. PMII bertekad menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis sejati. Maka tak heran jika pada akhir kata PMII memiliki makna "Indonesia" sebagai sebuah komitmen nasionalisme sejati.

Mencintai tanah air berarti juga ekspresi kecintaan, kesetiaan dan ketaatan warga PMII pada Allah. Sebab, tanah air ini diamanahkan kepada manusia untuk dijaga, dirawat, digunakan untuk kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ada aspek keimanan dalam komitmen PMII mencintai tanah air. Sebagaimana sering

ditegaskan Kyai Wahab Chasbullah bahwa "*Cinta Tanah Air merupakan bagian dari keimanan.*"

Rasa memiliki dan mencintai Bangsa harus tercermin dari kesanggupan untuk merawat persatuan dan keragaman. Semangat ini sebenarnya telah mengkristal dalam slogan negara yang dinyatakan dalam ungkapan "Bhineka Tunggal Ika". Tonggak penting dalam menumbuhkan persatuan dalam keragaman itu tercermin pada Sumpah Pemuda yang di dalam deklarasi tersebut terdapat pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang, baik bersifat etnis dan keagamaan. Ada etnis Sumatera, Jawa, Ambon, Batak dan lain-lain, ada pula pemuda Islam, Kristen, Thionghoa, dan sebaginya.

Dengan tekad Sumpah Pemuda untuk "Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etnis keagamaan yang bersifat lokal dan terpecah mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik bersama yang bersifat lintas kultural bernama "Indonesia".

Semangat persatuan dalam keragaman juga tercermin pada detik-detik menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selain diwarnai heroisme pergerakan pemuda, juga terdapat beragam latar etnis dan agama yang mendorong percepatan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan keluhuran budi para pendiri bangsa dalam mengembangkan kepekaan rasa untuk menghormati keragaman Indonesia.

Ada banyak cara untuk mengekspresikan kecintaan pada Bangsa. Nasionalisme tidak hanya ditujukan untuk memerangi keburukan, tetapi juga untuk menghadirkan kebaikan. Nasionalisme tidak hanya bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati bukan sekedar mempertahankan, melainkan juga tindakan memperbaiki keadaan negeri.

Kecintaan pada bangsa bisa diekspresikan dalam bentuk solidaritas sosial dalam menolong korban-korban bencana tanpa memandang suku dan agama; kepedulian untuk turun aksi ke jalan dalam rangka mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan; mendorong peran aktif tokoh agama untuk meningkatkan kemerosotan moral; mendorong kesungguhan aparatur hukum dalam pemberantasan korupsi; tanggung jawab media untuk mengembangkan demokrasi yang sehat; dan berbagai bentuk ekspresi lainnya.

Dari itu semua, PMII memiliki keyakinan bahwa semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunianya. Rasa mencintai Bangsa harus tercermin dalam semangat persatuan dalam keragaman serta kekeluargaan dengan semangat gotong royong. Pada akhirnya, rasa mencintai dan memiliki akan menciptakan persatuan, kekeluargaan dengan semangat kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Rumusan Sila Kerakyatan

Keempat, tentang kerakyatan. Dalam rumusan sila kerakyatan, PMII memiliki pandangan bahwa sistem demokrasi harus dipahami sebagai cara mencintai sesama manusia dengan menghormati setiap warga sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek tindasan kekuatan pemaksa atau kekuatan modal, bukan sekedar tekhnis, tetapi kepribadian dan cita-cita nasional. Sehingga akan melahirkan demokrasi yang adil tanpa pandang bulu, mementingkan rakyat secara umum, dan memegang rasionalitas berdasarkan objektivitas keadilan.

Asas kerakyatan ini tidak hanya patut menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga pantas menjadi landasan etis untuk mendamaikan seluruh kepentingan bersama yang lebih besar. Sejak awal berdirinya, PMII terus membuka jalan untuk mengimplementasikan wacana-wacana sosialisme tanpa perjuangan kelas. Dalam semangat ini, penguasa dan rakyat dianggap saling bergantung, berbeda tetapi tidak terpisahkan. Ki Hadjar Dewantara menyebut sebagai "Kawula Gusti".

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat sangat penting dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan). Hal ini selaras dengan tujuan pertama kemerdekaan Indonesia yakni dasar kedaulatan rakyat sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara. Oleh karena itu, dalam demokrasi permusyawaratan, kedaulatan rakyat sangat dimuliakan.

Sejak awal, cita-cita kesederajatan kewargaan dan daulat rakyat ini bergema kuat dalam sanubari PMII. Tradisi partisipasi rakyat melalui

institusi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat Nusantara. Kerelaan menerima keragaman dan latar primordial juga telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan Nusantara sebagai tempat persilangan antarbudaya. Secara historis-sosiologis, pengalaman ketertindasan dan diskriminasi sebagai kaum terjajah dari kolonialisme membangkitkan semangat emansipasi dan partisipasi dalam politik dan ekonomi tanpa membedakan asal-usul primordial.

Dalam rangka memuliakan kedaulatan rakyat, langkah yang harus dilakukan adalah menyediakan wahana untuk menampung apirasi rakyat, yakni dengan partai politik. Sayangnya, partai politik dalam konteks mutakhir dirasa tidak relevan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, mengingat yang diperjuangkan partai politik saat ini sangat pragmatis pada satu golongan dan ideologi semata tanpa pertimbangan aspirasi rakyat secara umum.

Memang benar, upaya mewujudkan kedaulatan rakyat bukanlah ikhtiar yang mudah. Ada titik stagnasi bahkan kemunduran di tengah maraknya dinamika kepentingan. Ada tarik menarik antara "tata nilai" dan "tata kepentingan" yang dibangun oleh dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Itulah sebabnya, kedaulatan rakyat secara mutlak agaknya masih merupakan jalan panjang yang tidak bebas dari berbagai rintangan dan hambatan.

Rintangan dan hambatan yang dimaksud misalkan pada saat ini para pemimpin rakyat secara umum sudah tidak sanggup lagi bekerja betul-betul untuk kepentingan rakyat. Kedudukan dan kursi sudah

menjadi tujuan dan tidak lagi menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat. Maka inilah ancaman nyata negara Indonesia bahwa demokrasi akan tenggelam dalam koalisi dan kemudian koalisasi akan dimakan oleh anarki.

Oleh karena itu sebagai warga PMII harus tetap berada pada jalur independensi untuk terus memperjuangan kedaulatan rakyat sebagai sebuah tata nilai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga PMII merupakan salah satu elemen harapan rakyat. Khususnya harapan untuk memperjuangkan tercapinya kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Di tengah dampak negatif-represif dari gempuran liberalisme-kapitalisme dan foedalisme, PMII sebagai kaum terpelajar harus terus memperjuangkan semangat kadilan dan kolektivisme dalam perekonomian sebagai antitesis terhadap liberalisme-kapitalisme perekonomian dunia. memang kewajiban warga negara terhadap negaranya harus tetap dikedepankan, sekaligus menjunjung tinggi hak-hak dasarnya, agar negara kekeluargaan tidak menjelma menjadi negara kekuasaan.

Rumusan Sila Keadilan

Kelima, tentang keadilan. PMII menekankan pentingnya negara menunaikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-'adl* (adil) yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*),

tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial.

Prinsip keadilan dan kesejahteraan ini harus mengarah pada politik anggaran yang merata, pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesempatan memperoleh pendidikan, kesejahteraan perekonomian sosial, dan perlindungan negara atas fakir miskin dan anak-anak terlantar. Poinnya, negara sebagai penguasa atas bumi, air dan kekayaan alam Indonesia harus mempergunakan kekuasaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Gema keadilan dalam sanubari rayat Indonesia sangat berdimensi "harapan". Setelah penjajahan kolonialisme berlalu ternyata penderitaan dan kemiskinan masih menghantui rakyat. Pemenuhan terhadap keadilan dan kesejahteraan harus menjadi topik utama yang terus diperjuangkan warga PMII. Oleh karena adanya berbagai kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan ini merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan pemerintah.

Salah satu langkah vital pemerintah untuk menegakkan keadilan adalah dengan memberi pendidikan setinggi-tingginya terhadap rakyatnya. Hal ini bukan hanya penting sebagai cara memanusiakan manusia, tetapi juga memiliki nilai pragmatik dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat. Kata Ki Hadjar Dewantara, kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dari para generasi bangsa itu sendiri. Ia mempunyai semboyan indah "Belajar seumur hidup, belajar dari kehidupan".

Dalam hal ini PMII sadar bahwa pendidikan merupakan wahana untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa maju, bermartabat dan sejahtera. Pendidikan menjadi hal paling vital dan merupakan kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa dan umat manusia.

Keadilan dan kesejahteraan bukan saja harus dirasakan oleh setiap warga pada saat ini, tetapi juga harus bisa diteruskan bagi generasi masa depan. Oleh karena itu, keadilan harus antar-generasi. Diperlukan sebuah usaha pembangunan berkelanjutan dengan menumbuhkan karakter kemandirian, kegigihan etos kerja, sikap hemat, menghindari keborosan serta komitmen pelestarian lingkungan.

Sayangnya, untuk menuju langah keadilan bagi rakyatnya, justru Indonesia dipaksa menggunakan sistem liberalisme-kapitalisme ekonomi politik yang tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang hanya pandai melaksanakan segala yang kecil, dipaksa dengan asas '*free competition*'. Maka jangan diharapkan bahwa masyarakat dapat naik kelas. Karena kultur masyarakat Indonesia jauh berbeda dengan kultur masyarakat eropa yang memang sangat cocok dengan sistem kapitalisme. Oleh karena itu, sistem koperasi dirasa relevan untuk meningkatkan selangkah demi selangkah perekonomian rakyat.

Karl Bertens, seorang pemikir kemasyarakatan menyatakan bahwa suatu masyarakat tidak pantas disebut adil bila para warganya tidak mempunyai pekerjaan, tidak mendapat pendidikan, tidak

memperoleh perawatan kesehatan yang dibutuhkan atau hak-hak sosial lain mereka belum dipenuhi.

Memang, pada satu sisi terdapat sejumlah kemajuan dalam beberapa sektor, seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, namun juga kehilangan begitu banyak sumber daya alam. Perekonomian dan pembangunan yang semakin maju menjadi sia-sia jika kesenjangan sosial menjadi wajah nyata rakyat Indonesia. Komitmen penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum tetap merupakan simpul terlemah. Pragmatisme pribadi membuat sumber korupsi dan alat kepentingan kapitalisme dengan mengorbankan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

PMII harus terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat tanpa pandang bulu. Oleh karena kehidupan masyarakat yang adil dan makmur merupakan wujud dari kesejahteraan dan bukti konkrit implementasi idealitas Pancasila. Dengan implementasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila keadilan sosial, maka diharapkan jeritan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu kemiskinan, penderitaan dan keterbelakangan bisa menemukan impian kebahagian atas kehidupannya.

Dari argumentasi rumusan Pancasila tersebut, maka dirasa sangat relevan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, itu semua semata-mata untuk kepentingan bangsa secara umum. PMII meyakini bahwa rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam di kalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan kemerdekan pada 1945. PMII juga meyakini bahwa dalam momen

yang menentukan semacam itu, para pemimpin nasional yang sebagian besar beragama Islam tidak akan menyetujui setiap rumusan yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip dan doktrin Islam.

Oleh karena itulah PMII menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi yang juga menjadi bukti konkrit dari aplikasi nilai-nilai kebangsaan PMII. Sejak mula berdirinya PMII memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, justru di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran islam, sehingga mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, akan menciptakan tatanan masyarakat yang bernilai Islam.

Bab 4

PMII dan Keilmuan

MENDORONG INDONESIA MENJADI KIBLAT KEILMUAN ISLAM DUNIA

Saat ini negara-negara Timur Tengah (*Midle East*) yang menjadi muara keilmuan Islam dunia sedang dilanda konflik sektarianisme yang sangat dahsyat. Negara-negara tersebut adalah Saudi Arabia, Mesir, Yaman, Yordania, Irak dan sebagainya. Padahal negara-negara sebagaimana disebut selama ini menjadi tujuan dan tempat intelektual muslim Indonesia belajar. Tak sedikit misalnya para intelektual, ulama, pemimpin keagamaan, dan tokoh-tokoh Indonesia jebolan kampus-kampus di Timur Tengah. Sebutlah

semisal Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan masih banyak ulama-ulama lainnya.

Akan tetapi, dengan melihat konteks saat ini yang mana negara-negara tersebut sedang dilanda konflik berkepanjangan dan tak kunjung usai, apakah masih relevan untuk dijadikan tempat yang ideal dalam pembelajaran dan pengembangan keilmuan Islam dunia? menurut penulis sudah tidak tepat, Mengapa ? Karena negara-negara yang sedang berkonflik tidak akan stabil dalam segala sektor, baik dalam sektor politik, ekonomi, pendidikan dan kondisi sosial. Sehingga untuk menjadi tempat pendidikan dan pembelajaran keilmuan sudah tidak tepat baik dalam studi agama maupun saintifik.

Jika akarnya adalah konflik, maka tidak mungkin belajar tanpa melibatkan diri di dalam konflik tersebut. Bagaimana kemudian kurikulumnya, para ustadnya, profesornya, perangkat-perangkat buku yang harus dipelajari, buku-buku yang diperbolehkan, buku-buku yang tidak diperbolehkan, buku-buku yang harus dibaca, buku-buku yang tidak boleh dibaca dan seterusnya. Semua itu akan dibingkai dalam konflik sektarianisme agama.

Sebagai contoh misalkan belajar di Saudi Arabia yang sangat getol menyuarakan semangat anti Syiah. Maka tidak mungkin mengabaikan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya yang ada di sana yang membungkus pendidikan dengan propaganda Syiah bukan bagian dari Islam. Ustad-ustadnya akan didominasi golongan

yang anti Syiah, buku-bukunya akan dipenuhi keilmuan-keilmuan yang non-golongan lain. Lebih parahnya, konflik tersebut dibungkus sedemikian rupa menjadi konflik agama, seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), al-Qaeda dan sebagainya. Dalam Keadaan seperti itu, maka sektarianisme agama dan propaganda konflik sangat mudah terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan muara keilmuan Islam baru di dunia ini. Dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang terbuka dalam menyikapi perbedaan aliran keagamaan. Tentu, untuk menjawab tantangan era globalisasi ini diperlukan lembaga yang moderat, toleran dan ramah terhadap perbedaan golongan. Maka pertanyaannya adalah siapa dan di mana pendidikan yang relevan untuk konteks saat ini? Maka jawabannya adalah Indonesia, mengapa? Mari kita lihat ada beberapa alasan berikut.

Pertama, sangat banyak lembaga-lembaga Perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang ramah terhadap perbedaan keyakinan. Indonesia sudah memiliki lembaga-lembaga munafid semacam Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), belum lagi lembaga Perguruan Tinggi Islam swasta, semacam Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Dari sinilah Indonesia hadir untuk menjadi laboratorium baru muara keilmuan Islam dunia.

Kedua, Indonesia memiliki para ulama dan dosen-dosen yang mempuni di bidangnya. Ulama-ulama di Indonesia tidak terikat

dengan misi aliran keagamaan tertentu, karena secara umum berpaham Sunni, tetapi tetap toleran dan ramah terhadap berbagai golongan yang ingin menimba ilmu di Indonesia. Para ulama di Indonesia juga cenderung inklusif terhadap keilmuan-keilmuan baru yang bersumber pada peradaban modern, baik keilmuan yang berkembang dari Barat maupun dari Timur. Di samping itu, ulama-ulama di Indonesia tidak kalah keilmuannya dibandingkan para ulama di negara-negara Timur Tengah. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia, mengingat ulama-ulama di Timur Tengah sangat rentan dengan konflik sektarianisme keagamaan.

Ketiga, Indonesia juga semakin maju dalam membangun iklim perdamaian di dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan. Lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Indonesia tidak dicemari dengan wacana-wacana sektarianisme. Hanya saja masih ada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan menjamur yang berasal atau disponsori oleh negara Timur Tengah betul-betul menyuarakan wacana sektarianisme agama, anti Syiah, anti bid'ah dan mudah memberi label kafir. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah dan para ulama Indonesia untuk membersihkan Indonesia dari infiltrasi lembaga-lembaga sponsor Timur Tengah tersebut agar corak keagamaan yang terdapat di Indonesia tidak ternodai oleh puritarianisme keagamaan. Hal ini penting, agar terciptanya sebuah iklim intelektual yang sehat untuk membangun dialog, toleransi, keterbukaan dan moderasi.

Keempat, Indonesia diakui sebagai negara muslim terbesar dengan warisan kebudayaan yang paling baik yakni moderat dan

toleran. Indonesia juga memiliki dua organisasi Islam besar bernama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sangat ramah terhadap perbedaan keyakinan. Di samping itu, Indonesia telah menjadi miniatur sebuah sintesa antar peradaban demokrasi liberal di Barat dan universalisme Islam yang moderat di Indonesia. Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi dan Islam tidak bertentangan bahkan bisa berjalan secara bersamaan. Inilah Islam Indonesia yang menyediakan kekayaan referensi yang luar biasa untuk merepons secara konstruktif isu-isu yang berkembang seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, keadilan, toleransi, pluralisme, kesetaraan jender dan hubungan antar umat beragama.

Dari alasan-alasan tersebut, maka pertanyaannya adalah mengapa harus belajar ke Timur Tengah? Tentu saja ini merupakan pertanyaan yang sinis, tapi yang dimaksud adalah sudah saatnya kita harus memulai untuk mewacanakan bahwa Timur Tengah bukan lagi menjadi tempat pusat peradaban keilmuan yang relevan untuk pelajar-pelajar Indonesia dan pelajar-pelajar muslim lain di seantero dunia. Hal itu karena kurikulum yang dipengaruhi oleh semangat konflik dan sektarianisme akan memengaruhi output pelajar yang dihasilkan.

Oleh karena itu, PMII memiliki tantangan besar untuk turut mendorong Indonesia menjadi kiblat keilmuan Islam dunia. Sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat sangat toleran dan moderat, sudah saatnya PMII aktif mendorong mahasiswa-mahasiswa lain untuk bersma-sama menyuarakan Indonesia sebagai kiblat keilmuan Islam dunia. PMII juga bisa mendorong lembaga-lembaga pendidikan

di Indonesia untuk tidak membatasi kurikulum pengajaran pendidikan hanya pada satu sekte saja, tetapi semua sekte harus diajarkan di Indonesia. Dimulai dari sinilah akan tercipta suatu tatanan peradaban keilmuan Islam yang lebih relevan untuk dikembangkan di masa depan. Maka dengan itu, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk menjadi pusat peradaban Islam di dunia.

SIKAP KADER PMII DI KAMPUS

Pada kegiatan Mapaba PMII Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora (Komfaka) yang diselenggarakan di Depok, 9-11 Oktober 2015, ada pertanyaan peserta yang menurut saya substantif untuk dijawab. Kira-kira pertanyaannya seperti ini, “bagaimana cara kita bersaing di ranah kampus dengan mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi lain?”

Pertanyaan itu sangat penting dijawab karna *pertama*, seakan-akan pertanyaan itu suatu sikap adanya dikotomi antara organisasi PMII dan organisasi mahasiswa lain. *Kedua*, pertanyaan itu

juga mengindikasikan seakan-akan persaingan PMII hanya dengan organisasi mahasiswa lain. *Ketiga*, pertanyaan itu mengindikasikan bahwa seolah-olah PMII di kampus hanya untuk bersaing, jika dalam intelektualisme dan moralitas tentu sangat baik, tetapi jika di kampus adalah persaingan kotor dengan perebutan kekuasaan, yang kemudian berlanjut pada kebencian, maka menurut saya akan sangat riskan.

Sikap PMII

Sebagai mahasiswa dan kader PMII, sikap yang paling utama dipertahankan adalah idealisme dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan intelektual. Oleh karena basis di dalam ruang lingkup kampus adalah persaingan intelektual, maka kewajiban meningkatkan intelektual mahasiswa merupakan suatu keharusan. Disamping itu adalah nilai-nilai moral. Betapa tidak, mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi adalah harapan nyata untuk kelak menjadi ruh bagi masyarakat ketika kembali ke kampung halaman. Hanya dengan sikap itu gerakan kader PMII akan diperhitungkan oleh semua sivitas akademika yang tergabung di dalam kampus.

Sikap intelektual itu bukan berarti kegiatan yang selalu berkaitan dengan bidang keilmuan yang menjadi bidang mahasiswa di dalam jurusan atau dengan kata lain keilmuan yang hanya ada di SKS, tetapi jauh lebih substantif adalah kepekaan mahasiswa dalam membaca diskursus-diskursus keilmuan yang berkembang. Misalkan, keilmuan ihwal keislaman dan keindonesiaan. Jika dijabarkan maka

ilmu-ilmu seperti filsafat, sosial, budaya, sastra, politik dan sebagainya sangat penting untuk dikembangkan. Sehingga tradisi diskusi tidak normatif atau stagnan, tetapi akan mencapai pada diskusi intelektual yang dinamis dan menambah wawasan keilmuan.

Tidak hanya cukup dengan itu, sikap yang juga harus diambil oleh kader PMII adalah dalam dunia tulis menulis. Dinamika gerakan mahasiswa tidak akan pernah lepas dari kegiatan menulis. Dalam tugas makalah, skripsi, laporan Kuliah Kerja Nyata adalah beberapa contoh dari aktivitas mahasiswa yang selalu terkait dengan dunia tulis. Apalagi jika harus mengungkap gagasan di kampus, koran harian, penelitian dan sebagainya. Oleh karena itu, menulis merupakan kebutuhan pokok mahasiswa serta jalan paling ampuh untuk menyampaikan gagasan. Di samping itu, dengan membiasakan menulis dapat mempertajam nalar kritis mahasiswa dan analisis terhadap penelitian yang akan ditempuh seperti skripsi, tesis, jurnal maupun disertasi.

Dari itu semua bisa dipastikan bahwa persaingan yang paling subtantif di ranah kampus adalah dalam bidang intelektual. Menguasai intelektualisme tidak hanya sebuah bekal untuk menjadi guru, dosen, akademisi, intelektual ataupun cendekiawan, melainkan profesi apapun memerlukan modal ini, karna tanpa modal intelektual rasanya sangat sulit untuk bersaing dalam segala leading sektor, seperti menjadi aktivis, pejabat pemerintahan, guru, dosen, wartawan, pengusaha, advokat, sampai tokoh masyarakat.

PMII dan Ormas Lain

Dalam konteks kaderisasi, tidak ada persaingan politik praktis antara PMII dan organisasi mahasiswa manapun. Perebutan kader untuk bergabung dengan organisasi sama sekali bukan persaingan politis. Hal itu lumrah karna PMII adalah organisasi pengkaderan yang mana mau tidak mau harus mencari dan menyiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan dengan semangat cita-cita mulia organisasi. Jika realitanya persaingan timbul ketika antar organisasi berebut kader, maka hal ini lumrah dan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketidakmampuan pola pikir mahasiswa dalam menyikapi realita kebutuhan organisasi kaderisasi yang sama-sama membutuhkan kader penerus organisasi.

Proses kaderisasi di dalam organisasi ini akan berlanjut pada penempatan-penempatan kader organisasi mahasiswa di pemerintahan kampus, seperti HMJ, Dema ataupun Sema. Di sinilah posisi PMII sangat relevan untuk turut andil dalam menempatkan kader-kadernya di lembaga-lembaga pemerintahan kampus. Lagi-lagi ini bukan persaingan politis. Organisasi mahasiswa berbeda dengan partai politik. Jika partai politik bersaing dengan berlomba-lomba mencari pendukung dan masa untuk memperoleh suara di Pemilu, maka ormas mahasiswa hadir untuk menawarkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di lembaga-lembaga kampus. Maka persaingannya adalah persaingan figur yang intelektual dan bermoral dengan berlandaskan kepemimpinan personal yang baik.

Di sinilah organisasi mahasiswa hadir untuk menjadi ruang dan wadah berkumpul bagi mahasiswa dalam segala aspek pembelajaran, baik dalam aspek intelektual, pengabdian, gerakan, termasuk pembelajaran pemerintahan kampus yang juga menjadi contoh pengelolaan negara kecil (*Miniatur of State*). Meskipun ada pembelajaran politik di dalamnya, itu semua hanyalah praktik kecil pengelolaan sistem pemerintahan yang baik, hal ini terwujud dalam Dema (*eksekutif*), Sema (*legislatif*). Namun pembelajaran akademis harus lebih besar dari pembelajaran politis, oleh karena kampus adalah rumah bagi perkembangan intelektual, bukan persaingan politis.

Dari itu semua bisa disimpulkan bahwa sikap sebagai kader PMII adalah mempunyai semangat dalam dunia intelektual. Kader PMII harus bersaing dalam bidang intelektual dengan wawasan yang luas untuk menjaga marwah organisasi dan sebagai kader yang bisa diandalkan. Bukan hanya dengan mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang berbeda, melainkan juga dengan seluruh mahasiswa di dalam kampus, Indonesia bahkan Internasional. Hanya dengan sikap itulah kader-kader PMII akan menjadi pemimpin baik di dalam atau di luar kampus.

MEMBANGUN KESADARAN INTELEKTUAL PMII

Tanggung jawab warga PMII dalam membangun kesadaran intelektual sangat besar. Sebab, PMII terdiri dari mahasiswa yang akan memimpin dan mengembangkan gagasan intelektual di ranah kampus.

Fakta Historis

Di era 80-an kader PMII sebagai ormas mahasiswa yang berbasis kultural pesantren mampu membangun dan mewujudkan perangkat basis intelektual. Para aktivis PMII berupaya terus

menempa diri dan mengasah kepekaan intelektualitasnya. Pada wilayah pengembangan intelektual, PMII mencurahkan perhatiannya pada tema-tema pokok sekitar liberasi, pluralisme, civil society, dan membongkar terhadap ideologi dan doktrin teologi yang membuat masyarakat bisu untuk meminta hak hidup dan berfikir. Dalam hal ini, wacana Open Society-nya Karl Popper, sosialismenya Karl Marx, dan masyarakat komunikatifnya Habermas dijadikan sebagai acuan dalam diskusi di forum-forum PMII.

Di bidang keislaman, PMII sangat gelisah dengan kelompok islamis yang memakasakan panji dan simbol keislaman pada wilayah kebangsaan. Mereka kalangan islamis yang menjadikan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Yusuf al-Qordlowi sebagai landasan utama keagamaan, dilawan dengan pemikiran-pemikiran liberasi penuh pembebasan Muhammad Arkoun, al-Jabiri, Muhammad Thoha, dan Samir Amin.

Dengan landasan intelektual itu, Maka tak heran jika pada tahun 1990-an PMII mampu melahirkan Lembaga Kajian Islam dan Intelektual (LKiS). Pada awalnya kelompok ini secara intensif menjadikan dirinya sebagai tempat menempa diri dan mengasah kepekaan sosial dan intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya LKiS mampu menjadi arus utama gerakan intelektual generasi muda NU melalui program-program kajian, penelitian, penerbitan serta pendidikan.

Dari semua proses intelektualitas PMII itu, maka dapat dijelaskan itulah mengapa mereka banyak berkiprah di dunia

pendidikan, pesantren, universitas, LSM, pers, penerbitan, advokasi, media, gerakan sosial dan keagamaan. PMII membuktikan bahwa ia adalah sentral dan simpul jaringan intelektual di internal kalangan intelektual muda Islam Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PMII sangat sadar bahwa gerakan yang paling riil dan efektif adalah pada wilayah intelektual yang melahirkan pengembangan dan pengabdian masyarakat. Bukan pada wilayah gerakan kekuasaan yang ujunganya adalah orientasi karier yang tinggi bagi individu.

Kesadaran Normatif

Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, kegiatan PMII cenderung normatif. Faktanya, Kegiatan-kegiatan PMII hanya sebatas kegiatan dalam ruang tradisi keagamaan Islam Indonesia. Baik dalam kegiatan formal, nonformal dan informal. Kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, dibaiyah, barzanji, maulid nabi, ziarah kubur dan lain-lain terus diselenggarakan, sementara pendalaman intelektualisme mahasiswa dinomorduakan.

Padahal hemat penulis, kegiatan-kegiatan itu tidak perlu dikhawatirkan akan hilang eksistensinya dan menjauh dari tradisi-tradisi individu warga pergerakan. Karna warga PMII sebagai organisasi mahasiswa yang berbasis sosial NU dan pesantren adalah kelompok gerakan mahasiswa yang paling otoritatif mewarisi tradisi pemahaman keagamaan Islam Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari tradisi pesantren yang menekankan pada penguasaan khazanah klasik, kualitas individu dan sosial, baik dalam pendekatan fikih maupun tasawuf.

Sementara dalam perspektif sosiologis, PMII berangkat dari realitas sosial NU yang tradisional, agraris dan pada umumnya tinggal di daerah pedesaan. Sehingga warga PMII menjadi kader yang memiliki hak waris menjaga tradisi tersebut. Bahkan, mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren juga akan menjadi pondasi untuk menjaga tradisi dan pemikiran Islam Indonesia. Karna mahasiswa yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, secara kultural adalah sama dengan warga PMII. Mereka juga mentradisikan tahil, membaca barzanji, ziarah kubur, dan mengakulturasi ajaran Islam dan tradisi kebudayaan Indonesia. Hanya saja, tidak termasuk bagian dari spektrum komunitas struktural PMII.

Maka pada era mutakhir ini, generasi bangsa bernama PMII sampai kepada kesadaran bahwa terdapat sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Basis dan khazanah intelektual serta potensi-potensi warga PMII yang sangat besar belum mampu digerakkan. Sementara dalam setiap jenjang pengkaderan selalu ditekankan pada tradisi kritis dan arah gerakan aksi tapi lupa akan kesadaran intelektual. Itulah sebabnya, kalangan warga PMII yang concern di bidang intelektual dan memiliki potensi besar untuk menjadi pemikir, akademisi dan dosen, menjadi pasif dalam ber-PMII. Kita tidak bisa berharap banyak, karna mereka hanya menjadikan PMII sebagai simbol pakaian, bukan identitas dan pola pikir gerakan.

Untuk itu, pada konteks kekinian, kesadaran intelektual PMII harus kita bangun kembali. Kajian-kajian, diskusi, harus kembali dihidupkan. Pemikiran-pemikiran liar dan kritis terhadap arus

pemikiran Islam kontemporer harus lebih ditingkatkan. Sikap yang paling lugas diambil oleh kalangan PMII hari ini adalah mengembangkan semangat dan corak pemikiran berbasis intelektual. Karna jika tidak, PMII hanya akan menjadi gerakan organisasi masa besar tetapi miskin kualitas intelektual.

MENJADI SARJANA YANG SANTRI

Al-muhafadhah ‘alal al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah

(Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru (kemodernan) yang lebih baik)

Para kader PMII sebagian besar merupakan kalangan warga pedesaan. Mereka merupakan putra-putri terbaik desa dan berasal dari kalangan elite desa, seperti kyai, guru ngaji di langgar,

ketua ta'mir masjid atau anak petani desa yang kaya. Jenjang pendidikan mereka juga berasal dari pendidikan keagamaan Islam. Dimulai dari Madrasah Ibtida'yah (semacam SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), sampai Madrasah Aliyah (SMA). Di samping itu, mereka juga belajar dan mengenyam pendidikan akhlak dan pengetahuan keislaman di lembaga pendidikan Islam bernama pesantren.

Setelah rentetan pendidikan berbasis keagamaan ini selesai, baru mereka kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yakni Perguruan Tinggi Islam. Ada juga sebagian yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum. Dari struktur hierarki pendidikan inilah yang kemudian mencetak mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bernama PMII.

Liberal dan Tradisional

Transmigrasi warga PMII dari dunia desa ke kota ini memberi konsekuensi logis bahwa secara otomatis mereka akan mengalami dunia yang berbeda dengan dunia pendidikan sebelumnya. Warga PMII di kampus akan mendapatkan tantangan baru baik dalam pemikiran maupun tindakannya. Betapa tidak, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Terpecahlah mereka ke dalam dua kelompok.

Pertama kelompok yang liberal. Kondisi kampus yang tidak mempunyai aturan-aturan semacam di pesantren membuat banyak dari mereka melepaskan kungkungan kultur kedesaan dan

kesantriannya. Bahkan bisa melangkah lebih jauh dari itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara pakaian mereka, pergaulan, serta berbagai literatur bacaan-bacaan baru yang mereka dapatkan. Apalagi dengan dunia kampus yang begitu liar, misalkan pergaulan antara putra dan putri, lebih-lebih kajian intelektual kampus menekankan pada liberasi pemikiran. Bahkan tidak hanya dalam tataran berfikir, tetapi juga dalam pola pengkaderan dan gerakan sosial kemasyarakatan.

Ada semacam kebosanan di kalangan warga PMII yang ketika di pesantren selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan agama. Di Perguruan Tinggi mereka mencoba untuk menangkap dan mengeksplorasi masalah-masalah baru yang belum pernah digeluti. Dalam keadaan seperti ini, banyak yang beranggapan PMII tidak lagi terkontrol dalam segi keagamaan dan perilaku kesehariannya. Akibatnya, perpaduan antara konteks dunia kampus dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru membuat pemikiran warga PMII menjadi liberal.

Proses pemahaman liberasi di dalam warga PMII ini berimplikasi pada tradisi pemahaman Islam yang liberal. Sebagai organisasi yang berbasis Islam tradisional, PMII justru mampu memunculkan wacana keilmuan yang melampaui batas tradisionalnya, bahkan bisa dikatakan melampaui batas kelompok moderisme Islam. PMII sangat jarang bahkan tergolong tidak pernah menjadikan rujukan-rujukan kelompok Islam modernis dalam diskursus-diskursus keilmuannya, seperti pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Akhmad Khan, Natsir dan Nurcholis Majid. Akan

tetapi PMII lebih memilih pemikiran tokoh-tokoh kiri seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, al Jabiri dan Nasr Hamid Abu Yazid.

Mereka memahami liberasi sebagai suatu upaya pembebasan dari segala kekangan baik dari kekuasaan, tradisi, pemikiran, doktrin teologi dan ilmu pengetahuan. Mindset liberasi ini berimplikasi pada pemikiran dan perilaku yang liberal. Hal yang selaras dan wajar jika dikaitkan dengan paradigama keilmuan kampus yang mengagungkan kebebasan berfikir. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mungkin mereka menekuni studi-studi baru tanpa merawat dan melestarikan keilmuan-keilmuan lama di pesantren dulu? Mengambil keilmuan baru dengan tanpa melestarikan keilmuan lama yang masih relevan merupakan arogansi intelektual. HA. Chalid Mawardi (salah satu pendiri PMII) menyebutnya sebagai *Snobisme Inteletual*, sebuah penyakit yang berada dalam transisi dari tingkat tradisional ke tingkat yang lebih maju.

Kedua, kelompok yang tradisional. Sebagaian dari mereka memiliki mindset yang idealis dengan tradisi keagamaan pesantren. Mereka tetap menjalankan dan menggeluti tradisi keilmuan pesantren dan cenderung apatis terhadap keilmuan Perguruan Tinggi yang dianggapnya melampaui batas-batas etika keilmuan. Pengajaran di kampus yang berupa Sistem Kredit Semester (SKS) mereka anggap hanya sekedar formalitas untuk menjalankan perkuliahan kampus, bukan sebagai ajang eksplorasi keilmuan baru dalam perkembangan intelektualitasnya. Biasanya golongan ini tinggal di pesantren atau di lembaga pendidikan agama di sekitar kampus, meskipun tidak menganggap mereka keseluruhan.

Kelompok warga PMII yang teguh pada tradisi pesantren dan condong eksklusif pada keilmuan-keilmuan baru terutama teori-teori ilmuan Barat ini tidak berkenan lepas dari tradisi pesantren. Meskipun bermukim di perkotaan yang notabene merupakan tempat yang sangat dinamis dalam perkembangan keilmuannya, akan tetapi mereka tetap menolak untuk kreatif dan proporsional terhadap keilmuan mutakhir. Sebuah paradigma lama tentang keislaman tetap terpatri di dalam pemikiran intelektualitasnya. Tak jarang misalnya para dosen atau guru-guru besar kampus mereka beri label sebagai pemikir Islam yang liberal.

Demikian juga ketaatan mereka menggunakan kitab yang *mu'tabarah* apalagi yang bermazhab Syafi'i sehingga hampir tertutup kemungkinan untuk menggunakan logika dan paradigma jurispendensi keilmuan lain yang baru. Tradisi tekstual mereka masih sangat kokoh sehingga cara berfikirnya tetap dengan simbol dan formalisme dan semua persoalan harus didasarkan pada rujukan teks. Semangat berfikir verbalistik dengan selalu mengutip ayat, hadis, dan kaidah-kaidah fikih dalam setiap pernyataannya menjadi sebuah argumentasi yang selalu diutamakan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mungkin mereka tetap melestarikan keilmuan-keilmuan pesantren tanpa memanfaatkan kebebasan akademis kampus yang sangat dinamis? Mempertahankan keilmuan lama tetapi apatis terhadap perkembangan keilmuan kontemporer merupakan sikap statis dan terbelakang.

Mengambil sikap

Dalam keadaan seperti ini PMII semestinya bisa mengambil sikap tengah-tengah. Sebagai alumni pesantren yang juga sarjana muslim diperlukan sebuah sikap untuk terus menjaga keilmuan pesantren dan tetap melestarikan tradisi keagamaan santri, namun tidak menafikkan keilmuan-keilmuan baru (baca: modern). Pada satu sisi, nantinya warga PMII akan kembali ke desa masing-masing dan mereka akan mengemban amanah untuk menjadi pemimpin agama di kalangan masyarakat. Baik itu memimpin tahlil, imam sholat, khutbah jumat, pernikah dan lain sebagainya. Dan pada sisi yang lain warga PMII sebagai kader intelektual dituntut untuk mengkampanyekan sistem sosial masyarakat yang benar dan suntikan semangat pendidikan kepada masyarakat desa. Oleh karena selama ini masayarakat desa jarang bahkan tergolong tidak pernah bertanya kepada sarjana-sarjana kampus perihal bagaimana sistem sosial yang baik, akan tetapi mungkin hanya sekitar pesoalan fikih psikologis seperti persoalan sebatas halal dan haram.

Jika warga PMII yang datang dari desa (dengan basis keilmuan pesantren) menuju perkotaan (dengan basis keilmuan perguruan tinggi) tidak memanfaatkan kebebasan akademisnya, maka mereka tidak akan memperoleh keilmuan baru. Jika di kampus tidak memanfaatkan kebebasan mimbar akademisnya maka berarti sama saja seperti di pesantren. Tidak ada bedanya menjadi santri di pesantren dan mahasiswa di kampus. Dengan kebebasan keilmuan kampus seharusnya warga PMII bisa dapat melakukan sesuatu hal yang baru.

Sebaliknya, jika mereka di kampus mencoba untuk menangkap dan mengeksplorasi masalah-masalah dan keilmuan baru tanpa mempertahankan keilmuan pesantren, maka istilah *snobisme intelektual* yang mengerikan ini akan menjelma dalam arogansi intelektual. Maka dari itu tanamkanlah, bahwa warga PMII nantinya tidak hanya dituntut untuk menjadi tokoh masyarakat yang hanya menentukan kasus halal dan haram atau memimpin tahlil dan berbagai tradisi keagamaan semata, akan tetapi mereka dituntut untuk berbicara dan mengkampanyekan ihwal sistem sosial masyarakat yang baik dan benar serta pentingnya pendidikan di masa depan.

Dalam konteks saat ini, tantangan PMII adalah memahami dan menjaga warisan tradisi pemikiran keagamaan lama sehingga bisa menjawab tantangan zaman mutakhir yang baru. Berbekal pendidikan pesantren dan keislaman disertai berbagai cabang ilmu-ilmu baru di Perguruan Tinggi, otomatis warga PMII memiliki corak pemikiran dan keilmuan yang lebih komprehensif dari para sesepuhnya. Inilah sebenarnya maksud pengamalan kaidah yang sangat populer di kalangan pesantren, "*Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru (kemodernan) yang lebih baik*", sebagaimana disebut pada awal tulisan ini.

Bab 5

PMII dan Filosofi Gerakan

NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

Pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang ke-III di Bandung, 1-5 Mei 1976, PMII menyusun Nilai Dasar Pergerakan (NDP). NDP merupakan tali pengikat (*kalimatun sawa*) yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Oleh karena itu, setiap pemikiran, gerak dan langkah warga PMII harus didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam NDP.

Ada empat rumusan Nilai Dasar Pergerakan yang disusun oleh warga PMII secara sistematis dan konkrit sehingga berlaku dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Rumusan tersebut antara lain adalah *pertama,* tauhid yakni mengesakan Allah SWT. Tauhid merupakan nilai paling asasi, di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia. Inti dari tauhid adalah mengesakan Allah dalam segala totalitas, dzat, sifat dan penguatan perbuatanNya.

Tauhid merupakan sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan warga PMII terhadap sesuatu di luar nalar indera manusia, yakni yang gaib. Tauhid merupakan titik puncak dari keimanan manusia. Oleh karena itu, Warga PMII harus mampu melarutkan dan meneteskan nilai-niai ketauhidan dalam berbagai kehidupan sehingga merambah dan memberi aspek vertikal pada segala aspek di sekelilingnya. Hal ini harus dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang bersifat profan dan sakral di dunia.

Kedua, hubungan manusia dengan Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia dihadapan ciptaanNya yang lain. Allah memberikan daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral untuk manusia yang itu tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya baik sebagai khalifah maupun hamba Allah di muka bumi ini.

Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia membawa amanat besar yaitu sebagai manajer untuk mengelola kehidupan di muka bumi. Manusia berkewajiban mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, bukan merusaknya melalui eksplorasi untuk kepentingan sesaat. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuannya, baik kewajiban maupun larangannya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang harus selalu dirawat, agar manusia tidak terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah, apalagi lebih rendah dari binatang.

Ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Sungguh tidak ada manusia yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang menonjol pada potensi kebaikannya, ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerja sama, saling menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi terciptanya tatanan kehidupan untuk kebaikan bersama.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia ini tercakup dalam persaudaran antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama umat beragama dan persaudaran antar manusia. Dalam konteks Indonesia, kita hidup penuh persaudaraan bersama umat yang berbeda agama, suku, ras, bahasa dan adat istiadat. Persaudaraan ini harus menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Keempat, hubungan manusia dengan alam. Sebagaimana manusia, alam semesta juga merupakan ciptaan Allah. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak ke dalam penghambaan terhadap alam, dan bukan penghambaan kepada Allah.

Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu manusia harus menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaannya, bukan malah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi. Dalam memanfaatkan alam, diperlukan ilmu pengetahuan, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hukum tersendiri. Alam didayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya. Di sinilah manusia dituntut untuk mempertajam akalnya dengan pengetahuan-pengetahuan sains guna mengelola alam dan seisinya.

Fungsi NDP

Melalui rumusan NDP yang mengarahkan kepada siklus hubungan vertikal dan horisontal dalam setiap gerak dan pemikirannya ini, maka akan tercipta fungsi NDP sebagai berikut, *Pertama*, sebagai kerangka refleksi (landasan berpikir). NDP bergerak dalam pergulatan ide-ide, paradigma dan nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran ideal. Ideal itu menjadi hal yang mengikat, absolut, total, universal, berlaku menembus ke berbagai dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, kerangka refleksi ini

menjadi moralitas sekaligus tujuan absolut dalam mendulang capaian-capaian nilai kebenaran, keadilan, kemerdekaan dan kemanusiaan.

Kedua, sebagai kerangka gerakan (landasan berpijak). Sebagai kerangka gerakan, NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, pembelajaran sosial yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran faktual. Kebenaran faktual itu senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Kerangka ini memungkinkan warga pergerakan menggali, memperkuat atau bahkan memperbaharui rumusan-rumusan kebenaran dengan historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah.

Ketiga, sebagai ideologis (sumber motivasi). NDP menjadi suatu rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi pada setiap warga PMII secara bersama-sama, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses kreatif di internal warga PMII secara menyeluruh dalam proses perubahan sosial yang diangankan secara bersama-sama dengan terorganisir.

Dari penjelasan inilah dapat dikatakan bahwa NDP PMII memiliki kedudukan yang sangat kuat. NDP menjadi rujukan setiap produk dan kegiatan organisasi, juga menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan, pijakan dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak warga PMII. Internalisasi dan nilai-nilai teologis yang semua itu bermuara pada ketauhidan, dapat menumbuhkan filosofi gerak PMII yang disandarkan pada nilai-nilai dasar pergerakan. Oleh

karena itu, NDP harus senantiasa dijiwai sebagai aturan organisasi yang memberi arah dan mendorong gerak serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan warga PMII.

PERAN BESAR GERAKAN PMII

PMII sebagai salah satu organisasi mahasiswa mempunyai peran yang besar dalam membangun solidaritas dan gerakan mahasiswa di Indonesia. Hal ini tercermin dari sikapnya selalu aktif menyuarakan gerakan perubahan dan memimpin aksi-aksi nyata untuk mencapai perubahan serta melakukan pembelaan terhadap HMI yang terancam dibubarkan.

Gerakan PMII

Gerakan PMII pada 25 Oktober 1966 mampu memberi andil besar dalam pembubaran PKI. Gerakan ini dimainkan oleh PMII sebagai pemimpin mahasiswa. Ketika itu Zamroni sebagai ketua PB

PMII dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Sjarief Thajeb. Organisasi yang tergabung dalam KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas.

Zamroni sebagai kader PMII sangat lincah dan sigap memimpin KAMI. Terutama dalam memimpin demonstrasi mahasiswa tangga 10 Februari 1966 yang kemudian mengalirkan arus kekuatan besar mahasiswa dalam meruntuhkan rezim Orde Lama serta pembubaran PKI. Pengorbanan Zamroni sampai pada konsekuensi nyata bahwa sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, harus merelakan jemari tangannya terpotong hingga tersisa dua buah. Ini sekaligus menjadi bukti begitu besarnya pengorbanan Zamroni sebagai kader PMII dalam membela dan menggerakkan idealisme mahasiswa.

Tak hanya itu, inspirasi KAMI terhadap gerakan mahasiswa mampu memberi motivasi pada komunitas gerakan mahasiswa baru sebagai lambang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Maka muncullah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Gerakan ini menjadi kebanggaan dan rasa solidaritas yang tinggi dari kalangan organisasi mahasiswa lain. PMII juga telah membuktikan bahwa mampu memberi andil besar dalam menginisiasi sikap mahasiswa. Meminjam Mahbub Junaidi, bahwa tangan PMII lah yang mengayunkan garis-garis besar dan pokok-

pokok statemen pembubaran PKI, apa yang terjadi setelah itu kita semua sudah tahu, likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh masa rakyat yang cinta kepada Pancasila.

Kebijakan serta garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII ketika itu, agar kader PMII memimpin KAMI sangat tepat. Bahwa PMII harus ikut dan memimpin KAMI mulai pusat sampai daerah. Kebijakan ini telah dibuktikan dengan cepat dan luas oleh PMII. Zamroni telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik pada KAMI, itu berarti, juga kepemimpinan oleh PMII.

Gerakan lain dari PMII adalah ketika sahabat Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda, sehingga lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kemudian KNPI berhasil masuk ke dalam GBHN pada sidang umum MPR 1978. Dan sampai hari ini KNPI menjadi organisasi pemuda paling berpengaruh di Indonesia.

Pada tahun 1974 PMII bergabung dalm kelompok Cipayung. Kelompok yang berkomitmen untuk terus mempertahankan idealisme sebagai organisasi mahasiswa. Di situlah tempat sejumlah organisasi ekstra-universitas dengan berbagai latar sosial, ideologi dan agama mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

Kelompok Cipayung ini terdiri dari berbagai kelompok oranisasi mahasiswa, antara lain PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Kehadiran kelompok Cipayung ini sangat berharga bagi kalangan aktivis mahasiswa. Karna pada saat itu gerakan mahasiswa terus

dibatasi ruang geraknya oleh kebijakan pemerintah yang otoriter. Bahkan sampai saat ini, para alumnus kelompok Cipayung bisa kita temukan di sektor-sektor pemerintahan, dosen, LSM, dan pengabdian masyarakat.

Pembelaan terhadap HMI

Peran lain PMII adalah solidaritas. Hal itu tercermin pada pembelaan PMII terhadap HMI yang terancam dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ketika HMI yang dianggap berafiliasi dengan Masyumi mendapatkan cobaan dan terancam dibubarkan, PMII menggerakkan dan memimpin kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa Islam untuk melakukan solidaritas dan pembelaan.

Pembelaan PMII sampai pada 19-26 Desember 1964, bersama GP Anshor menyelenggarakan musyawarah di kalangan pelajar dan mahasiswa Islam. Musyawarah ini menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam. Kemudian melahirkan organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang dikenal dengan nama GEMUIS (Generasi Muda Islam).

Salah satu hasil musyawarah itu adalah usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI yang sedang mengalami cobaan berat. Dari sinilah GEMUIS menghasilkan dua keputusan penting tentang usaha pembelaan terhadap HMI dengan pernyataan, *pertama*, HMI bukanlah underbow dan tidak pernah mempunyai hubungan organisatoris dengan partai atau organisasi manapun.

Kedua, masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.

Dari semua pemaparan ini, gerakan dan solidaritas PMII terus mewarnai perjalanan bangsa. Tentu, peran dan aksi lain gerakan PMII sangatlah besar. Hal ini harus menjadi refleksi bagi warga PMII dan mahasiswa lain. Betapa besar perjuangan dan pengorbanan PMII dalam membangun tatanan rumah bernama Indonesia untuk terus menjadi lebih baik.

PMII akan terus memberi warna signifikan terhadap perjalan bangsa di masa-masa yang akan datang. Baik dalam gerakan atau diskursus-diskursus penting tentang peranan mahasiswa untuk bangsa. Oelh karena itu, slogan familiar PMII dengan diksi "tangan terkepal dan maju kemuka" jangan hanya menjadi slogan formal gerakan, tetapi harus dimaknai dan ditafsirkan pada esensi suatu gerakan nyata. Dengan pemaknaan yang substantif maka lahirlah praktek sosial berupa gerakan mahasiswa pembela bangsa dan penegak agama.

MEMBANGUN GERAKAN DI MEDIA SOSIAL

"Tidak ada yang tetap kecuali perubahan."
(Heraclitus, filsuf Yunani)

Apa yang disampaikan Heraclitus sepertinya juga relevan untuk dialamatkan kepada media. Media yang selama ini menyajikan informasi dan pemberitaan melalui koran, radio, televisi, kini semakin luas mengalami perubahan hingga ke ranah media sosial (daring). Pesatnya kemajuan tekhnologi ini mengakibatkan berbagai macam informasi deras mengalir masuk. Garis-garis antara berita, hiburan, iklan, propaganda dan sebagainya, menjadi kabur. Sehingga

kita susah untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan setiap informasi yang kita peroleh.

Abad ke-21 ini memang membawa perubahan besar dalam informasi yang kita terima dari media. Diperlukan sebuah kecermatan untuk mengkonsumsi informasi yang akurat dan terpercaya. Tidak serta merta menelan mentah-mentah setiap informasi yang kita dapat, karena apa yang kita peroleh dari media adalah berupa data-data, data itu akan menjadi infomasi yang akan memengaruhi pola pikir dan cara pandang kita terhadap problem sosial. Sungguh peran media sangat vital.

Ron Nessen, mantan wartwan *NBC News* dan juru bicara Presiden Gerald Ford, mengatakan bahwa internet membuat semua orang menjadi wartawan. *"The internet makes everybody a journalist. You sit at your computer, you type something that is true, not true, partially true, hit the button and it goes around the world. You can't stop it".* Kita duduk di depan komputer, mengetik sesuatu yang benar, tidak benar, atau sebagaian benar, kemudian menekan tombol, tulisan itu akan mengelilingi bumi, kita tidak bisa menghentikannya lagi.

Pada sisi yang lain, masyarakat tidak begitu peduli dengan akurasi media. Mereka mudah membaurkan antara fakta dan opini. Maka benar apa yang disampaikan oleh Frank Sesno, bahwa kebanyakan apa yang didefinisikan atau disajikan sebuah berita sekarang ini adalah opini, interpretasi dan spekulasi. Lebih lanjut bahwa media tidak lagi dalam bisnis informasi dan pemberitaan,

tetapi media berada dalam bisnis pengaruh. "*Media was not in the news or information business. Media was in the influence business.*"

Jika demikian adanya, berarti diperlukan sebuah strategi dan langkah konkrit untuk merespon realita media mutakhir ini. Respon itu tidak dengan sifat sinis terhadap media, tetapi skeptis, yaitu apa yang disebut oleh Tom Friedman dari New YorkTimes dengan sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu.

Pada fenomena mutakhir ini, beragam isu menjadi penting bagi masyarakat karena disuarakan oleh media sosial. Seringkali sebuah isu menjadi "tren" tidak jelas, tetapi mendapatkan perhatian besar bagi masyarakat. Tak ayal juga berbagai macam propaganda didengungkan, baik yang bersifat politik, agama, ras dan sosial. Berbagai strategi dan tekhnik persuasif dilakukan untuk mengubah opini, perilaku dan sikap masyarakat dengan menggunakan kebohongan, tipu muslihat, dan kebencian.

Sejarah membuktikan bahwa propaganda merupakan senjata paling ampuh untuk memerangi perang dan opini publik di era modern. Sebagaimana propaganda anti Syiah, anti Ahmadiyah, liberal, ateis, isu sara pemilihan Presiden, gubernur, wali kota dan lain-lain. Propaganda ini sangat masif dan dengan mudah ditemui di berbagai media sosial. Sekali lagi, peran media sangat vital.

Gerakan PMII

Menyikapi hal itu, PMII tidak perlu takut dan apatis terhadap media, karna sudah sejatinya merupakan perkembangan tekhnologi. Kehadiran tekhnologi baru ini memang bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi kesempatan bagi PMII, yaitu kesempatan berpartisipasi untuk ikut memainkan peran di media. PMII dituntut untuk menjadi subjek, tidak selalu menjadi objek. PMII harus mengembangkan medianya sendiri, membangun gerakan di media sosial, baik ideologi, pandangan, gagasan atas problem sosial dan penyebaran ajaran Islam yang penuh kasih dan kedamaian.

Hal ini karena banyak sekali tantangan di media sosial yang dihadapi PMII, baik dalam politik, sosial maupun keagamaan. Pada bidang keagamaan misalnya, banyak paham-paham dan doktrin keagamaan yang menyimpang dan sangat kontras dengan pemahaman keagamaan Islam yang benar. Di antaranya adalah paham gampang mengkafirkan, menganggap selainnya (*the other*) sebagai kelompok yang harus diperangi dan dimusuhi. Paham-paham yang menuntut Indonesia untuk menjadi negara Islam, menegakkan kembali Piagam Madinah, serta anggapan bahwa selama ini negara Indonesia disebut negara *Thogut* dan negara kafir.

Tidak hanya itu, ada juga gerakan untuk menegakkan kembali sistem khilafah, menganggap Pancasila bukan produk Islam, serta menuntut syariat-syariat Islam diterapkan pada negara Indonesia. Bahkan yang paling mengerikan, gerakan yang mengajak untuk bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Gerakan penyebaran paham-paham ideologi itu semakin masif ketika mendiskriminasi golongan-golongan minoritas dan lemah. Meraka menuduh kafir dan sesat terhadap Syiah, Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya.

Mereka mempropagandakan untuk membakar tempat-tempat ibadah, menyerang yang tidak sepaham. Gerakan ini sering menyelenggarakan seminar-seminar mengatasnamakan persatuan umat Islam. Mereka tidak pernah sedikitpun membuat Islam menjadi rahmat untuk semua golongan, kelompok, paham dan segala yang ada di alam semesta ini.

Sedangkan untuk menyebut NU dan Muhammadiyah sesat mereka tidak berani. Mungkin karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan Islam besar di Indonesia mereka kemudian bungkam. Bisa jadi jika NU dan Muhammadiyah dalam keadaan lemah dan minoritas mereka sebut juga sebagai kelompok yang kafir.

Begitu juga dalam bidang politik. Berapa sering masyarakat ditipu dengan adegan-adegan sandiwara politisi, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan konglemerat, partai politik dan kalangan atas, akibatnya sangat sedikit kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Jurang ketimpangan yang sangat besar antara masyarakat kaya dan miskin, ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum dan berbagai persoalan yang sangat kompleks lainnya. Pun demikian halnya dengan bidang-bidang lain. Masih banyak informasi yang kita terima dari media hanya sebagai propaganda, dan tuntutan

ekonomis pengusaha, atau bahkan sebagai kekuatan pengaruh yang ujungnya adalah tujuan kekuasaan.

Atas dasar ini, tuntutan untuk bergerak di media sosial mutlak harus dilakukan warga PMII. PMII harus memiliki website, tabloid, majalah, dan media-media lain. Hal itu untuk memperkenalkan nilai-nilai keislaman yang ramah, terbuka dan toleran, sebagai sebuah filter dari infiltrasi paham-paham puritan dan fundamental. Media PMII juga bisa sebagai media yang independen, tidak digerakkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Atau bahkan media PMII bisa berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang sistem demokrasi dan sebagai pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan penguasa.

Hal yang penting lainnya jangan sampai warga PMII mudah menyebarkan informasi sebelum letak kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah mudahnya masyarakat meng-copy-paste informasi yang tersebar di WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lain tanpa terlebih dahulu menelaah lebih jauh dan melihat akurasi ketepatan informasinya. Warga PMII harus hadir sebagai jaringan intelektual yang tidak mudah memberi penilaian terhadap sebuah informasi sebelum mengetahui secara lengkap informasi tersebut. Warga PMII harus berfikir dengan jernih sebelum menyebarkan pesan dan mengkonsumsi segala bentuk informasi yang terdapat di media sosial. Dan yang paling penting, harus memiliki media sendiri yang independen.

STRATEGI PENGEMBANGAN PMII DI KAMPUS

PMII merupakan organisasi mahasiswa berbasis kaderisasi yang terdapat di berbagai kampus di Indonesia. Sebuah strategi dan langkah pengembangan organisasi merupakan keniscayaan sebagai jalan pilihan yang tidak boleh tidak harus terus dijalankan supaya ruh organisasi tetap hidup. Setiap masa memiliki berbagai problem organisasi yang sangat kompleks dan harus dipecahkan secara akurat dan benar. Tak ada pilihan lain, kecuali mendinamiskan organisasi dengan peningkatan yang prestius, yakni kaderisasi yang terus

menerus berkembang. Pengembangan itu harus progresif dan maju, tidak normatif dan statis. Hal ini dimaksud agar ke depan arah kaderisasi PMII semakin terstruktur dan mempunyai visi yang jelas untuk mencapai cita-cita organisasi.

Dalam memahami arah strategi pengembangan PMII, maka harus tetap mengacu pada perkembangan dunia kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi. Oleh karena basis masa PMII berada di dalam lingkungan kampus, maka PMII dan kampus tidak boleh berseberangan, dalam arti ketentuan-kentuan yang terdapat dalam Perguruan Tinggi harus bisa dibaca dan diimplementasikan ke dalam pilihan pengembangan PMII. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, setiap warga PMII harus merebut Indeks Prestasi (IP) tinggi. Memang benar realitanya bahwa tidak semua mahasiswa yang memperoleh IP tinggi menjadi lebih baik dibanding mahasiswa yang memiliki IP rendah. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indeks Prestasi merupakan cerminan dari sebuah ketekunan, kegigihan dan prestasi mahasiswa pada studi perkuliahannya. IP yang tinggi merupakan bentuk pengakuan dosen atas keseriusan mahasiswa dalam proses belajar. Biasanya, penilaian dosen terhadap mahasiswa dilihat dari keaktifan selama kuliah berlangsung, kerjasama, prestasi akademik serta hubungan yang baik dengan dosen. Tidak dinafikan juga bahwa kehadiran pada kuliah turut menentukan IP yang tinggi. Intinya, IP tinggi merupakan representasi kesuksesan mahasiwa di kampus, meskipun di luar belum tentu.

Kedua, setiap warga PMII harus berprestasi dalam potensi individu masing-masing. Skil dan potensi personal yang dimiliki harus dikembangkan sehingga akan menjadi modal dasar mahasiswa untuk membangun relasi prestasi dengan mahasiswa yang lain. Di era tekhnologi ini, banyak hal bisa dimanipulasi, termasuk IP, tetapi skil personal yang akan membenarkan semua. Tidak dipungkiri, seorang mahasiswa akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain jika dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jika potensi personal bisa dikembangkan, niscaya warga PMII akan menjadi mahasiswa panutan untuk mahasiswa lain di berbagai sektor.

Ketiga, setiap warga PMII harus merebut simpati mahasiswa dengan menampilkan perangai yang baik dan akhlak karimah. Perilaku sangat penting di dalam proses pembelajaran di kampus. Banyak kalangan mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual bagus tetapi memiliki sikap yang tidak baik. Misalnya, tidak baik dalam tata cara berpakaian, berbicara dan bersikap. Sejatinya warga PMII memiliki perilaku yang mematuhi norma dan etika dalam kampus. Memang sudah menjadi kebiasaan umum kebanyakan mahasiswa suka melanggar aturan, tetapi sebagai warga PMII harus melihat efek yang akan ditimbulkan dari perilaku yang buruk. Bukan hanya menjaga nama personal, tetapi juga marwah organisasi.

Keempat, setiap warga PMII harus merebut jabatan-jabatan strategis di lembaga-lembaga kemahasiswaan. PMII mutlak harus memiliki dan menempatkan para kadernya menjadi pemimpin mahasiswa di lembaga-lembaga kemahasiswaan kampus. Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan kader PMII guna mencetak

dan memberi sumbangsih terhadap kebijakan sistem kampus. Posisi ini merupakan tempat yang vital dan strategis untuk menjalankan roda kaderisasi PMII. Di samping itu, posisi ini merupakan langkah konkrit PMII untuk memberi andil terhadap kepemimpinan mahasiswa.

Kelima, setiap warga PMII mutlak harus bisa menulis. Menulis adalah menumpahkan pikiran dan gagasan dari apa yang mereka baca, lihat dan refleksikan terhadap problem sosial. Hal ini penting, mengingat dinamika keilmuan mahasiswa di kampus tidak akan pernah lepas dari kegiatan tulis menulis. Misalkan dalam tugas makalah, skripsi, laporan Kuliah Kerja Nyata dan lain-lain. Apalagi jika harus mengungkap gagasan di kampus, koran harian, penelitian dan sebagainya. Oleh karena itu, menulis merupakan kebutuhan pokok mahasiswa serta jalan paling ampuh untuk menyampaikan gagasan. Di samping itu, dengan membiasakan menulis dapat mempertajam nalar kritis mahasiswa dan analisis terhadap penelitian yang akan ditempuh seperti skripsi, tesis, jurnal maupun disertasi.

Beberapa stategi di atas dirasa relevan dengan dinamika perkembangan kampus, maka strategi tersebut penting, mengingat sebuah strategi meniscayakan langkah yang selalu mengacu pada perkembangan kampus. Meskipun bukan strategi yang sempurna, namun dapat dipastikan akan mempermudah pengembangan PMII di kampus. Sebuah langkah prestisius warga PMII untuk menginspirasi dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain.

LIBERASI PENGKADERAN PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi pengkaderan yang memiliki basis massa besar. Tercatat 230 Cabang dan 24 Pengurus Kordinator Cabang (PKC) di seluruh Indonesia. Belum lagi jumlah komisariat dan rayon yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah yang sangat besar dan dirasa sulit bagi organisasi mahasiswa lain untuk mencapai angka yang fantastis ini.

Jika dirunut dari sejak pertama kali berdirinya, maka jumlah kader PMII di Indonesia akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan

kader yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sudah pasti PMII menanggung beban yang cukup besar untuk mengantarkan kader-kadernya menjadi manusia yang tercerahkan, bukan hanya pada yang *consern* terhadap dunia akademik saja, tetapi juga terhadap kader yang memiliki kekuaatan moral, intelektual, profesionalitas dan yang lebih penting adalah pada komitmen dan kepekaan sosial yang tinggi. Yang diharapkan oleh PMII tidak hanya sekedar kader yang militan, tetapi penciptaan tatanan sosial yang egaliter, di mana kemerdekaan dan independensi kader di atas segalanya.

Liberasi Pengkaderan

Untuk mewujudkan harapan ini, maka harus dimulai dari landasan fundamental yang menjadi pijakan dasar bahwa paradigma pengkaderan harus bersifat *"liberasi"*. Pengkaderan bersifat liberasi yang dimaksud adalah upaya pembebasan setiap kader terhadap segala bentuk hegemoni kekuasaan. Mindset senior selalu benar harus ditinggalkan, begitu juga ajang pengkaderan jangan sampai menjadi titik eksistensi diri untuk memaksakan doktrin organisasi dan senioritas. Di sinilah mindset liberasi menjadi suatu pelatihan untuk menghasilkan kader yang bebas, mandiri, otonom dan bertanggung jawab.

Mindset liberasi juga dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan organisasi yang demokratis dan egaliter, dengan tujuan untuk menumbuhkan kapasitas-kapasitas standar kader menuju gerakan perubahan. Liberasi berangkat dari sebuah asumsi filosofis bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan tingkat otonomi diri

yang relatif sama. Struktur kelaslah baik berupa kekuasaan, senioritas dan sosial ekonomi yang menyebabkan kader PMII tidak berdaya, independen dan mandiri atas kader atau senioritas yang lain. Lebih parahnya, ketidakberdayaan tersebut berakibat juga pada ketidakmandirian pada berfikir dan bertindak. Oleh sebab itu, setiap kader harus dibebaskan dari belenggu kekuasaan dan senioritas agar menjadi kader yang memiliki martabat dan kebebasan dalam dirinya sendiri.

Dalam konteks organisasi, pengejewantahan mindset liberasi ini akan berimplikasi pada suatu peralihan dari transformasi yang bersifat masif pada penguatan individu-individu, serta merubah budaya elitis menuju budaya populis. Mindset ini akan menghilangkan sekat-sekat ketidaksamaan otoritas sekaligus menghindari hegemoni suatu kekuatan terhadap setiap kader. Dengan demikian, kader PMII akan dipandang sebagai individu yang otonom dan memiliki independensi berfikir serta peranan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Sehingga PMII akan menjadi tempat berkumpulnya individu yang merdeka dengan pola hubungan dan komunikasi yang cair.

Semangat liberasi di dalam PMII tidak hanya dimaknai dalam kerangka berpikir dalam metode kaderisasi formal, tetapi juga PMII harus memberikan ruang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya beragam komunitas yang berada di luar struktur organisasi PMII, sesuai dengan kecenderungan dan pilihan gerakannya. Misalkan aliansi-aliansi atau kumpulan mahasiswa sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Atau ruang itu diberikan kepada setiap kader

yang ingin memperdalam kapasitasnya terhadap potensi non akademik, hal ini bisa diarahkan kepada organisasi intra kampus, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan organisasi pemerintahan atau lembaga-lembaga kampus semacam HMJ, Sema maupun Dema.

Apabila setiap individu sudah mempunyai kapasitas yang relatif sama, maka akan terjadi kebebasan berfikir dan pengambilan pilihan secara otonom tanpa harus terjadi penyeragaman. Dengan demikian, akan terjadi interaksi interdependensi antar kader dengan kader yang lain, di mana mereka akan berada dalam suatu ikatan saling ketergantungan secara seimbang untuk tujuan yang sama. Untuk menunjangnya, diperlukan prasyarat terciptanya ruang publik yang kondusif untuk hubungan interaktif yang seimbang antar kekuatan gerakan mahasiswa. Ruang publik itu berupa media kampus, forum-forum pertemuan atau pengakajian akademis, gerakan mahasiswa, pemerintahan kampus dan sebagainya.

Liberasi pengkaderan PMII pada sisi yang lain memiliki maksud menumbuhkan kematangan gerakan kader PMII agar semakin peka dalam membaca dan merespon persoalan-persoalan sosial, akademis, budaya, agama, dan politik yang berkembang dalam konteks kekinian. Sehingga strategi pengkaderan PMII bisa dimulai dengan memberi kebebasan ruang berfikir dan bergerak terhadap para kader-kadernya. Dengan demikian, akan melahirkan kematangan jati diri yang pada gilirannya harus ditransformasikan ke berbagai *leading sector*. Hal ini bisa menentukan peran kader PMII untuk mengukir sejarah masa kini yang akan dikenang di masa yang akan datang.

Pada perspektif yang lain, independensi kader PMII dapat diartikan sebagai upaya pencarian konsep alternatif secara mandiri, terlepas dari hegemoni kekuasaan, termasuk kemampuan berhadapan dengan mainstream dominan. Hal ini penting, mengingat mindset mahasiswa mempunyai logikanya sendiri dan sulit untuk dikontrol. Yang diperlukan adalah kemampuan dan kapasitas diri untuk tidak terbawa arus umum, maka kader PMII akan memiliki kapasitas konseptual dan manajemen gerakan sosial. Oleh karena proses pergulatan wacana akan berhadapan dengan bergining sebagai modal sosial di antara berbagai kekuatan dengan kepentingannya masing-masing.

Kebutuhan Internal Organisasi

Wacana liberasi dengan pemahaman sebagaimana diulas di atas akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dasar perihal bagaimana kemudian kader PMII dapat memberi andil terhadap kepentingan dan kebutuhan internal PMII. Sebab, seakan-akan liberasi mengajak pada independensi dan kemandirian kader untuk tidak serta merta menerima doktrin-doktrin dan pengabaian terhadap arus kekuatan senioritas dan formalitas organisasi, sehingga kepentingan organisasi tidak tertata secara manajerial maupun administrasi.

Memang benar, bahwa liberasi merupakan independensi, kebebasan dan kemandirian kader untuk menentukan kapasitas diri sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mengambil peranan dalam komunitas lain, akan tetapi di sinilah perlu adanya sampul

untuk menjadikan keberagaman itu sebagai satu kesatuan. Sampul yang dimaksud adalah identitas diri sebagai kader PMII di manapun berada, yakni sebuah struktur dan acuan etik organisasi yang telah menjadi konsensus bersama. Tidak dengan masing-masing kader menampilkan arogansi diri karena telah mempunyai peranan di dalam komunitas yang berbeda.

Oleh karena itu, tidak perlu adanya saling abai antar kader, apalagi tidak mau diklaim sebagai komponen kader PMII. Jika itu terjadi, berarti juga karena ketidakmampuan struktur yang terdapat di internal PMII untuk memfungsikan dirinya sebagai simpul yang efektif untuk kader-kadernya. Mungkin yang harus dipertegas adalah bangunan atau kerangka paradigmatik bagaimana sistem yang berjalan di internal PMII bisa berjalan dengan konsisten menyikapi persoalan yang sangat kompleks untuk dihadapi.

Liberasi harus berjalan di atas acuan moral dan norma Nilai Dasar Pergerakan (NDP) untuk mengendalikan kepemimpinan kader-kader yang telah tersebar di segala *leading sector* baik secara intelektual, sosial dan politik sekaligus. Jangan sampai kader-kader PMII yang memiliki peranan strategis tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, PMII jangan sampai hanya bisa mengklaim kekuatan moral, intelektual dan politik yang terdapat di berbagai sektor adalah kekuatan yang dibangun oleh kader-kadernya, tanpa adanya kontrol struktural organisasi yang baik. sehingga jika itu terjadi, PMII hanya akan menjadi sebuah kelompok yang hanya bisa berteriak di dalam tetapi tidak mempunyai akses dan peranan apapun untuk melakukan perubahan bersama ormas mahasiswa yang lain.

Liberasi pengkaderan PMII melalui pencarian eksistensi dan otonomi diri ini akan melahirkan independensi warga PMII yang bisa menjadikan PMII tidak terseret ke dalam arus kekuatan besar, baik itu politik, dan sosial ekonomi.

MERUMUSKAN PARADIGMA BARU

Pada era demokrasi ini, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berubah, jauh berbeda dibanding beberapa dekade terakhir, khususnya pada tahun 90-an. Jika pada era sebelumnya pemerintahan sangat sentralistik sehingga masyarakat bungkam, tidak ada peluang untuk memberi aspirasi dari bawah ke atas, maka pada era saat ini masyarakat memiliki peluang-peluang untuk menyalurkan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara (pemerintah).

Kondisi demikian membuat hilangnya peran sentral mahasiswa sebagai kelompok *Agen of Change,* parlemen jalanan, penyambung

lidah rakyat dan istilah sebagainya, yang mana pada beberapa dekade sebelumnya memiliki peran sangat vital. Hilangnya peran mahasiswa ini membuat posisi mahasiswa berada dalam keadaan "ada" tetapi tidak dianggap ada. Mahasiswa tidak lagi memiliki bergining wacana ataupun gerakan sebagai nilai tawar "keberadaan" mahasiswa. Oleh karena itu, paradigma (kerangka berpikir) baru harus segera dirumuskan.

Menurut Thomas S. Khun, paradigma merupakan konstalasi teori, pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan realitas sosial untuk memberikan konsepsi dalam menafsirkan realitas sosial. Paradigma baru itu harus mengarah pada identitas mahasiswa yang bukan hanya dianggap "ada" tetapi harus diakui dan dibaca atas keberadaannya.

Hal ini penting, mengingat mahasiswa adalah calon profesional dan yang akan memimpin bangsa ini pada era selanjutnya. Oleh karena itu, mahasiswa harus tertulis dan terbaca keberadaanya pada setiap posisi (*leading sector*). Untuk menentukan paradigma baru ini, harus tidak melenceng dari koridor tujuan organisasi PMII, yakni terciptanya pribadi muslim yang bertaqwa, cakap dan bertanggung jawab (profesional) dan mengamalkan ilmu-ilmunya pada segala bidang-bidang yang digelutinya.

Gerakan mahasiswa saat ini

Pada konteks saat ini, gerakan mahasiswa termasuk PMII masih kental dengan semangat gerakan mahasiswa tahun 90-an yang

dipenuhi gelora menggebu-gebu dan aroma heroisme pemuda. Faktanya, gerakan demonstrasi jalanan mahasiswa dengan semangat kritik terhadap kebijakan pemerintah masih sering kita temui. Nuansa perjuangan dan semangat yang diusung disertai dengan atmosfer peran mahasiswa sebagai *agen of change*, penyambung lidah, perantara, parlemen jalan dan sebagainya. Semangat seperti ini memang dibutuhkan oleh masyarakat hingga akhir tahun 90-an, akan tetapi dengan situasi politik mutakhir yang jauh berbeda dengan sebelumnya, apakah gerakan semacam ini masih dirasa relevan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya memahami kondisi situasi sosial politik mutakhir. Kondisi saat ini banyak mengalami perubahan penting perihal keterbukaan informasi, penyaluran aspirasi masyarakat serta kontrol masyarakat terhadap pengelolaan negara. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dari pendekatan militeristik ke pendekatan sipil, dari pendekatan represif ke pendekatan kesejahteraan.

Dengan melihat kondisi demikian, maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi pemerintah dengan rakyat telah berubah, dari kondisi yang penuh ketertutupan menjadi keterbukaan. Sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk menyampaikan aspirasi, begitu juga pemerintah tidak lagi enggan untuk mengundang masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Apalagi sikap Presiden Jokowi yang sangat dekat dengan rakyatnya dan tak ragu turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara empirik, membuat komunikasi rakyat dan pemerintah sangat cair. Meskipun dalam beberapa hal

tertentu banyak wakil-wakil rakyat yang tidak berhasil menyerap aspirasi rakyat.

Kondisi seperti ini tanpa disadari membuat peran mahasiswa sebagai *agen of change*, kelompok kritis, idealis dan penyambung lidah rakyat menjadi redup. Romantisme mahasiswa era 90-an telah hilang sebagai dampak dari situasi dan kondisi yang terus berjalan dinamis. Pergerakan mahasiswa sebagai *agent of change* perlahan-lahan berangsur menghilang dan tidak lagi mempunyai konsep tawaran yang konkrit untuk menjawab persoalan-persoalan zaman yang sangat kompleks. Secara realitas, kelompok mahasiswa masih ada, tetapi aktualisasi peranannya sudah tidak terlihat.

Terasa wajar jika kemudian banyak di antara para aktifis 90-an yang menjadi pejuang demokrasi, kini bertransformasi dari peran gerakan kritis menjadi profesional di bidang-bidangnya. Seperti Alm. Adnan Buyung Nasution yang consern di bidang hukum, Budiman Sudjatmiko di bidang undang-undang desa, Ade Komarudin di bidang politik, serta para aktivis lainnya yang fokus di bidang penegakan hukum, budaya, sosial, agama, media, LSM dan bidang-bidang lainnya.

Mereka betul-betul menjadi kelompok profesional karena saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kelompok yang dapat mendampingi mereka dalam kerja-kerja yang serius dan berdurasi panjang, seperti LSM, media, politik, lingkungan dan sektor lain-lainnya yang mampu menciptakan keadilan sosial terutama berbasis keadilan ekonomi.

Terpetakan Karena Bingung

Sayangnya, para aktivis mahasiswa menjadi kebingungan untuk mendefinisikan dirinya dalam arus perubahan ini. Sehingga para mahasiswa terpetakan ke dalam empat kelompok. *Pertama*, mahasiswa yang akademis. Mereka yang tergolong ke dalam kelompok ini fokus pada perkuliahan semata, menyelenggarakan penelitian kreatif dan memiliki keinginan melanjutkan belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi, baik s2 maupun s3. Mereka menceburkan dirinya ke dalam kerja-kerja yang bersifat akademis.

Kedua, mahasiswa pragmatis. Mereka yang tergolong ke dalam kelompok ini memiliki pandangan kuliah hanya formalitas. Mereka berharap cepat lulus agar bisa segera masuk bursa tenaga kerja yang dapat menyokong kemandirian finansial. Orientasinya adalah memperoleh pekerjaan pasca kuliah. Mahasiswa kategori ini juga terkadang bercita-cita bisa bergabung dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar, kursus dan privat, kerja penelitian lapangan atas penelitian dosennya. Poinnya adalah setelah lulus kuliah bisa memperoleh pekerjaan. Biasanya kelompok mahasiswa ini akan selalu bertanya tentang pekerjaan dan hanya pekerjaan.

Ketiga, mahasiswa hedonis. Kategori mahasiswa ini biasanya menghabiskan sebagain besar waktunya untuk media sosial, mereka sangat aktif dalam dunia daring seperti Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Mereka sangat suka nongkrong atau kongkow di cafe-cafe, mall dan sebagainya. *Keempat*, mahasiswa Islamis. Tipologi mahasiswa ini muncul akhir-akhir ini sebagai

dampak dari era kebebasan. Mereka sangat aktif mensosialisasikan paham-paham fundamentalis agama di media sosial dengan masif, sehingga mereka memperoleh simpati dari mahasiswa lain. Biasanya mereka menguasai masjid-masjid kampus secara sepihak dan cenderung eksklusif pada dunia luar.

Dari keempat kategori mahasiswa sebagaimana diulas secara singkat ini, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana posisi kader-kader PMII dan berada pada kategori yang mana?. Jawabannya adalah PMII hanya menjadi kovarian. Spektrum PMII yang sangat luas memberi konsekuensi logis bahwa bisa jadi sebagian warga PMII termasuk kategori akademis, pragmatis, hedonis dan meskipun agak sulit, bisa jadi fundamentalis.

Sudah tentu ini merupakan keadaan yang memprihatinkan, bahwa pengelompokan ini bukan pada jalan menuju profesionalitas bidang-bidang personal mahasiswa. Justru pengelompokan ini sebagai dampak dari ekspansi globalisasi yang juga mengarah pada kehidupan mahasiswa. Kondisi ini tidak lagi berbicara pengelompokan mahasiswa pada kategori Organisasi Intra dan Organisasi Ekstra, atau jika dipersempit tidak lagi berbicara kategori mahasiswa jurnalistik, musik, budaya, sastra, lingkungan, seni dan sebagainya. Akan tetapi lebih pada ranah yang praktis seperti kelompok mahasiswa pragmatis, hedonis, akademis dan fundamentalis. Keadaan yang sangat naif.

Merumuskan Paradigma Baru

Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini diperlukan perumusan paradigma baru. PMII harus memiliki pijakan konsepsional bagi setiap langkah pemikiran dan gerakannya. Paradigma ini sebagai sebuah totalitas konstalasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi dan gerakan yang menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan sesuai dengan konsensus komunitas yang menjalaninya dengan latar sosial serta dalam dimensi ruang dan waktu.

Perubahan paradigma ini menuntut PMII untuk segera memodifikasi kurikulum pengkaderan yang dirasa bisa mengarahkan pada tercapainya visi besar PMII. Kurang lebih sudah 18 tahun lamanya reformasi dari era Orde Baru ke Era Demokrasi, akan tetapi PMII belum juga merumuskan dan menemukan paradigma yang pas. Dalam beberapa tahun ini memang banyak alternatif paradigma yang ditawarkan baik dalam Musyawarah Nasional maupun pada Kongres PMII. Beberapa paradigma itu seperti "Paradigma berbasis realitas", Paradigma Menggiring Arus", Paradigma Leading Sektor", "Paradigma Konstruktif Transformatif" dan sebagainya.

Melihat konsekuensi era demokratisasi ini maka wajar jika banyak pandangan tentang paradigma baru PMII, akan tetapi dalam menentukan paradigma ini tak perlu terkekang senior-junior. PMII harus menggunakan kesempatan demokratis melalui partisipasi anggota PMII di seluruh Indonesia, baik yang tergabung dalam Pengurus Besar, Cabang, Komisariat dan sebagainya. Sejauh penetapan paradigma baru itu melalui prosedur partisipatoris warga

PMII yang tercantum dalam ketentuan AD/ART organisasi, maka memutuskan secara tegas paradigma baru bukanlah kesalahan.

Untuk menentukan paradigma baru ini, PMII tidak boleh lagi terjebak dalam mindset umum bahwa PMII tetap merupakan organisasi *agent of change* dan semata-mata hanya mengandalkan moralitas luhur sebagai basis gerakannya. PMII harus mempunyai kepekaan untuk menjawab persoalan zaman yang pada hal ini bisa dilakukan dengan penerapan kurikulum yang dirasa bisa mampu mengantarkan para kadernya untuk berkiprah di segala *leading sektor* secara profesional, baik di dalam struktur lembaga-lembaga negara ataupun di luar itu.

Begitu juga dalam setiap pengkaderannya, PMII tidak harus selalu memprioritaskan nilai-nilai dan doktrin keaswajaan terhadap kadernya yang termaktub dalam kerangka berfikir konseptual paham Aswaja, tetapi PMII harus memodifikasi ulang kerangka berfikir dan kurikulum kaderisasinya sehingga pengkaderan tidak lagi bersifat stagnan. Hal ini tidak berarti PMII harus meninggalkan paham *Ahlussunnah wal Jamaah.*

Penerapan paradigma baru ini akan berimplikasi praktis pada mindset para kadernya, karena hal ini akan mengubah pandangan tentang dirinya dan para kadernya dari kungkungan mindset teologis dan moralitas semata di dalam berorganisasi. Pada akhirnya, PMII akan menjadi organisasi pengkaderan bagi calon-calon profesional pada bidangnya masing-masing tanpa harus meninggalkan identitas ke-PMII-annya, baik dari segi kultur, nilai, tradisi, aqidah dan sebagainya.

Dengan perubahan paradigma ini pula PMII akan selalu ada dan tetap dianggap keberadaannya di manapun ia berada. Baik dalam sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik dalam sektor akademis maupun sektor usaha, lembaga-lembaga masyarakat, media dan sektor-sektor lainnya. Langkah ini tidak keluar dari koridor tujuan PMII, yakni terciptanya pribadi muslim yang bertaqwa, cakap dan bertanggung jawab (profesional) dan mengamalkan ilmu-ilmunya.

Dari itu semua, perubahan paradigma baru yang dirasa paling baik dengan pertimbangan argumentasi yang logis dari berbagai pemikiran dan refleksi warga PMII harus segera ditentukan. PMII harus segera memilih dan menerapkannya ke dalam langkah gerakan konkrit sebagai jawaban dari perubahan zaman. Jika tidak, maka PMII hanya akan menjadi 'fosil' yang stagnan dari arus zaman karena kekosongan paradigma membuatnya tidak lagi berperan mempertahankan peran vitalnya di masyarakat.

MENEGUHKAN INDEPENDENSI PMII

Persoalan dan perdebatan antara apa manfaatnya PMII melepaskan diri dari NU (baca: independen), dan apakah konteks saat ini sudah relevan PMII kembali ke NU menjadi wacana yang terus muncul dalam setiap zaman perjalanan PMII. Lebih-lebih persoalan ini diangkat ke dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang 2015. Bahkan PBNU mengancam akan mendirikan organisasi mahasiswa baru apabila PMII tidak mau kembali menjadi organisasi di bawah kontrol NU. Sepertinya wacana ini akan terus menjadi dialektika antar kader dan di kalangan elit Nahdliyin.

Independen

Independensi berarti sikap kemandirian, yakni mandiri dalam gerak pemikiran maupun dalam gerak operasional organisasi. Dengan independen, berarti PMII tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya berkomitmen pada perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Memang dalam sejarah kelahirannya, PMII merupakan organisasi yang lahir dari 'rahim' Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi dalam perjalannya, PMII harus bersifat realistis dan kritis dalam menentukan sikapnya untuk menjadi organisasi independen.

Sikap independen ini berawal pada 1972, yaitu dalam pertemuan kordinator cabang-cabang PMII di Munarjati, Malang. Kader-kader PMII ini mencetuskan kebulatan tekad untuk independen, artinya tidak lagi menjadi underbouw NU. Puncaknya, terjadi pada kongres PMII yang diselenggarakan pada 1973 di Ciloto, yaitu memperkuat keputusan di Munarjati. PMII benar-benar independen, hal ini tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar PMII yang dengan jelas disebutkan bahwa organisasi bernama PMII bersifat independen. Sebuah pernyataan monumental dalam sejarah perjalanan PMII dengan mengambil sikap pada posisi mandiri. Suatu hal yang tidak mudah dan tidak pula mulus, Mengapa ?

Karna seketika itu juga timbul pro dan kontra ihwal independensi PMII. Sehingga keliru jika wacana PMII kembali ke NU ini dipahami sebagai wacana baru, terutama pada muktamar NU 2015 di Jombang. Faktanya, pro dan kontra ini sudah terjadi sejak

awal mula PMII independen. Sekitar tahun 1973 terjadi pergolakan dan dialektika sengit di kalangan pengurus PMII sendiri, bahkan para Kyai. Yang pro misalkan Mahbub Junaidi, Zamroni dan Said Budairy beranggapan bahwa independensi PMII harus dimaklumi, sebab PMII harus dinamis dan dalam konteks politik saat itu, PMII ingin tetap eksis serta bisa berkiprah di dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, karena lepas dari organisasi induknya.

Yang kontra misalkan Chalid Mawardi dan HM. Abduh Paddare. Mereka sangat tegas menghendaki agar PMII tetap menjadi bagian dari NU. Mereka melihat NU dalam perspektif sebagai kekuatan politik. Dengan memisahnya PMII dari NU berarti pengkaderan dalam tubuh NU akan terputus. Padahal NU membutuhkan kader-kader politik di masa depan. Reaksi lain juga muncul dari para Kyai dengan alasan jika PMII lepas dari kontrol NU, maka nantinya akan berkumpul antara putra dan putri, padahal pesantren selalu memisahkan antara putra dan putri.

Dalam konteks saat itu, ada tiga alasan mengapa PMII harus independen, yakni kedewasaan dan kedinamisan organisasi; sikap kecewa PMII terhadap NU yang tidak mengakomodasi para kader-kadernya untuk duduk di pemerintahan; Dan sebuah siasat PMII menghadapi perpolitikan orde baru yang dapat mengancam pembubaran organisasi jika tetap menjadi bagian dari NU. Akan tetapi, saya tidak ingin membawa alasan independensi PMII tersebut menjadi persoalan yang harus diperdebatkan ulang. Biarlah itu menjadi konsumsi para kader PMII di masa itu karna konteks saat itu dan sekarang tentu berbeda. Yang paling penting dibahas adalah

substansi dari makna "Independen" apakah masih relevan dalam konteks saat ini? Mari kita telaah.

Manifesto Independensi

Pertama, independensi merupakan kekuatan kokoh yang mustahil dibongkar lagi. Konteks saat ini jauh lebih maju dan berkembang dibanding beberapa dekade terakhir. Kebiasaan hidup mandiri merupakan hal yang sulit diubah lagi. Sehingga sekalipun PMII benar-benar kembali ke NU, maka saya yakin sifat independensi dalam jati diri mahasiswa itu akan selalu ada.

Kedua, dinamis. Jangan lupa, filosofi makna "pergerakan" berarti tindakan dan pemikiran yang terus menerus bergerak, bukan statis, bukan pula asal manut dan taat. PMII harus tetap dinamis dengan sikap kritis. Salah satu contoh bukti konkrit hasil dari sifat kedinamisan PMII adalah bergabungnya PMII dengan kelompok Cipayung. Bayangkan jika saat itu PMII masih berada di bawah naungan NU, belum tentu akan memiliki keleluasan untuk bergabung dengan kelompok Cipayung. Jika benar PMII akan kembali ke NU, maka relevansi makna 'pergerakan' harus dipertanyakan. Artinya, makna gerak, tidak sesuai dengan realita kebebasan yang tidak akan didapatkan PMII apabila bergabung kembali dengan NU. Ingat, organisasi underbouw tidak pernah berkembang dengan baik.

Ketiga, PMII makin besar dan dewasa, sehingga harus bisa menentukan sikap dan masa depan sendiri. Tercatat 230 Cabang dan 24 Pengurus Kordinator Cabang (PKC) di seluruh Indonesia. Belum lagi jumlah komisariat dan rayon yang tak terhitung jumlahnya.

Jumlah yang sangat besar dan dirasa sulit bagi organisasi mahasiswa lain untuk mencapai angka yang fantastis ini. Haruslah disadari, saat ini PMII telah menghasilkan kader-kader muda baru yang berjumlah sangat besar dan pasti memiliki tantangan yang berbeda dengan kader-kader dahulu. Kader-kader muda PMII ini mempunyai masa depan yang jauh lebih panjang dari mereka yang sudah memiliki usia tua. Biarkanlah kader-kader PMII baru ini mengukir tapak-tapak sejarahnya sendiri, jangan sampai menjadikan kader-kader baru ini sebagai tunggangan kepentingan.

Keempat, PMII tetap dalam koridor Islam Ahlussunnah wal-Jamaah. Hal ini mesti diterima sebagai bukti objektif bahwa kendati PMII berpisah secara struktur dengan NU, tapi masih terikat dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan para kader PMII-lah yang merumuskan konsep Aswaja secara tertulis, seperti Harun al-Rasyid dan Chatibul Umam. Meskipun PMII independen, tetapi tetap berhaluan Aswaja. Saya tidak pernah melihat cabang, komisariat ataupun rayon PMII menggelorakan gerakan konservatif, puritan, takfiri dan islam ala fundamental lainnya. Justru sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman keislaman dasar, menjadi lebih moderat dan toleran ketika bergabung bersama PMII.

Kelima, interdependensi. Sikap warga PMII untuk independen ternyata tidak sepenuhnya memisahkan ormas mahasiswa ini dengan Nahdlatul Ulama (NU). Tak bisa dipungkiri masih adanya keterkaitan antara PMII dan NU, yakni keterkaitan atas dasar kesamaan nilai, cita-cita, kultur, tradisi, ideologi maupun aqidah. Dari sinilah sangat sulit untuk memisahkan antara PMII dan

NU, oleh karena itu akan lebih baik dan mungkin mendekati kebenaran jika independensi itu ditafsirkan sebagai interdependensi. Sikap ini menjadi unik bagi PMII, karna bisa jadi PMII merupakan satu-satunya ormas mahasiswa yang mempunyai istilah Interdependen.

Keenam, PMII tetap menjadi sumber pengkaderan NU. Faktanya, sebagian besar para alumni PMII-lah yang mengisi lembaga-lembaga kepemimpinan formal NU semcam GP Ansor, Fatayat, Muslimat, Lakpesdam NU dan lembaga NU lainnya. Hal ini terjadi karena secara sosiologis, para kader PMII merupakan masyarakat pedesaan yang memiliki tradisi keagamaan Islam Nusantara yang kuat. Di samping itu para kader PMII mayoritas merupakan alumni pesantren-pesantren, yang memiliki otoritas untuk mewarisi tradisi ajaran Islam Nusantara. Jadi jangan ada kekhawatiran PMII akan melenceng dan bertentangan dengan NU. Sebab, kader-kader PMII-lah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama.

Dari alasan-alasan itulah independensi masih sangat relevan dalam konteks saat ini. PMII dan NU itu ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalaupun ada kalangan NU yang mengancam akan mendirikan organisasi baru jika PMII tidak kembali ke NU, itu akan lebih baik. Ingat, NU bukan hanya organisasi (*Jam'iyah*), tetapi juga tradisi (*Jama'ah*). PMII bisa mengakomodasi keduanya, dan organisasi mahasiswa baru di bawah naungan NU tersebut akan fokus mengakomodasi kalangan NU secara *Jam'iyah* semata.

REFLEKSI KEPEMIMPINAN KADER PMII

Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, yakni bersih, tiada noda hitam dan tiada bekal kejahatan. Tuhan memberikan kelengkapan naluri berupa rasa takut dan harap. Disertainya sebuah akal yang berfungsi memilih mana yang benar, mana yang salah, yang baik dan yang buruk, serta berbagai bekal alami yang muncul karena sifat alami manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Atas rahman dan rahimNya manusia mampu membedakan perbuatan jahat, dosa, perbuatan baik dan amal salih. Manusia

dengan segala kelengkapan potensi dan akalnya berlomba-lomba terhadap apa yang disebut dengan kenikmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Bukan hanya pada etos kerjanya, tetapi juga dalam doanya manusia bersimpuh, memohon agar kebahagiaan menyertainya, bukan hanya dunia, namun juga akherat.

Perlu dipahami, Tuhan tidak butuh terhadap perbuatan manusia. Ia menyuruh untuk menyembah bukan karena Ia butuh disembah. Segala pikiran dan tindakan manusia tidak sedikitpun akan menguntungkan atau merugikanNya. Segala perbuatan manusia semata-mata hanya akan kembali untuk diri mereka sendiri. Jika manusia berbuat baik, semata-mata untuk kebaikannya, begitu juga segala bentuk perbuatan manusia, akan kembali untuk manusia itu sendiri. Apakah kemudian akan terjadi gesekan dan benturan antar manusia sehingga saling merugikan atau menguntungkan itu konsekuensi dari pilihan perbuatan manusia sendiri. Hanya keburukan dan nafsu buruk manusia yang membuat kemudharatan, dan hanya akal jernih dan keimanan manusia yang akan menciptakan kemaslahatan.

Di muka bumi ini, manusia menjelma sebagai khalifah. Menjadi khalifah berarti menjadi pemimpin, memimpin atas dirinya, keluarganya, dan masyarakat secara umum. Sebagaimana Rosul bersabda; (*setiap kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*). Kepemimpinan setiap kita bisa dalam ruang lingkup kecil, menengah dan luas. Semua akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akherat. Jiwa pemimpin yang terdapat di dalam

diri manusia ini merupakan potensi yang dimilikinya sebagai anugerah dari yang Maha Kuasa.

Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tidak hanya intelektualitas semata, tetapi harus didukung oleh kecerdasan emosional (*emotional intelligence*), komitmen dan integritas. Tanpa ketiganya, maka kepemimpinannya tidak akan seimbang (*balance*) dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada manfaatnya. Contohnya sangat banyak, lihatlah problem sosial yang sangat kompleks. Kepemimpinan para pejabat negara, partai politik, organisasi, sosial keagamaan dan lain-lain.

Mereka tergolong orang-orang yang memperoleh pendidikan tinggi, mereka memiliki keilmuan yang dicapai melalui pendidikan S1, S2, S3 bahkan mencapai tingkat profesor. Namun ternyata tidak cukup, pencapaian pendidikan yang tinggi tidak menjamin manusia bebas dari perilaku korupsi, nepotisme, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Virus-virus ini tertanam karna ketidakseimbangan antara intelektualitas, integritas dan komitmen kepemimpinannya.

Begitulah iklim kepemimpinan yang sangat kering, kering atas keyakinan terhadap sebuah kebenaran. Iklim kering ini tidak pernah menumbuhkan keyakinan perihal hubungan manusia dengan Tuhannya. Keyakinan itu semakin lemah ketika mindset mahasiswa sebagai kader intelektual, khususnya warga PMII hanya terarah pada penguasaan *knowledge*. Penguasaan *knowledge* tanpa sebuah keyakinan dan keimanan tentang hubungannya dengan Tuhan dan semesta alam, hanya akan menimbulkan produk-produk keilmuan

yang hanya menghasilkan manfaat sekaligus mafsadat yang lebih besar. Sebuah bentuk kekeliruan pemikiran dan tindakan manusia sebagai subjek pembangunan atau *khalifah fil-ard*.

Renungkanlah, apakah ruang gerak yang selama ini digunakan sebagai basis refleksi dan tindakan telah disertai dengan penanaman keyakinan tentang siapa kita, di mana berada, untuk apa dan bagaimana melakukan kehidupannya di muka bumi agar bisa kembali ke fitrah sebagaimana asalnya?. Jika tidak, maka berbenahlah, dan mulailah dari diri sendiri. Sebuah langkah besar pasti dimulai dari kesadaran pribadi. Tak perlu melawan siapapun atas nama ketertindasan, kezaliman dan sebagainya, karena lawan hakiki kita adalah diri sendiri.

Kita sibuk pada perkembangan kehidupan dunia, dan sangat minim penanaman kepemimpinan pada maka substantif manusia. Kita sibuk dengan event-event, kegiatan, seminar dan perkuliahan tanpa merefleksikan hubungannya dengan dimensi vertikal-horisontal. Perilaku rakus dengan mengambil hak-hak orang lain, menzalimi kebebasan orang lain, penyalahgunaan anggaran kegiatan, manipulasi data dan sebagainya, itu semua merupakan tindakan yang tidak menuntun pada nilai-nilai fitrah manusia. Sebuah nilai-nilai yang baik antar hubungannya dengan manusia yang lain. Inilah kesesatan nyata dan jalan keliru manusia dalam mengimplementasikan kepemimpinannya di dunia.

Jika kita tidak mampu melawan diri kita, maka akan menghasilkan output seorang manusia yang rakus. Lihatlah manusia

berbondong-bondong mencari uang, bukan untuk kebutuhan tapi kerakusan. Lihatlah, berapa banyak gaji pegawai yang dirasa masih kurang, sebesar apapun, setinggi apapun. Lihatlah pemimpin negara dengan jabatan strategis dan kebijakan yang bisa menguntungkan terhadap siapa yang ia tunjuk, ternyata juga belum cukup untuk menunaikan kerakusannya. Itu semua karena manusia tidak akan pernah puas, selamanya.

Lalu kenapa manusia sebagai makhluk pemimpin seringkali gagal mengelola kepemimpinannya? jawabannya karena ia tidak dapat memahami dirinya sendiri. Keputusan dan langkah konkrit yang dihasilkan dari refleksi pemikirannya bukan mempertimbangkan martabat manusia, namun cenderung egois dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Maka dari itu, setiap kita khususnya warga PMII harus memimpin diri sendiri sekaligus melawannya untuk melumpuhkan berbagai penyakit hati.

Serigala yang terdapat di dalam diri kita sangat liar. Kita bisa dibawa ke arah kezaliman sekaligus perbuatan merusak martabat manusia. Ia memaksa diri kita untuk melawan tuntutan ajaran kebenaran. Paling tidak, dimulai dari hal-hal kecil, tetapi bersifat *continues* dan sangat masif, lama-lama menjadi besar, menjadi koruptor dan mafia proyek. Lihatlah Indonesia yang sudah 70 tahun merdeka tapi kemiskinan dan ketimpangan sosial masih terjadi. Di dalam praktiknya tercermin pada perilaku mengambil hak-hak orang lain, menghina perilaku orang lain, meremehkan potensi orang lain, menzalimi bawahan, bertindak tidak jujur, memanipulasi data kegiatan dan masih banyak yang lainnya.

Mereka lemah, tak berkutik melawan dirinya sendiri. Kegagalan-kegagalan manusia di dunia ini karena mereka tidak mampu menguasai diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain sebelum merubah diri kita sendiri. Apalagi mahasiswa, musnahkanlah idealismemu sebelum engkau mampu menaklukan dirimu sendiri. Warga PMII harus bisa melawan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Otong (1987), *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam perspektif sejarah bangsa (1960-1985)*, skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ahmad, Muhammad dan Mudzakir, M. (2000), *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Alfas, Fauzan, (2007) *PMII Dalam Simpul-Simpul An-Nahdliyah.* (Surabaya: Kalista)

Bertens, Karl. (1997). "Hak atas Pelayanan Kesehatan", dalam *Kompas*, 22 Januari

Dakhiri, Muh. Hanif dan Rachman, Zaini (2000), *Post Tradisionalisme Islam: Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII*, Jakarta: ISISINDO MEDIATAMA

________________________________Modul Mapaba PMII Ciputat, Maret (2012), Ciputat: PMII Cabang Ciputat

Hitti, Philip K. (2004), *History Of The Arabs*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Modul Mapaba PMII Ciputat, Maret (2012), Ciputat: PMII Cabang Ciputat.

Pengurus Besar PMII (1980), *Dokumen Historis PMII*, Jakarta: Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Razak, Abdul dan Anwar, Rosihon (2006), *Ilmu kalam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sejarah Singkat IPNU-IPPNU (1970), *Buku kenang-kenangan Makesta IPNU-IPPNU Kodya Surakarta*

Sulastomo (2008),*Hari-hari yang panjang transisi Orde lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar¸* Jakarta: Buku Kompas

Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi.* (Jakarta: The wahid Institute)

TENTANG PENULIS

Ahmad Hifni lahir di Jember, Jawa Timur, 11 Agustus 1993; seorang aktivis PMII, menekuni bidang tulis menulis, dan peneliti pada Moderate Muslim Society (MMS).

Ahmad Hifni menyelesaikan studi sarjananya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini ia sedang menempuh studi magister di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

Sejak kecil Ahmad Hifni telah akrab dengan dunia Islam, khususnya pesantren. Ia terlahir dari keluarga yang memiliki basis keislaman NU yang kuat. Kehidupannya tak lepas dari dunia

pesantren yang kemudian memengaruhi perkembangan intelektualitasnya. Kemudian ia melanjutkan masa belajarnya di MAN 1 Jember sambil menjadi santri di Ma'had el-Dzikr (2008-2011). Dari dunia pesantren, dan jurusan Agama yang digeluti di Madrasah Aliyah, Ahmad Hifni banyak mengenal dasar-dasar keilmuan Islam seperti al-Qur'an, tafsir, ilmu tafsir, fikih, ushul fikih, hadis, ilmu hadis, filsafat, tasawuf, ilmu kalam, bahasa dan sastra.

Sejak di MAN dan Ma'had, ia telah aktif di bidang tulis menulis dan berbagai organisasi kesiswaan dan kesantrian. Ia pernah menjadi wakil ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Komisariat MAN 1 Jember periode (2009-2011). Ia juga pernah menjadi ketua Umum Ma'had el-Dzikr periode (2009-2010).

Selama menjadi mahasiswa, kemampuan analisisnya tentang dunia Islam, sastra dan linguistik terus ia kembangkan. Ia aktif dalam dunia tulis menulis. Ia aktif menulis di berbagai koran nasional, dan majalah lokal. Di samping itu, ia juga pernah menjadi penyunting (editor) buku *Sosiolinguistik, Psikolinguistik, Ilmu Kalam, dan Stilistika.* Ia juga menjadi anggota penyusunan buku *Iran di Mata Indonesia* dan buku *70 Tahun Indonesia Merdeka.*

Dalam dunia aktivis, Ahmad Hifni aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora, pernah menjadi Kordinator Kaderisasi (2012-2013), Ketua I (2013-2014) dan (2014-2015). Ia juga aktif dalam *Arabic Language and Literature Focus (ALIF), Ittihadu Thulabah al-Lughah al-'Arobiyah (Ithla')* persatuan mahasiswa bahasa dan sastra Arab se-

Indonesia, dan Madrasah al-Qahwah (*Ciputat Cultural* Studies). Ia juga menjadi pengurus dalam *Keluarga Alumni Bahasa dan Sastra Arab (KASAB)* Periode (2014-2018).

Sejak 2014 ia aktif dan menjadi peneliti pada *Moderate Muslim Society* Jakarta. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga riset yang bertujuan untuk menyampaikan pendekatan moderasi dalam pembangunan Indonesia terutama dalam hal toleransi keagamaan dan keadilan sosial di dalam masyarakat yang plural (beragam) dan demokratis. Kemudian pada 2015, Ia bersama aktifis PMII Adab dan Humaniora mendirikan Madrasah al-Qahwah (*Ciputat Cultural Studies*), sebuah lembaga kajian dan diskusi yang fokus pada bidang budaya, bahasa, sastra dan filsafat.



"Buku yang sangat menarik untuk ditelaah para kader Muda PMII dan dimurajaah para senior PMII. Buku ini menggambarkan posisi strategis PMII saat ini dan di masa depan. Dengan bahasa yang membuat penasaran pembaca, penulis muda yang merupakan kader muda potensial PMII ini telah menawarkan gagasannya yang sangat brilian."

Dr. Akhmad Saehudin, M.A., *Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

"Membaca buku *Menjadi Kader PMII* menghadirkan lagi memori kolektif masa lalu yang menjadi 'ruang' diaspora setiap orang yang terkait dengannya. Bergelut dalam diaspora keilmuan dan budaya untuk memasuki 'arena kontestasi' yang sebenarnya, bukan untuk mencari yang menang dan kalah, tetapi meneguhkan kembali identitas sekaligus untuk selalu menjadi *'anfa'uhum linnas'*."

Siti Amsariah HM, M.Ag., *Alumni Aktivis Perempuan PMII dan Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

"*If you are not part of the solution, you are part of problem*. Menjadi kader PMII adalah menjadi *problem solver*, bisa melepaskan dari masalah dan beban yang memasung, membelenggu fisik dan pikiran negara bangsa, sebagaimana misi mulai para nabi sepanjang sejarah peradaban.
Buku karya sahabat Ahmad Hifni ini menjadi solusi, putera bangsa yang hebat berikhtiar beramal ilmiah. Ilmu dan baktinya diberikan, khidmatnya untuk rakyat dan Ilahi. Buku ini layak menjadi pegangan seluruh kader PMII se-Indonesia, sebuah negeri yang dijarah oleh gangster dan kapitalis hingga detik ini."

Dinno Munfaizin Imamah., *Intelektual Muda NU dan Penulis buku Siasat NU era Penjajahan Jepang*

MMS
Moderate Muslim Society

9 789791 994415